

**REPRESENTASI KINERJA POLRI TERKAIT
KASUS TEROR AIR KERAS NOVEL BASWEDAN
DALAM MEDIA MASSA *ONLINE* DI INDONESIA**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Mencapai derajat Sarjana Strata 2**

Magister Linguistik

Dina Etikawati

13020216420024

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

Match Overview

13

13%

1	lontar.u.ac.id	3%
2	Submitted to Universitas...	1%
3	eprints.uns.ac.id	1%
4	Submitted to Binas Uni...	1%
5	id.1234ok.com	1%
6	Submitted to Program...	<1%
7	jurnal.komunikasi.stho...	<1%

REPRESENTASI KINERJA POLRI TERKAIT
KASUS TEROR AIR KERAS NOVEL BASWEDAN DALAM
MEDIA MASSA ONLINE DI INDONESIA

Dina Etikawati
13020216420024

ABSTRACT

Dina Etikawati, 2019, Representasi Kinerja Polri Terkait Kasus Teror Air Keras Novel Baswedan Dalam Media Massa Online di Indonesia, Program Studi Magister Linguistik, Universitas Diponegoro, Pembimbing Dr. Nurhayati, M. Hum. The incident of the acid attack to Novel Baswedan is one of the event that made headlines in Indonesia. That incident became one of the main topics in the mass media. The reporting about acid attack cases emerged from several parties, namely KPK, Polri, Novel Baswedan, and others. News in the mass media about the investigation process of the Novel Baswedan acid attack created various assumptions in the public. Assumptions are created because there are doubts toward the national police. The doubt in the public caused the perpetrators who have not been caught. The national police respond negative assumptions. The respons given by the police through mass media. *This research is about the representation of police performance in investigating the case of Novel Baswedan*

PERSETUJUAN TESIS

**REPRESENTASI KINERJA POLRI TERKAIT
KASUS TEROR AIR KERAS NOVEL BASWEDAN DALAM MEDIA
MASSA *ONLINE* DI INDONESIA**

Disusun oleh

Dina Etikawati

13020216420024

Telah disetujui oleh Pembimbing Penulisan Tesis pada tanggal 16 Agustus 2019
untuk diperiksa tingkat plagiasi dan diujikan dalam rangka mencapai gelar sarjana
Strata 2

Pembimbing



Dr. Nurhayati, M. Hum.

NIP. 196610041990012001

Ketua Program Studi

Magister Linguistik



Dr. Deli Nirmala, M. Hum.

NIP. 196111091987032001

PENGESAHAN TESIS

REPRESENTASI KINERJA POLRI TERKAIT KASUS TEROR AIR KERAS
NOVEL BASWEDAN DALAM MEDIA MASSA *ONLINE* DI INDONESIA

Disusun oleh

Dina Etikawati

13020216420024

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 6 September 2019

Pembimbing

Dr. Nurhayati, M. Hum.

NIP 196610041990012001

(30-9-2019)

Ketua Penguji

Dr. Deli Nirmala, M. Hum.

NIP 196111091987032001

(26-9-2019)

Penguji I

Dr. Agus Subiyanto, M. A.

NIP 196408141990011001

(20-9-2019)

Penguji II

Dr. M. Suryadi, M. Hum.

NIP 196407261989031001

(26-9-2019)

Diterima dan dinyatakan lulus di Semarang pada tanggal

30 September 2019

Ketua Program Studi,

Dr. Deli Nirmala, M. Hum.

NIP. 196111091987032001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya disebutkan dan dijelaska di dalam teks dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Agustus 2019



Dina Eukawati

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah, SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga tesis dengan judul “Representasi Kinerja Polri Terkait Kasus Teror Air Keras Novel Baswedan Dalam Media Massa Online di Indonesia” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini bertujuan guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh jenjang strata 2 di program studi Magister Linguistik. Ungkapan terima kasih dan rasa hormat, penulis sampaikan di dalam kesempatan ini, kepada:

1. Dr. Nurhayati, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, dan juga sebagai dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Deli Nirmala, M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
3. Segenap dosen Program Studi Magister Linguistik yang telah memberikan ilmu dan wawasan berharga kepada penulis.
4. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan tanpa henti.
5. Kawan-kawan Program Magister Linguistik angkatan 2016/2017 semester genap.
6. Kawan-kawan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang angkatan 2011
7. Pihak-pihak yang telah berkontribusi membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena ini, penulis mengharapkan kritik dan saran supaya dalam penelitian mendatang menjadi lebih baik. Penulis juga berharap semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan dalam kajian linguistik.

Semarang, 15 Agustus 2019

Dina Etikawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN.....	ix
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRACT.....	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6. Definisi Operasional	9
1.7. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Kajian Pustaka	11
2.2. Landasan Teoritis.....	19
2.2.1 Analisis Wacana Kritis.....	19
2.2.2 Tahapan Analisis Wacana Kritis Fairclough	25
2.2.2.1 Tahap Deskripsi.....	25
2.2.2.1.1 Proses Material	27
2.2.2.1.2 Proses Mental.....	28

2.2.2.1.3 Proses Verbal.....	30
2.2.2.1.4 Proses Behavioral.....	30
2.2.2.1.5 Proses Relasional.....	31
2.2.2.2 Tahap Interpretasi.....	34
2.2.2.3 Tahap Eksplanasi.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Penyediaan Data.....	38
3.3. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1. Hasil.....	42
4.2. Pembahasan.....	45
4.2.1 Representasi Kinerja Polri Terkait Kasus Teror Air Keras Novel.....	45
4.2.1.1 Bentuk Tanggung Jawab Polri.....	45
4.2.1.2 Bentuk Kredibilitas Polri.....	54
4.2.1.3 Bentuk Kooperatif dan Profesionalitas Polri.....	68
4.2.2 Relasi Kuasa dalam Tindak Wacana Polri tentang Kasus Novel Baswedan.....	90
4.2.3 Relasi Kuasa Tindak Wacana dan Dampaknya Terhadap Struktur Sosial.....	104
BAB V PENUTUP.....	113
5.1. Simpulan.....	113
5.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
4.1	Proses Material Pernyataan Langsung Polri	46
4.2	Proses Mental Pernyataan Langsung Polri	55
4.3	Proses Verbal Pernyataan Langsung Polri	62
4.4	Proses Relasional Atributif Pernyataan Langsung Polri	69
4.5	Proses Relasional Perluasan Makna Pernyataan Langsung Polri	71
4.6	Proses Behavioral Pernyataan Langsung Polri	74

ABSTRACT

The incident of the acid attack to Novel Baswedan on April 11th, 2017 is one of the events prominent in the newspaper headlines in Indonesia. The reporting about acid attack cases emerged from several parties, such as KPK, Polri, and Novel Baswedan. News in the mass media about the investigation process of the Novel Baswedan acid attack created various assumptions in the public. Assumptions are created because there are doubts toward the national police. The doubt in the public caused the perpetrators not to be caught. The responses given by the police through mass media. This research is about the representation of police performance in investigating the case of Novel Baswedan acid attack. The data were taken directly from the police statements in online mass media including kompas.com, tempo.co, detiknews.com, and okezone.com. The research data collection method is simak method. The data were analysed using abductive inferential method.. The results showed first, the Police is a legal institution that is responsible, credible, professional, and cooperative; second, there is a power relation created by the police in them discourse. Third, the Polri's discourse aims to maintain the social structure in the community about police law institutions. The conclusion of the research is that Polri discourse represents the police's performance and Polri's power relations. Besides, both of them affect on the police position in the social structure.

Key words: representation, performance, relation.

INTISARI

Peristiwa penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan pada 11 April 2017 merupakan salah satu peristiwa yang menjadi headline di Indonesia. Pemberitaan tentang kasus penyerangan air keras muncul dari beberapa pihak yaitu KPK, Polri, Novel Baswedan, LSM, dan lainnya. Berita di media massa tentang proses investigasi kasus penyerangan air keras Novel Baswedan memunculkan berbagai asumsi di publik. Asumsi-asumsi yang muncul yakni keraguan terhadap Polri. Keraguan itu muncul karena pelaku yang belum tertangkap. Respon yang diberikan oleh Polri melalui media massa menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini mengenai representasi kinerja kepolisian dalam investigasi kasus penyerangan air keras Novel Baswedan. Peneliti mengambil data penelitian dari pernyataan langsung kepolisian di media massa *online* meliputi *kompas.com*, *tempo.co*, *detiknews.com*, dan *okezone.com*. Metode pengambilan data penelitian yaitu metode simak dengan teknik lanjutan simak bebas libat cakap. Metode analisis data menggunakan abduktif inferen. Hasil penelitian menunjukkan pertama, Polri adalah lembaga hukum yang bertanggung jawab, berkredibilitas, dan profesional serta kooperatif. Kedua, terdapat relasi kuasa yang diciptakan Polri dalam tindak wacananya. Kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kasus teror Novel Baswedan memiliki kekuasaan yang lebih. Media menjadi sarana untuk memperkuat citra positif kepolisian di masyarakat. Ketiga, tidak wacana Polri bertujuan untuk mempertahankan struktur sosial di masyarakat tentang lembaga hukum kepolisian.

Kata kunci: representasi, kinerja, relasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UUD 1945 pasal 1 ayat (3) hasil amandemen ketiga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Isi pasal 1 ayat (3) tersebut mengatur bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus senantiasa memiliki landasan hukum. Ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Terbentuknya aturan itu juga memberikan jaminan hukum bagi seluruh warga negara. Tegaknya peraturan hukum di Indonesia dilakukan melalui penegak hukum. Salah satu penegak hukum yang dimiliki Indonesia adalah kepolisian RI.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang paling awal bersinggungan dengan masyarakat. Polri menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum pidana dan perdata. Kewenangan Polri mengenai tugas dan fungsi lembaga itu teratur dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 2 tentang kepolisian negara republik Indonesia. Salah satu fungsi kepolisian yaitu dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindak kejahatan yang menjadi wewenang Polri untuk diusut adalah kejahatan tindak perdata dan tindak pidana. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan berupa menentukan dapat atau tidaknya dilakukan sebuah penyidikan,

mengumpulkan bukti, memperjelas tindak pidana yang terjadi, dan menentukan tersangka. Kepolisian memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dugaan laporan tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga hukum yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Bentuk tindak hukum pidana bermacam-macam, diantaranya penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penculikan, penipuan, dan penyerangan. Peristiwa tindak pidana yang cukup mengejutkan publik adalah penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Penyerangan dengan air keras dialami oleh Novel Baswedan pada 11 April 2017. Peristiwa tersebut terjadi ketika penyidik KPK itu pulang dari salat subuh di masjid Jami Al Ihsan, kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara. Novel diserang oleh dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor menggunakan cairan air keras. Cairan tersebut disiramkan kepada Novel yang sedang berjalan menuju rumah. Serangan air keras mengenai wajah Novel Baswedan yang mengakibatkan gangguan penglihatan pada kedua matanya. Akibat gangguan penglihatan pada kedua matanya Novel harus menjalani serangkaian perawatan di Singapura. Novel menjalani perawatan untuk mengobati luka bakar pada mata sebelah kiri.

Kasus penyerangan Novel Baswedan diduga dilakukan oleh orang profesional dan tersusun rapi. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, menyatakan bahwa penyerangan Novel merupakan tindakan yang telah disusun secara matang. Hal itu dikarenakan kedua pelaku sudah mengetahui kebiasaan korban untuk melakukan salat Subuh berjamaah. Polda Metro Jaya, selaku pihak

yang berwenang dalam menyelidiki. Penyidik kepolisian telah melakukan beberapa langkah, yaitu memeriksa para 73 saksi, CCTV di lapangan, dan meminta informasi tambahan korban. Guna mempercepat pengungkapan kasus, Polri juga bekerja sama dengan kepolisian Australia. Bentuk kerjasama tersebut yaitu mengidentifikasi CCTV yang merekam terduga pelaku penyerangan Novel Baswedan. Hasil identifikasi CCTV, Polri merilis tiga sketsa wajah terduga pelaku. Akan tetapi, upaya tersebut belum menunjukkan titik terang karena terduga pelaku yang ditangkap memiliki alibi.

Proses penyelidikan peneroran air keras terhadap Novel Baswedan telah dimulai sejak tanggal 11 April 2017. Penyidik kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mengungkap pelaku dan motif penyerangan. Pelaku dan motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut belum terungkap hingga saat penelitian ini dilakukan. Terhitung sejak peristiwa penyerangan terjadi, sudah 2 tahun lebih hingga awal 2019 kasus tersebut belum terselesaikan. Tenggang waktu yang dirasa cukup lama untuk sebuah pengungkapan kasus tindak pidana, memunculkan banyak asumsi di publik. Publik mulai dihadapkan dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang dapat berpotensi untuk meragukan kinerja kepolisian. Asumsi yang meragukan kinerja kepolisian datang dari beberapa pihak, diantaranya dari Novel Baswedan (korban), KPK, dan ICW. Beberapa pihak tersebut memberikan pernyataan yang bisa diindikasikan bentuk keraguan terhadap kinerja kepolisian.

Pemberitaan kasus serangan terhadap Novel memunculkan berbagai asumsi di publik. Asumsi-asumsi tersebut muncul dikarenakan turunnya rasa

kepercayaan berupa keraguan terhadap instansi kepolisian. Keraguan terselesaikannya kasus penyerangan terhadap Novel dikarenakan belum terselesaikan kasus itu. Keadaan lain yang berpotensi menjadi penyebab keraguan terhadap Polri karena kasus yang menimpa Novel melibatkan dua instansi besar, yaitu Polri dan KPK. Kedua instansi tersebut memiliki riwayat kasus hukum yang melibatkan keduanya. Pernyataan yang mengandung asumsi keraguan tersebut termuat di portal berita online seperti *kompas.com*, *detik.com*, dan *suara.com*.

Kontribusi media massa dalam penyebaran informasi terbaru mengenai investigasi kasus Novel Baswean sangatlah besar. Media massa menjadi perantara terdepan agar publik mengetahui informasi terbaru terkait, terutama media massa *online*. Hal itu dikarenakan jumlah pembaca media *cyber (online)* mengalami peningkatan sejak 2017. Fakta tersebut berdasarkan hasil survei Nielsen Consumer & Media View yang mengutarakan bahwa data survei hingga triwulan terakhir 2017 menunjukkan sebanyak 6 juta orang sebagai pembaca media *online*. Angka tersebut lebih besar daripada pembaca media cetak yang hanya berjumlah 4,5 juta orang. Media massa *online* Indonesia yang memberikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel diantaranya *kompas.com*, *detik.com*, *tempo.co*, *viva.co.id*, *okezone.com*, *suara.com*, dan *tribunnews.com*. Pemberitaan penyerangan terhadap Novel juga diliput oleh media internasional yakni *time* pada edisi 13 Juni 2017. Perkembangan investigasi kasus teror Novel bisa diakses dengan cepat dan mudah melalui media massa berbasis *online*.

Media massa *online* menjadi sarana komunikasi tidak langsung antar satu pihak kepada pihak lain. Respon atau kritikan sekelompok orang atau pihak

tertentu terhadap perkembangan kasus peyerangan air keras kepada Novel Baswedan menjadi salah satu topik pemberitaan. Pemberitaan penyiraman air keras yang melukai mata Novel Baswedan memberikan dampak yang berbeda-beda bagi publik dan pihak tertentu. Perbedaan penerimaan publik terhadap teks berita disebabkan oleh bagaimana sudut pandang peristiwa tersebut diberitakan dan bagaimana peristiwa itu diproduksi menjadi sebuah teks berita. Tidak hanya itu, perbedaan juga disebabkan oleh pilihan bahasa yang digunakan oleh narasumber dalam memberikan pernyataan.

Pemilihan kata dalam pernyataan langsung kepolisian dan pihak-pihak lain dalam wawancara dengan media dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Realita tersebut muncul dalam proses pengungkapan pelaku dan motif penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Di media massa, ada beberapa pemberitaan yang berisikan keraguan terhadap kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Asumsi yang berisi keraguan itu muncul dikarenakan kondisi belum terungkapnya pelaku dan motif peyerangan terhadap Novel hingga menjelang 2 tahun pasca peristiwa. Keraguan yang muncul di publik juga mengakibatkan adanya usulan untuk membentuk tim lain, selain pihak kepolisian, guna menyelesaikan kasus ini. Tim gabungan pencari fakta dirasa mampu mengungkap motif dan pelaku peneroran air keras yang melukai Novel Baswedan. Pendapat itu dilontarkan oleh beberapa pihak, diantara Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan pihak korban Novel Baswedan. Stigma negatif yang beredar dalam pemberitaan membuat pihak kepolisian memberikan respon. Respon yang

diberikan oleh pihak kepolisian dapat memberikan dampak yang berbeda bagi pihak tertentu dan publik. Respon yang diberikan oleh kepolisian mengenai asumsi di publik memiliki tujuan yang hendak dicapai. Hal-hal yang ingin dicapai tersebut dibungkus melalui penggunaan bahasa dan peran media dalam menyebarkan informasi.

Pernyataan-pernyataan langsung kepolisian mengenai proses penyidikan kasus penyiraman Novel Baswedan menjadi fokus penelitian. Tindak wacana Polri mengenai kasus penyerangan air keras Novel Baswedan dilatarbelakangi berbagai hal yang telah dijabarkan di atas menjadi objek interpretasi. Tindak wacana tersebut dapat merepresentasikan kinerja kepolisian dalam menangani kasus penyerangan kepada Novel. Hasil interpretasi terhadap representasi kinerja kepolisian tersebut dapat berdampak pada instansi kepolisian di dalam struktur sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Bagaimana representasi kinerja Polri mengenai investigasi kasus teror air keras Novel Baswedan dalam pemberitaan media massa *online* di Indonesia?
2. Bagaimana interpretasi terhadap tindak wacana Polri tentang kasus penyerangan air keras Novel Baswedan di media massa *online*?

3. Bagaimana pengaruh representasi kinerja Polri dalam pernyataan langsung di pemberitaan portal berita online terhadap struktur sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian selaras dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian, sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan hasil representasi kinerja Polri mengenai pemberitaan kasus teror air keras Novel Baswedan dalam media massa *online* di Indonesia.
2. Menjabarkan interpretasi tindak wacana Polri yang berkaitan dengan penyerangan air keras kepada Novel Baswedan di media massa *online*.
3. Mengetahui pengaruh tindak wacana Polri terhadap struktur sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dalam menambah khasanah kajian linguistik, terutama mengenai analisis wacana kritis dan sistemik fungsional linguistik. Penelitian ini juga akan memanfaatkan data yang bersumber dari berita di media massa *online*.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini yaitu bagi peneliti bahasa bisa menjadi sumber referensi untuk penelitian analisis wacana kritis dan sistemik fungsional linguistik untuk merepresentasikan suatu hal. Penelitian ini bisa

menjadi salah satu referensi untuk mengkritisi sebuah wacana di media massa atau sumber lain.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Peristiwa teror air keras yang melukai mata kiri Novel Baswedan terjadi pada tanggal 11 April 2017. Kasus penyerangan terhadap Novel ditangani oleh Polda Metro Jaya dan dipantau langsung oleh Mabes Polri. Investigasi penyerangan terhadap Novel memerlukan waktu yang lama, terbukti hingga akhir 2018 kasus tersebut belum terungkap. Banyak hal yang menjadi kendala dalam proses investigasi sehingga membutuhkan waktu lama. Lamanya penyelidikan kasus tersebut memunculkan berbagai asumsi mengenai keseriusan Polri investigasi. Asumsi negatif yang muncul datang dari berbagai pihak, seperti korban (Novel Baswedan), anggota wadah pegawai KPK, mantan penyidik KPK, dan LSM. Pendapat yang berisi keraguan terhadap Polri menyebabkan adanya respon yang diberikan oleh Polri. Bentuk respon Polri mengenai asumsi keraguan terhadap kinerja Polri dimuat oleh beberapa media massa online. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah wacana yang diutarakan oleh kepolisian tentang kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Pernyataan tersebut yang termuat di portal berita *online* dengan rentang waktu terbit 11 April 2017 s.d Desember 2018.

1.6 Definisi Operasional

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:.

Analisis wacana kritis

Fairclough (1989) mendeskripsikan bahwa wacana merupakan sebuah bentuk praktik sosial dan terbagi ke dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi yang penting dalam analisis wacana yaitu *text*, *discourse practice*, dan *sosial practice*. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis model Fairclough melibatkan tiga komponen yang saling berhubungan tersebut untuk mengungkap ‘hal’ dibalik penggunaan wacana. Tahapan analisis wacana kritis Fairclough terbagi menjadi tiga, yaitu deksripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

Linguistik Sistemik Fungsional

Linguistik Sistemik Fungsional (Halliday, 2004) adalah ilmu kebahasaan yang prakarsai oleh Halliday. LSF merupakan ilmu yang digunakan untuk mengkaji bahasa berdasarkan situasi yang menyertai penggunaan bahasa tersebut. Sistemik Fungsional berkaitan dengan metafungsi bahasa, yaitu makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual.

Portal berita online

Portal web merupakan situs web yang didesain untuk bisa diakses melalui berbagai perangkat yaitu komputer pribadi, komputer jinjing, *personal digital assistan*, dan telepon genggam.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi ke dalam lima bab. Kelima bab yang terdapat di dalam tesis, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Penjelasan mengenai bab-bab tersebut, berikut ini.

Bab satu berisi tentang pemaparan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan laporan tesis.

Bab dua, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi berjumlah sepuluh. Dan juga, peneliti menjabarkan teori yang digunakan dalam penelitiannya yaitu analisis wacana kritis Fairclough (1989) dan Linguistik Sistemik Fungsional Halliday.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang berisi tentang menjabarkan jenis penelitian, data yang digunakan, sumber data, teknik simak bebas libat cakap, metode *inferen abductive*, dan teknik penyajian data.

Bab empat, hasil dan pembahasan memaparkan temuan penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan dari penelitian dengan menerapkan tahapan analisis wacana kritis model Fairclough (1989). Analisis juga dilakukan dengan menggunakan alat trasitivitas Halliday.

Bab lima yakni penutup, peneliti mendeskripsikan simpulan dari temuan hasil penelitian dan memberikan saran guna penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian ilmiah memerlukan referensi penelitian terdahulu guna mengetahui kebaruan permasalahan yang dikaji. Referensi penelitian terdahulu yang digunakan memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian permasalahan. Akan tetapi, penelitian terdahulu juga digunakan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai kajian pustaka diantaranya berikut ini.

Pertama, Gowhary, *et al.* (2015) menggunakan analisis wacana kritis Fairclough untuk mengkaji pidato kampanye calon presiden Iran di Pilpres 2013. Kedua kandidat menggunakan sudut pandang yang berbeda untuk menyampaikan gagasannya. Perbedaan ideologi dan sudut pandang mempengaruhi cara penyampaian. Qalibaf tidak menunjukkan keputusan secara tegas untuk mengubah kebijakan dan ketegangan luar negeri. Kandidat Ruhani menunjukkan sikap melawan terhadap tekanan dan kebijakan luar negeri dalam pidatonya, sedangkan Qalibaf dan partainya mengendalikan tekanan tersebut. Penelitian Gowhary, *et al.* (2015) memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu model analisis wacana kritis Fairclough. Tahapan analisis wacana kritis Fairclough ada 3 yaitu deksripsi, interpretasi, dan ekspalanasi. Ketiga tahapan tersebut diterapkan di dalam penelitian ini. Akan tetapi, wacana yang dikaji memiliki perbedaan dari segi partisipan dan konteksnya.

Kedua, Sharififat dan Elahe (2016) mengkaji pidato Barack Obama dan Hassan Rouhani di dalam pertemuan PBB 2013. *Critical discourse analysis* dan teori sistemik fungsional linguistik Halliday digunakan untuk melihat bagaimana Obama dan Hassan Rouhai membangun kekuatan dan ideologi lewat pidatonya. Hasil kajian menunjukkan pertama, Obama cenderung menggunakan pilihan kata bahasa sehari-hari dan kalimat yang pendek serta mudah dipahami oleh pendengar. Tetapi, Rouhani lebih cenderung menggunakan istilah-istilah yang rumit dan pilihan bahasa formal. Kedua, berdasarkan analisis transitiviti ditemukan bahwa kedua pidato politik kedua presiden didominasi penggunaan aspek proses material daripada proses lain. Di dalam pidato kedua presiden ditunjukkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terdahulu dan kebijakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Ketiga, berdasarkan bentuk modalitas di dalam teks pidato politik ditemukan penggunaan kata ganti *we* dengan jumlah terbanyak dibanding kata ganti lain. Fakta itu menunjukkan bahwa kedua presiden mencoba menghapus jarak antara dirinya dan pendengar. Penggunaan kata ganti tersebut dapat memberikan efek bagi pendengar yaitu keberpihakan mereka terhadap kebijakan dan pemikiran yang disampaikan kedua presiden.

Ketiga, Aisyah (2016) menggunakan teori transitivitas Halliday untuk melihat fakta sosial yang direpresentasikan dalam pidato politik Anis Matta di acara konsolidasi PKS tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan, penggunaan klausa-klausa dalam pidato sebagai alat membentuk citra positif untuk Anis

Matta dan PKS. Terdapat juga beberapa motif yang menguntungkan bagi citra PKS di masyarakat.

Keempat, Setiawan (2016) melakukan kajian transitivitas untuk mengetahui cara media *Lombok Post* memberitakan kasus kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil valid berupa deskripsi realitas pemberitaan kekerasan gender dalam *Lombok Post*. Dan juga, untuk mengetahui pola persentase transitivitas dalam pemberitaan kekerasan seksual di *Lombok Post*. Hasil kajian menunjukkan bahwa, 1) penulisan teks dilakukan secara faktual melalui tindakan partisipan yang direpresentasikan oleh proses mental 43, 79%. 2) pemberitaan teks dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat keterlibatan partisipan perempuan yang direpresentasikan oleh proses material 54,5%. 3) jurnalis mengutamakan fakta peristiwa dalam berbagai konteks sosial yang melatarbelakangi peristiwa tersebut yang direpresentasikan proses material sebesar 37,5%. 4) jurnalis memberitakan berita dengan menekankan pada aspek pengakuan pelaku yang didasari motif berbeda-beda. Hal itu direpresentasikan proses verbal 42,85%. 5) jurnalis melakukan penulisan berita dengan mendeskripsikan keterlibatan partisipan dan menjelaskan detail kasus berdasarkan lokasi kejadian. Hal itu direpresentasikan oleh proses material 60%. Berdasarkan analisis transitivitas, keseluruhan teks pemberitaan kekerasan seksual *Lombok Post* menunjukkan bahwa proses material dengan sirkumstan lokasi dan cara mendominasi. Temuan lain yaitu partisipan perempuan cenderung sering menempati posisi korban sedangkan laki-laki

sebagai pelaku tindakan. Hal itu memperkuat hipotesis bahwa dalam kasus kekerasan seksual perempuan lebih sering menjadi korban daripada pelaku.

Kelima, Rukmana (2016) meneliti ideologi yang tersirat dalam tindak wacana Obama dalam pidatonya di konferensi perubahan iklim. Analisis teks dengan transitivitas menunjukkan adanya penggunaan klausa-klausa yang terklasifikasi dalam bentuk proses material dan proses verbal. Penggunaan proses material menunjukkan bahwa Amerika melakukan suatu tindakan nyata yang mendukung pencegahan perubahan iklim. Bentuk transitivitas lain adalah proses verbal. Klausa yang menunjukkan proses verbal menggunakan *we* sebagai *sayer*. Hal itu menunjukkan bahwa Amerika bertekad untuk mencegah dan mengurangi faktor yang menyebabkan *global warming*. Selain transitivitas dalam analisis teks ditemukan juga adanya penggunaan klausa imperatif yang menggambarkan makna interpersonal (*mood*). Penggunaan kluasa imperatif menunjukkan Obama ingin seluruh delegasi peserta konferensi dan dirinya melakukan tindakan yang diutaran dalam pidatonya.

Keenam, Sinaga *et al.* (2016) mengkaji tindak wacana Presiden Jokowi dalam pembukaan APEC CEO 2014. Hasil analisis teks dengan transitivitas menunjukkan bahwa proses material, proses atributif relasional, dan proses verbal digunakan untuk merepresentasikan identitas dan ideologi Jokowi.. Proses material digunakan untuk menggambarkan kebijakan yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil temuan aspek transitivitas dalam pidato Jokowi merepresentasikan identitasnya sebagai presiden, pengusaha, dan *problem-solver*. Ideologi yang terdapat dalam pidato pembukaan APEC itu ialah

blusukan dan Pancasila. *Blusukan* merepresentasikan cara presiden Jokowi dalam mengobservasi rancangan kebijakan yang telah diterapkan di masyarakat.

Ketujuh, Sari (2017) menulis penelitian tentang pemberitaan Tempo dalam mewartakan kampanye Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Berdasarkan transistivitas ditemukan bagaimana dunia sosial direpresetasikan Tempo dalam memberitakan kegiatan kampanye Ahok. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa media Tempo menyebarkan prespektif positif sosok Ahok. Hal itu terbukti lewat wacana berita yang dihasilkan oleh Tempo terkait Ahok sebagai kandidat Gubernur Jakarta yang diusung oleh partai PDI Perjuangan. *Tempo* dengan properti linguistik menampilkan prespektif positif Ahok karena terdapat kesamaan ideologi dan pandangan politik keduanya. Media *Tempo* memilih jenis pemberitaan dan narasumber yang dapat memberikan citra positif mengenai kampanye Ahok.

Kedelapan, Wijanarko (2017) mengkaji representasi kaum Muslim Syariah dalam pidato Donald Trump. Hasil dari analisis teks untuk melihat representasi kaum muslim syariah teridentifikasi bahwa proses relasional mendominasi sebesar 40%. Proses relasional digunakan untuk membangun identitas kaum Muslim Syariah. Klausa-klausa yang terkategori dalam proses mental memiliki persentasi 33,3%. Trump menggunakan proses mental guna meyakinkan masyarakat Amerika bahwa kaum Muslim Syariah memiliki tujuan yang merugikan bangsa Amerika seperti keinginan membunuh, mengebom, dan menghancurkan negara Amerika. Proses material yang terdapat dalam pidato Trump sebesar 16,7%. Hal itu untuk merepresentasikan bentuk tindakan kaum

Muslim Syariah. Proses eksistensial memiliki persentase sebesar 10% untuk kembali meyakinkan masyarakat Amerika bahwa ada kemarahan kaum Muslim Syariah terhadap Amerika. Selain itu, Trump menggunakan kata ganti *they* (mereka) untuk menunjukkan bahwa kaum Muslim Syariah bukan bagian warga Amerika. Sirkumstan yang terdapat di pidato Donald Trump yaitu sirkumstan lokasi, cara, peran, sebab, dan sudut pandang.

Kesembilan, Zhang (2017) tentang penerapan teori transitivitas Halliday dalam debat calon presiden AS, Hillary Clinton dan Donald Trump. Hasil kajian menunjukkan dalam wacana Hillary ditemukan proses material mendominasi sebesar 37,66%. Proses mental sebesar 8,57%, diikuti proses relasional 24,68%, proses verbal 5,19%, proses eksistensial 2,6%, dan proses behavioural 1,3%. Dan dalam wacana Trump memiliki 59 klausa dengan proses material mendominasi sebesar 35,6% dan diikuti oleh proses relasional sebesar 18,8%. Proses eksistensial 15,58%, proses mental sebesar 12,99%, proses verba 11,69%, dan proses behavioural sebesar 6,49%. Dari data persentas ditemukan fakta bahwa klausa dengan proses material, relasional, dan mental lebih sering digunakan.

Teori transitivitas yang ada dalam penelitian Zhang (2017) menjadi persamaan dalam penelitian representasi kinerja kepolisian dalam mengusut kasus teror Novel. Akan tetapi, penelitian tindak wacana kepolisian ini dipadukan dengan pandangan analisis wacana kritis untuk mengetahui bentuk *sosial wrong* dan dampaknya terhadap MR di masyarakat.

Kesepuluh, Handayani *et al.* (2018) mengkaji ujaran Presiden AS, Donald Trump, terkait Jerussalem sebagai ibu kota Israel. Pilihan kosakata, *voice*, *mood*, dan transitivitas sebagai sarana untuk menyampaikan ideologi politiknya. Pilihan kosakata yang digunakan untuk penguatan bahwa Jerussalem seharusnya menjadi ibu kota Israel dan itu legal. Trump juga memberikan penilaian positif terhadap daerah dan masyarakat Timur Tengah.

Berdasarkan referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa teori transitivitas dapat digunakan untuk merepresentasikan suatu tindak wacana. Teori transitivitas digunakan untuk mengidentifikasi klausa-klausa teks guna menemukan maksud dari penggunaan kosakata tersebut. Transitivitas terbagi menjadi partisipan, proses, dan sirkumstan. Penggunaan teori transitivitas adalah salah satu kesamaan referensi penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Teori transtivitas digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Polri merepresentasikan kinerja penyidik kepolisian dalam mengusut kasus teror air keras Novel Baswedan.

Penelitian mengenai representasi Polri tentang kinerja penyidik kepolisian merupakan penelitian analisis wacana kritis. Tinjauan pustaka yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kesesuaian tersebut terletak pada persamaan teori yang digunakan yaitu transitivitas Halliday dan model analisis wacana kritis Fairclough. Akan tetapi, penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasari dilakukannya sebuah kajian. Perbedaan itu terdapat di data penelitian sehingga menghasilkan permasalahan penelitian yang berbeda. Penelitian ini mengambil isu penyerangan air keras yang menimpa penyidik KPK

Novel Baswedan. Penyerangan itu terjadi pada 11 April 2017 dan sampai sekarang kasus tersebut belum terselesaikan. Pemberitaan kasus tersebut ramai diberitakan oleh media massa di Indonesia. Penyelidikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel melibatkan dua instansi besar yaitu Polri dan KPK. Penelitian ini mengambil sudut pandang permasalahan dari segi kepolisian yang bertanggung jawab terhadap penyidikan kasus tidak kriminal tersebut. Data penelitian yang digunakan adalah pernyataan-pernyataan langsung pihak kepolisian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui cara Polri merepresentasikan kinerja timnya pada saat beberapa pihak mempertanyakan keseriusan Polri dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa tinjauan pustaka yang telah dijabarkan. Perbedaan yang paling utama adalah data penelitian sehingga membedakan fokus utama permasalahan. Penelitian ini menggunakan data berupa pernyataan kepolisian yang diberitakan dalam portal berita *online*. Portal berita *online* yang digunakan sebagai sumber data penelitian meliputi *kompas.com*, *tempo.co*, *detik.com*, dan *okezone.com*.

Perbedaan lainnya juga terdapat pada rumusan permasalahan yang dikaji. Permasalahan penelitian ini yakni mengenai representasi kinerja Polri dalam proses investigasi kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Hal yang dicapai dari topik permasalahan yakni mengetahui bentuk representasi dari kinerja kepolisian dalam menangani kasus Novel Baswedan yang belum terungkap, untuk mengetahui relasi kuasa yang dibangun oleh Polri dalam tindak wacana yang

mereka lakukan dan dampak dari tindak wacana tersebut terhadap struktur sosial di masyarakat. Permasalahan-permasalahan tersebut dikaji didasari adanya pro-kontra mengenai proses penyidikan dan penyelidikan kasus teror air keras kepada Novel Baswedan. Terdapat beberapa pihak yang menyangsikan kepolisian dapat mengungkap tersangka kasus tersebut. Pernyataan dari pihak tertentu yang mengarah kepada keraguan terhadap pihak kepolisian itu dimuat di media massa. Realita tersebut menimbulkan respon dari pihak kepolisian yang juga diberitakan oleh media massa. Respon yang diberikan oleh kepolisian tersebut menjadi objek kajian dalam penelitian itu. Objek penelitian yakni tindak wacana Polri dapat mengungkapkan jawaban dari permasalahan – permasalahan yang dikaji penelitian ini. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pembeda yang mendasari dilakukannya kajian analisis wacana kritis dengan menggunakan data pernyataan langsung kepolisian terkait kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*) merupakan salah satu pendekatan yang tergolong baru dalam bidang ilmu linguistik dan ilmu sosial lain. Pendekatan analisis wacana kritis mulai muncul untuk membongkar ideologi dalam penggunaan bahasa yang tidak dapat dikaji oleh pendekatan kontekstual pragmatik dalam ilmu linguistik.

Darma (2006:49) menyatakan di dalam sebuah wacana, proses pengembangan sebuah komunikasi menggunakan simbol-simbol interpretasi dan peristiwa yang terjadi di masyarakat luas. Dengan menggunakan pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi yang ingin disampaikan ditentukan oleh orang yang menggunakannya. Nilai-nilai, ideologi, emosi, pendapat publik, kepentingan-kepentingan dan lain sebagainya dikendalikan oleh orang yang membuat wacana melalui wacana. Oleh karena itu, dalam pemahaman ini wacana tidak akan dipahami hanya sekadar objek studi bahasa, karena dalam kajian analisis wacana kritis yang menjadi pertimbangan adalah teks dan konteks dari wacana tersebut.

Fairclough menjelaskan bahwa hubungan antara wacana dan struktur sosial bukanlah bentuk hubungan satu arah. Wacana ditentukan oleh struktur sosial dan juga mempengaruhi struktur sosial tersebut. Dan juga wacana ikut berkontribusi dalam perubahan struktur sosial tersebut. Wacana berperan penting dalam sebuah kekuasaan dan usaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara mengontrol wacana oleh pihak berkepentingan dimana kekuatan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, dialektika wacana dan struktur sosial saling mempengaruhi satu sama lain (Fairclough, 2001:30).

Analisis wacana kritis adalah proses penguraian dan pendeskripsian sebuah teks atau realitas sosial yang digunakan oleh suatu kelompok atau perorangan untuk melaksanakan tujuan tertentu. Dalam sebuah teks wacana terdapat makna dan citra yang ingin disampaikan oleh penulis karena disebabkan

beberapa faktor. Jadi, analisis wacana kritis digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan maksud yang tersembunyi di dalam teks (Darma, 2006: 49).

Ada beberapa teori dan metode yang digunakan dalam analisis wacana kritis untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan antara wacana dengan perkembangan sosial serta budaya dalam domain yang berbeda-beda. Model analisis wacana kritis yang dibuat oleh Fairclough berkontribusi dalam analisis sosial dan budaya. Hal itu dikarenakan model Fairclough memadukan secara bersamaan analisis wacana berdasarkan aspek linguistik dan pemikiran sosial politik (Eriyanto, 2001:285).

Jorgensen dan Loisse J Philips (2002: 65-66), menyatakan bahwa pendekatan Fairclough berorientasi pada teks yang berusaha untuk menyatukan tiga komponen, yakni:

- a. Analisis tekstual terperinci dalam bidang linguistik yang termasuk di dalamnya tata bahasa fungsional Halliday.
- b. Analisis makro- sosiologis praktik sosial.
- c. Tradisi interpretatif dan mikro – sosiologis dalam sosiologi dimana kehidupan sehari-hari diperlakukan sebagai hasil tindakan orang-orang. Dimana tindakan tersebut mengikuti prosedur dan kaidah “akal sehat”.

Fairclough membuat suatu model analisis wacana yang mendasarkan pada analisis wacana berdasarkan linguistik, pemahaman sosial dan politik, dan perubahan sosial secara umum. model kajian analisis wacana kritis Fairclough difokuskan pada bahasa. Pemakaian bahasa dalam suatu wacana dipandang

sebagai praktik sosial. Dimana diartikan bahwa bahasa tidak hanya dipandang sebagai wujud aktifitas individu untuk menggambarkan sesuatu. Akan tetapi, bahasa juga dipandang sebagai bentuk tindakan yang muncul akibat pengaruh struktur sosial (relasi sosial dan konteks sosial tertentu). Oleh sebab itu, model analisis wacana yang dicetuskan Fairclough difokuskan kepada bagaimana bahasa dalam suatu wacana terbentuk dan dibentuk dari relasi dan konteks sosial tertentu (Fairclough, 1995: 131).

Kajian Fairclough dipusatkan pada bahasa yang menunjukkan pemakaian bahasa sebagai praktik sosial. Bahasa yang mengandung implikasi. Pertama, wacana merupakan bentuk dari suatu tindakan, dimana seseorang menggunakan bahasa sebagai wujud tindakan dan wujud representasi terhadap dunia realita. Pernyataan ini menolak pandangan bahwa bahasa sebagai bentuk individu. Kedua, analisis wacana kritis model Fairclough mengimplikasikan adanya keterkaitan berupa berupa hubungan timbal balik antara wacana dan struktur sosial (Darma, 2006:89).

Fairclough mendasarkan gagasan bahwa bahasa itu menyusun dan terstruktur secara sosial, pada teori linguistik fungsional-sistemik Halliday (1978), yakni fungsi ideasional (*ideational*), interpersonal (*interpersonal*), dan tekstual (*textual*). Fungsi ideasional, merujuk pada referensi tertentu berupa peristiwa atau seseorang yang mengandung muatan ideologi tertentu yang ingin diperlihatkan di dalam teks. Fungsi interpersonal, memperlihatkan bagaimana interaksi sosial antara penulis, pembaca, dan orang ketiga di dalam teks, apakah disampaikan

secara informal atau formal. Dan, fungsi tekstual bahasa mengkaji bagaimana penulis menggabungkan berita yang diterima menjadi sebuah teks.

Fairclough (1995:97), membagi analisis wacana kritis kedalam tiga dimensi, yaitu (1) Teks (*Teks*), (2) praktik wacana (*Discourse practice*), dan (3) praktik sosiokultural (*sociocultural practice*). Metode dalam menganalisis wacana menggunakan *description* terhadap teks, *interpretation* yang merupakan hubungan antara proses produksi dan interpretasi wacana dan teks, *explanation* yaitu hubungan antara proses wacana dan proses sosial.

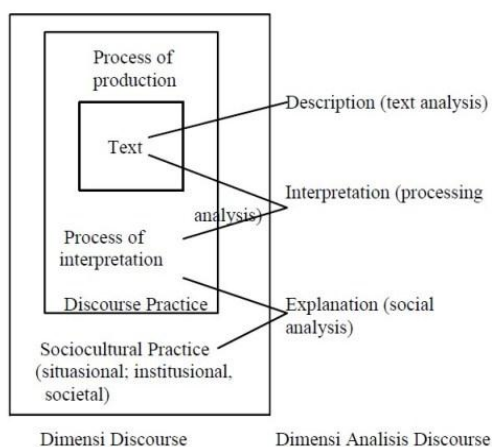
Pertama, dalam analisis wacana Fairclough, teks dianalisis secara linguistik dengan melihat kosakata, semantik, tata kalimat, koherensi, dan kohesi. Analisis linguistik dilakukan dengan melihat tiga unsur dalam teks, meliputi representasi, relasi, dan identitas.

Kedua, dimensi kedua yaitu praktik wacana (*discourse practice*), merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Fokus pada bagian praktik wacana yaitu memperjelas hubungan antara cara yang digunakan untuk memproduksi teks (normatif, inovatif, dll) yang terdapat di dalam teks dan diinterpretasikan, bagaimana teks tersebut diproduksi, disebarluaskan dan dikonsumsi secara luas (Fairclough, 2006: 72).

Ketiga, dimensi praktik sosiokultural (*sociocultural practice*) merupakan sebuah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks di sini dapat berupa praktik dari institusi pembuat teks, yang meliputi media yang dipengaruhi oleh masyarakat, budaya, atau politik tertentu (Fairclough, 1995:98).

Ketiga dimensi yang telah diruaikan saling berkaitan satu sama lain dalam melakukan analisis sebuah teks.

Fairclough (1995:97-98) mengilustrasikan analisis wacana kritis menggunakan tiga dimensi ke dalam bagan di bawah ini.



Gambar 1. Bagan dimensi analisis wacana kritis Fairclough

Teks yang bersifat heterogen dan kontradiksi menjadi fokus dalam kajian analisis wacana kritis Fairclough. Di dalam teks dilakukan pendeskripsian tentang teks yang berisi apa isi dari teks tersebut. Dilanjutkan dengan melakukan interpretasi yang berupa analisis produksi atau bagaimana teks tersebut dibuat. Dan, yang terakhir adalah penafsiran dari teks tersebut. Dalam proses penafsiran memperhitungkan faktor hubungan antar teks dan faktor sosial di luar teks.

Pernyataan langsung yang diucapkan oleh pihak kepolisian merupakan bentuk dari hasil produksi wacana. Wacana pernyataan langsung Polri mengenai penanganan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan terbentuk dari fitur-fitur kebahasaan yang beragam. Teks wacana tersebut harus dideskripsikan agar dapat

diinterpretasikan. Interpretasi teks wacana Polri bertujuan untuk mengungkap ‘hal’ dibalik penggunaan bahasa tersebut. Teks wacana yang telah diinterpretasikan harus melalui tahapan akhir yaitu eksplanasi. Eksplanasi tindak wacana Polri bertujuan untuk menjelaskan interpretasi teks dengan konteks sosiokultural. Konteks sosiokultural yang melingkupi berupa konteks sosial, institusional, dan situasional.

2.2.2 Tahapan Analisis Wacana Kritis Fairclough

Tahapan dalam menganalisis sebuah teks dalam analisis wacana kritis terbagi menjadi tiga yaitu, deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Fairclough, 2006:107). Penjelasan dari tahapan dalam analisis teks dalam penelitian wacana kritis dijabarkan berikut ini.

2.2.2.1 Tahap Deskripsi

Tahapan deskripsi berisi mengenai bagaimana suatu individu, kelompok, atau peristiwa digambarkan di dalam sebuah teks. Di dalam tahapan deskripsi teks peneliti mengkaji pilihan kata dan tata bahasa yang digunakan oleh Polri dalam tindak wacana persoalan penanganan kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Analisis pilihan kata dan tata bahasa digunakan untuk mengetahui representasi kinerja instansi kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Proses analisis tindak wacana Polri menggunakan alat leksikogramatikal berupa transitivitas. Transitivitas mencakup tiga hal, yaitu jenis proses, partisipan, dan sirkumstan.

Transitivitas adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menfasirkan pengalaman yang ada di dalam rangkaian tipe proses. Pengalaman yang dimaksud dibedakan menjadi pengalaman pengalaman luar dan pengalaman dalam. Pengalaman luar adalah suatu hal yang berhubungan dengan dunia luar atau di luar batin manusia. Bentuk pengalaman luar berkaitan dengan aksi dan peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh orang di sekitarnya. Hal itu berbeda dengan definisi pengalaman dalam, yang berhubungan dengan dunia batin manusia (Halliday dan Matthiessen, 2004: 170).

Halliday mengatakan, pengalaman luar yang merefleksikan proses dunia eksternal atau dunia luar batin diklasifikasikan ke dalam tipe proses *material*. Pengalaman dalam yang berkaitan dengan dunia batin diklasifikasikan dalam tipe proses *mental*. Selain dua jenis tipe proses tersebut, masih terdapat beberapa tipe proses untuk mengklasifikasikan pengalaman. Halliday (2004: 170) membaginya ke dalam lima tipe proses yang meliputi *material*, *mental*, *relational*, *behavioural*, dan *verbal*.

Suatu unit klausa akan digolongkan menjadi tiga bagian ketika mendiskusikan persoalan fungsi eksperensial pada bahasa. Penggolongan tersebut meliputi partisipan, proses, dan *circumstance*. Gerot dan Wignell (1995: 54), menyebutkan proses merupakan bagian terpenting atau utama dalam analisis transitivitas. Partisipan dan *circumstance* adalah pemegang kendali atas apa yang dilakukan, peristiwa yang terjadi, perasaan, dan makhluk. Penjelasan lebih lanjut mengenai partisipan, proses, dan *circumstance* akan dijabarkan dalam subbab berikut ini:

2.2.2.1.1 Proses Material

Proses material adalah proses dari melakukan suatu tindakan. Proses ini mengekspresikan apa yang dilakukan oleh suatu entitas fisik (Gerot dan Wignell, 1995: 55). Kunci utama dari proses material adalah ketika suatu tindakan itu bisa menjawab pertanyaan ‘apa yang dilakukan oleh X?’ atau ‘apa yang terjadi pada X?’ (Eggins, 1994: 230). Berdasarkan paparan tersebut, suatu klausa atau tata bahasa mengandung proses material jika menggambarkan sebuah tindakan yang dilakukan atau peristiwa apa yang terjadi.

Actor dan *goal* merupakan dua partisipan pokok dalam proses material. *Actor* adalah pelaku yang melakukan suatu tindakan, sedangkan *goal* adalah suatu tindakan yang dikenai oleh pelaku. Wiratno (2018: 92) menyebut dua partisipan *actor* dan *goal* dalam bahasa Indonesia dengan aktor dan sasaran. Proses material ditandai dengan penggunaan verba, seperti mencangkul, memasak, menendng, merokok, menulis, datang, pergi, jatuh, membangun, berlangsung, dan sebagainya. Namun, verba yang sama tersebut dapat juga tergolong masuk jenis proses lain bergantung konteks verba itu digunakan.

Halliday dan Matthiessen (2004: 180) menyebutkan proses material dengan satu partisipan disebut intransitiv. Akan tetapi, ketika di dalam klausa terdiri atas dua atau lebih partisipan disebut transitiv, seperti contoh berikut ini:

[1] *the lion* [partisipan: *actor*] *sprang* [proses : *material*].

Kalimat [1] hanya menggunakan satu partisipan yaitu *the lion*. Kata verbal *sprang* merupakan bentuk proses *material* karena menggambarkan suatu tindakan yang terjadi di luar batin. Kalimat tersebut mengandung satu partisipan sehingga disebut intransitiv.

Klausa yang menggunakan dua partisipan, meliputi *actor* dan *goal* dicontohkan di kalimat berikut ini:

[2] *The lion* [partisipan: *actor*] *caught* [proses : *material*] *the tourist* [partisipan : *goal*].

The lion caught the tourist dapat diterjemahkan menjadi ‘seekor singa menerkam seorang turis’. Kalimat [2] memiliki dua partisipan yaitu *actor* dan *goal* sehingga termasuk ke dalam jenis transitiv. Partisipan *actor* direfleksikan oleh *the lion* sebagai pelaku. Kata *caught* merupakan bentuk dari proses *material* karena menggambarkan tindakan yang dapat ditangkap oleh indra penglihatan. Dan, *the tourist* merupakan bentuk dari partisipan *goal*, untuk menggambarkan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku (Halliday dan Matthiessen, 2004: 181).

2.2.2.1.2 Proses Mental

Proses *material* adalah sebuah klausa yang memfokuskan pada pengalaman terhadap suatu entitas di luar dunia batin. Hal itu berbanding terbalik dengan proses *mental*, yang menggambarkan pengalaman manusia/ sesuatu dari segi sudut pandangnya. Klausa diidentifikasi sebagai proses *mental* jika berhubungan dengan indra perasa (Halliday dan Matthiessen, 2004: 197).

Gerot dan Wignell (1995: 58) menyatakan bahwa, proses mental melibatkan indra perasa, yang berupa proses merasakan, berpikir, dan mempersepsikan suatu hal. Partisipan di dalam proses mental berupa *senser* dan *phenomenon*. Halliday dan Matthiessen (2004: 201) menjelaskan *senser* adalah pelaku yang merasakan, memikirkan, dan mempersepsikan suatu hal. *Phenomenon* adalah apa yang dilihat, dirasakan, diinginkan, atau dipersepsikan oleh *senser*. *Phenomenon* tidak hanya dalam bentuk ‘suatu hal’ tetapi bisa juga sebuah fakta atau tindakan.

Penjelasan Gerot Wignell (1995) dan Halliday dan Matthiessen (2004) mengenai proses mental tersebut juga dikutip oleh Wiratno (2018). Wiratno (2018: 94) mendeskripsikan hal-hal yang termasuk ke dalam proses mental diantaranya proses menerangkan persepsi, afeksi, kognisi, dan keinginan. Di dalam bahasa Indonesia contoh penanda proses mental diantaranya menerangkan persepsi (melihat, mendengar, merasa), afeksi (takut, suka, khawatir), kognisi (berpikir, mengerti, membayangkan), dan keinginan (berharap).

Klausa dengan proses *mental* dapat memiliki partisipan *senser* dan *phenomenon* atau hanya satu partisipan, seperti contoh berikut:

[3] *Mary* [partisipan : *senser*] *liked* [proses : *mental*] *the gift*
[partisipan : *phenomenon*] (Halliday, 2004: 201).

Klausa [3] jika diterjemahkan menjadi ‘Mary suka hadiah’. Bentuk *senser* diwujudkan pada kata *Mary*, sebagai orang yang merasakan proses *mental*. ‘*Liked*’ merupakan bentuk kategori verbal yang menempati posisi proses mental. Hal itu

dikarenakan, *'liked'* merupakan bentuk refleksi dari pengalaman dunia batin manusia yang berhubungan dengan indra perasa. *Phenomenon* dalam kalimat direalisasikan dalam bentuk kata *'the gift'*.

2.2.2.1.3 Proses Verbal

Proses verbal adalah suatu proses yang direalisasikan dalam bentuk tindakan verbal atau berbicara (Eggins, 1994: 251). Di dalam proses verbal terdapat tiga partisipan, yaitu *sayer*, *receiver*, dan *verbiage*. *Sayer* adalah partisipan yang melakukan tindakan verbal dan tidak selalu merujuk pada makhluk hidup. *Receiver* adalah pihak yang dikenai tindakan verbal dan *verbiage* merupakan bentuk yang rujuk dalam tindakan verbal tersebut (Gerot dan Wignell, 1995: 62).

Istilah partisipan *sayer* dan *verbiage* di dalam Bahasa Indonesia disebut dengan perwarta dan diwartakan. Wiratno (2018:101) menjelaskan bahwa proses verbal merupakan proses menunjukkan pemberitahuan atau pewartaan. Bentuk-bentuk verba yang menunjukkan proses verbal diantaranya menyatakan, menanyakan, menawarkan, memerintahkan, memberitahukan, menceritaka, dan mengatakan.

2.2.2.1.4 Proses Behavioral

Halliday dan Matthiessen (2004: 248) menyebutkan proses *behavioral* identik dengan karakteristik manusia. Proses *behavioural* merupakan proses yang berhubungan dengan perilaku psikologis dan *phsyological*, seperti bernapas, tersenyum, bermimpi, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Partisipan dalam proses *behavioral* disebut *behaber*. *Behaver* fungsinya seperi *senser* di dalam

proses mental yaitu pelaku yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan perilaku psikologis dan *psychological*. Pada umumnya klausa dengan proses *behavioural* hanya memiliki satu partisipan yaitu *behave*. Berikut ini contoh klausa dengan satu partisipan:

[4] *she's* [partisipan : *behave*] *laughing* [proses : *behavioural*] (Halliday dan Matthiessen, 2004: 251).

Tuturan [4] jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'dia sedang tertawa'. Partisipan *behave* dalam tuturan tersebut adalah *she's* karena melakukan tindakan yang berhubungan dengan psikologis manusia yaitu *laughing*. Bentuk *behavioural* direalisasikan dengan kata *laughing* yang merefleksikan tindakan psikologis manusia.

2.2.2.1.5 Proses Relational

Halliday dan Matthiessen (2004: 210) menjelaskan bahwa proses relational disebut juga dengan *processes of being and having*. Klausa relational berfungsi untuk mengkararakteristikan dan mengidentifikasi. Di dalam proses relational terdapat tiga jenis konstruksi semantik dari proses relational yaitu *intensive*, *possessive*, dan *circumstantial*. Ketiga konstruksi semantik tersebut yang akan menjadi penentu dalam proses relational.

Klausa *relational* dibedakan menjadi dua, yaitu *attributive processes* dan *identifying processes*. *Attributive processes* atau proses atributif merupakan proses yang menentukan kualitas (Gerot dan Wignell, 1994: 67). Pada proses relational atributif, partisipan disebut *carrier* dan bentuk yang mengikuti proses

disebut *attributive*. *Carrier* diwujudkan dalam bentuk nomina atau frasa nomina. Bentuk *attribute* diwujudkan dalam bentuk ajektiva atau nomina (kata benda). Berikut ini contoh klausa proses relasional atributif:

[5] *Mice* [partisipan: *carrier*] *are* [proses: *relational attribute*] *timid creatures*
[*a tribute*] (Halliday dan Matthiessen, 2004: 219).

Tuturan [5] jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Tikus adalah makhluk pemalu”. Kata “*are*” merupakan bentuk dari proses relasional atributif karena berfungsi sebagai penghubung antar partisipan. Partisipan *carrier* yang direalisasikan dalam bentuk kata *mice*, tidak dapat menerangkan partisipan *attribute* yang berbentuk *timid creatures*. Dapat disimpulkan, proses relasional atributif kedua partisipannya tidak dapat saling menerangkan.

Proses *relational identification* ditandai dengan suatu entitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas lain. Makna klausa proses *relational identification* dapat menjawab bahwa “x bisa diidentifikasi oleh a” (Halliday, 2004: 227). Partisipan utama dalam proses *relational identification* disebut dengan *identified*, sedangkan untuk partisipan lain disebut *identifier*. Klausa disimpulkan mengandung proses *relational identification* jika kedua partisipan, *identifier* dan *identified*, dapat saling menerangkan. Berikut ini contoh klausa yang mengandung proses *relational identification* :

[6] *c-a-t* [partisipan: *identified*] *spells* [proses: *relational identification*] *cat*
[partisipan: *identifier*]

Tuturan [6] merupakan bentuk klausa dengan proses *relational identification*. Tuturan tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “c-a-t adalah ejaan dari *cat*”. Bentuk proses *relational identification* direalisasikan dalam verba *spells* yang menghubungkan *identifies* [c-a-t] dengan *identifier* [*cat*]. Kedua partisipan dalam klausa itu dapat saling menerangkan satu sama lain, karena kedua bentuk partisipan dapat saling mengidentifikasi.

Komponen pendukung lain dalam sistem transitivitas adalah sirkumstan (*circumstance*). Halliday dan Matthiessen (2004:262) mengklasifikasikan sirkumstan menjadi sembilan jenis. Kesembilan jenis sirkumstan tersebut yaitu *extent* (rentang), *location* (lokasi), *manner* (cara), *cause* (sebab), *contingency* (kemungkinan), *accompaniment* (penyerta), *role* (peran), *matter* (masalah), dan *angel* (sudut pandang). Pertama, *Extent* (rentang) berupa sirkumstan yang menandakan sebuah jarak atau durasi waktu dalam proses. Jenis sirkumstan rentang dapat diidentifikasi dengan menguji menggunakan pertanyaan berikut ini, berapa jauh?, berapa banyak?, berapa lama?, dan berapa kali?.

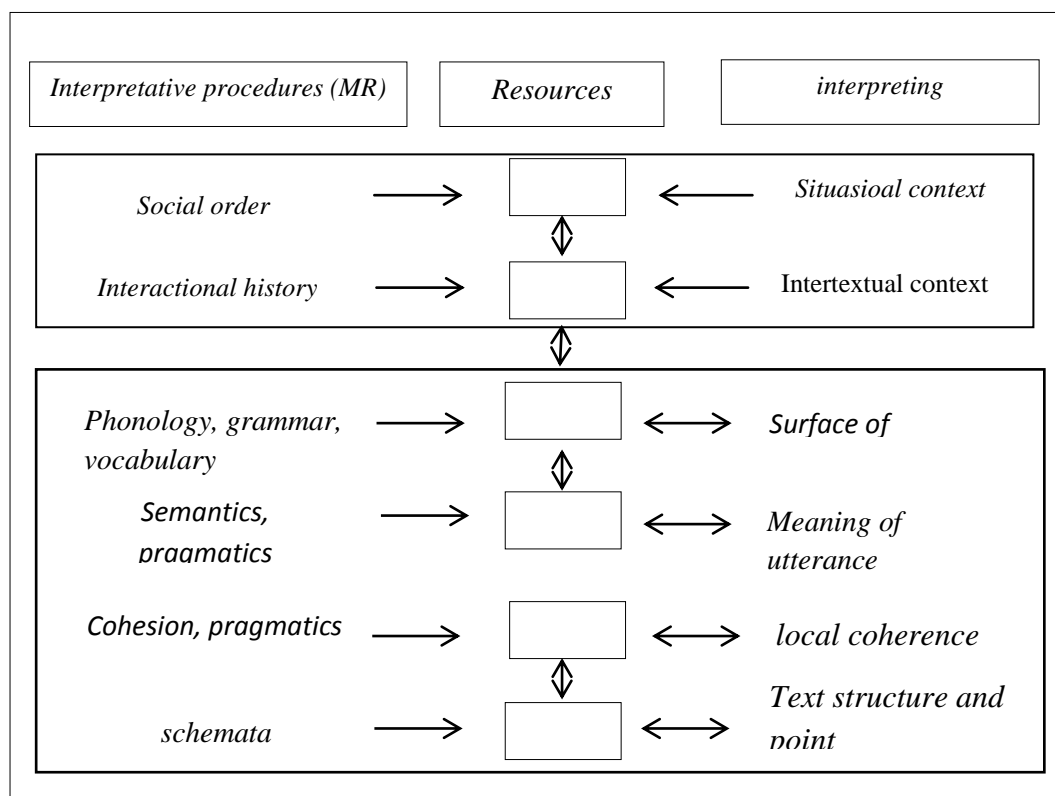
Kedua, sirkumstan lokasi menunjukkan sebuah tempat dan waktu. Keberadaan sirkumstan waktu dapat diuji dengan bentuk pertanyaan kapan dan di mana. Ketiga, sirkumstan *manner* (cara) sebagai penanda bagaimana suatu proses tersebut dilakukan. Sirkumstan cara dapat diidentifikasi dengan pertanyaan bagaimana. Keempat, sirkumstan *cause* (sebab) menjadi penanda mengapa proses tersebut bisa terjadi. Sirkumstan sebab dapat diuji dengan pertanyaan mengapa, untuk apa, dan untuk siapa. Kelima, sirkumstan *ocontingency*

(kemungkinan) untuk menunjukkan elemen ketergantungan dari sebuah proses yang telah atau akan dilakukan. Keenam, sirkumstan *accompaniment* (penyerta) sering muncul dengan ditandai oleh kata-kata dengan (*with*), tanpa (*without*), selain (*besides*), dan daripada (*instead of*).

Ketujuh, sirkumstan peran (*role*) sering muncul dengan penanda kata sebagian (*as*), dalam bentuk (*in the form of*), dan menjadi (*into*). Kedelapan, sirkumstan masalah (*matter*) berhubungan dengan proses verbal. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji keberadaan sirkumstan masalah, yaitu tentang apa?. Kesembilan, sirkumstan sudut pandang (*angle*) keberadaannya dapat ditandai dengan frasa menurut pendapat dan kata menurut (Halliday dan Matthiessen, 2004: 262).

2.2.2.2 Tahap Interpretasi

Tahapan kedua dalam analisis wacana kritis Fairclough yaitu bagian interpretasi. Fairclough (2006: 142) menjelaskan bahwa interpretasi dilakukan dengan cara mengkombinasikan informasi yang terdapat di dalam teks dan apa yang diketahui “di dalam” penafsir (*members' resources/ MR*). *Members' resources* berkenaan dengan struktur dari teks yang dikaji dan konteks yang menyertainya. Penjelasan mengenai keterlibatan MR dalam interpretasi terlihat dalam bagan berikut.



Gambar 2. Interpretasi

Bagan interpretasi menurut Fairclough (2006:155) menunjukkan bahwa *members' resource* berisi mengenai struktur teks meliputi pengetahuan penafsir tentang tata bahasa, makna, koherensi lokal, dan skemata. MR tentang konteks meliputi konteks intertekstual dan situasional. Konteks intertekstual menuntun supaya seorang analis melihat teks dari sudut pandang historis. Hal itu bertujuan untuk menemukan hubungan teks yang dianalisis dengan teks-teks sebelumnya.

Penafsir atau interpreter dalam menginterpretasi bagian konteks situasional akan menggali informasi berupa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dalam relasi apa, dan peran bahasa dalam situasi itu di dalam teks (Fairclough, 2006:146).

2.2.2.3 Tahapa Eksplanasi

Eksplanasi merupakan tahapan terakhir dalam analisis wacana dengan model Fairclough. Tahapan eksplanasi memiliki dua tujuan yang hendak dicapai dalam proses analisis. Pertama, eksplanasi bertujuan menggambarkan bahwa wacana merupakan bagian dari proses sosial dan berfungsi sebagai praksis sosial. Tujuan kedua yakni menjelaskan bagaimana sebuah struktur sosial yang terdiri atas konteks sosial, situasional, dan institusional membentuk *members resource* (MR). Dan, nantinya MR tersebut akan membentuk wacana dan bagaimana wacana itu berdampak pada pemertahanan atau merubah MR, sehingga bisa berakibat pada pemertahanan atau merubah struktur sosial (Fairclough, 2006:164).

Berdasarkan penjabaran tahapan analisis wacana kritis menurut Fairclough dapat disimpulkan ada tiga tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang harus dilakukan meliputi tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Ketiga tahapan tersebut diterapkan dalam analisis teks pernyataan langsung kepolisian terkait proses penyelidikan peristiwa peneroran air keras terhadap Novel Baswedan. Pada tahap deskripsi teks wacana dari Polri akan dianalisis berdasarkan leksikogramatikal yang membangun wacana. Di dalam tahapan deskripsi digunakan alat transitivitas untuk membedah sehingga ditemukan representasi yang ingin disampaikan Polri melalui wacananya. Tahapan kedua yakni interpretasi teks dan konteks. Teks wacana Polri yang telah dideskripsikan akan diinterpretasikan berdasarkan teks dan konteksnya. Interpretasi pernyataan langsung kepolisian berdasarkan teks berpedomanan pada 'informasi' yang ada di dalam teks dan pengetahuan dari interpreter. Selain teks, interpretasi dilakukan

juga berdasarkan konteks yang terbagi menjadi konteks situasional dan intertekstual. Interpretasi dilakukan untuk mengetahui 'hal' yang tersembunyi dibalik penggunaan bahasa dalam tindak wacana Polri. Tahap terakhir dari analisis wacana yakni eksplanasi. Tahapan eksplanasi berisi tentang penjelasan dari hasil deskripsi dan interpretasi yang melibatkan *members' resource*. Pernyataan langsung kepolisian mengenai proses penyelidikan penyerangan air keras kepada Novel dijelaskan dampaknya pada struktur sosial. Tujuan dari tahap eksplanasi pada tindak wacana Polri yakni untuk melihat struktur sosial membentuk MR yang akan membentuk wacana dan bagaimana tindak wacana itu mempertahankan atau merubah MR. Selanjutnya, apakah tindak wacana Polri tersebut merubah atau mempertahankan struktur sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif eksplanatoris. Penelitian analisis wacana kritis ini termasuk penelitian kualitatif bersifat deskriptif eksplanatoris karena dalam kajiannya peneliti mendeskripsikan bagaimana Polri merepresentasikan kasus Novel Baswedan. Peneliti mendeskripsikan bagaimana representasi Polri terhadap peneroran air keras terhadap Novel Baswedan dalam pemberitaan di media massa *online*. Objek penelitian ini adalah tuturan Polri mengenai peneroran air keras yang menimpa Novel Baswedan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah pemberitaan peneroran air keras Novel Baswedan di media massa *online*. Media massa yang digunakan adalah media massa berbasis *online* yang sudah terdaftar dan diakui oleh Dewan Pers Indonesia.

3.2 Penyediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian mengenai representasi kinerja kepolisian dalam yaitu pernyataan langsung Polri yang berhubungan dengan peneroran air keras kepada Novel. Data-data pernyataan langsung Polri tersebut diambil dari pemberitaan di portal berita *online*. Portal berita *online* yang digunakan sebagai sumber data ialah situs *kompas.com*, *tempo.co*, *detiknews.com*

dan *okezone.com*. Sumber data yang dipilih sudah terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia

Data penelitian diambil dari pemberitaan yang terbit pada edisi April 2017 s.d September 2018. Data yang dikumpulkan dengan metode simak bebas libat cakap disertai teknik transkripsi. Sudaryanto (2015: 203) menjelaskan bahwa metode simak merupakan metode yang dilakukan dengan ‘menyimak; penggunaan bahasa. Metode simak digunakan di dalam pengambilan data karena data penelitian berupa bahasa tulis merupakan perwujudan dari bahasa lisan. Pernyataan langsung kepolisian yang muncul dalam teks berita di media *online* ‘disimak’ dengan cara dicermati wujudnya. Penggunaan metode simak dalam penyediaan data disertai dengan teknik simak bebas libat cakap. Hal itu dikarenakan peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa kebahasaan tersebut.

Metode simak bebas libat cakap digunakan karena peneliti berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam peristiwa tutur tersebut. Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data sebagai berikut ini: 1) mencari berita melalui *website* media *online*. 2) peneliti membaca dan menyeleksi berita-berita yang hanya terkait dengan rumusan masalah penelitian. Berita yang digunakan yaitu pernyataan langsung dari pihak kepolisian. 3) peneliti melakukan pemeriksaan ulang data pernyataan langsung Polri lewat mesin pencari *www.google.com*. Pemeriksaan ulang dilakukan untuk mengetahui setiap data pernyataan langsung Polri terbit pada situs berita apa saja. 4) peneliti melakukan transkrip setiap data pernyataan langsung Polri ke dalam bank data disertai konteks dan nama situs berita.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam analisis pernyataan langsung Polri yaitu *abductively inferring*. Metode itu digunakan karena *abductively inferring* (pengambilan kesimpulan) berdasarkan konteks permasalahan yang dipilih. Metode *inferring* akan menganalisis data lebih dalam dengan mencari makna data di unit-unit yang ada di dalam data. Tahapan tersebut sesuai dengan fokus permasalahan mengenai representasi kinerja kepolisian dalam investigasi kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. *Abductively inferring* digunakan dalam analisis data pernyataan langsung kepolisian karena tahapan ini dapat menghubungkan data deskriptif dengan pemaknaan, penyebab, mengarah, atau memberikan provokasi bagi penggunaan teks wacana (Krippendorff, 2004: 86). Oleh karena itu, metode analisis ini digunakan karena peneliti mencari keterkaitan partikular satu dengan partikular lain antar teks untuk merumuskan suatu hal. Partikular dalam penelitian ini yakni teks dan konteks berhubungan dengan kasus teror air keras yang melukai penidik senior KPK, Novel Baswedan.

Di dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan langkah analisis wacana dengan model Fairclough (1989:107). Analisis wacana kritis model Fairclough terdapat tiga langkah yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.

1) pertama deskripsi, peneliti mengkaji pilihan tata bahasa yang digunakan oleh Polri guna merepresentasikan kasus peneroran Novel Baswedan di media massa *online*. Peneliti menganalisis pernyataan Polri dengan alat transitivitas yang melibatkan proses, partisipan, dan sirkumstan. Pernyataan langsung kepolisian diambil dari sumber portal berita *kompas.com*, *detik.com*, *tempo.co* dan

okezone.com. Pernyataan tersebut dikumpulkan di dalam bank data kemudian diperinci per klausa guna dianalisis dengan transitivitas. 2) tahap kedua adalah interpretasi, yang merupakan kombinasi apa yang terdapat di dalam teks dan apa yang terdapat dalam pemikiran penafsir (*member's resources*). MR yang diperlukan oleh penafsir ketika menganalisis adalah tentang struktur teks dan konteks. 3) eksplanasi, tahapan yang bertujuan untuk menjawab bagaimana suatu struktur sosial membentuk MR suatu kelompok atau individu. MR tersebut akan membentuk suatu wacana yang bisa mempertahankan atau mengubah MR yang bisa berdampak pada pemertahanan atau perubahan struktur sosial.

Temuan dari penelitian analisis wacana kritis Fairclough dalam tindak wacana Polri diwujudkan dalam bentuk metode penyajian data informal. Metode penyajian data informal digunakan karena hasil penelitian mengenai representasi kinerja Polri dalam penanganan kasus teror air keras Novel dilaporkan dalam bentuk deskripsi. Bentuk penyajian informal berupa deskripsi dengan alat kebahasaan dapat menjelaskan secara detail hasil analisis wacana kritis penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Pemberitaan kasus peneroran air keras yang dialami penyidik KPK Novel Baswedan dianalisis berdasarkan alat leksikogramatikal dengan menerapkan wacana kritis Fairclough dan Linguistik Sistemik Fungsional. Analisis dengan transitivitas melibatkan tiga komponen yaitu proses, partisipan, dan sirkumstan yang menyertai wacana. Transitivitas digunakan untuk mengetahui bagaimana Polri merepresentasikan kinerja instansinya dalam menginvestigasi kasus penyerangan terhadap Novel. Hasil dari deskripsi representasi kinerja Polri digunakan untuk mengetahui interpretasi yang ada di dalam wacana Polri. Interpretasi yang telah didapatkan akan menjelaskan intertekstualitas dalam wacana Polri untuk mengetahui efek di struktur sosial.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pernyataan langsung Polri terdapat beberapa temuan. Pertama, analisis dengan transitivitas Halliday telah ditemukan repretesentasi yang mengacu pada kinerja kepolisian. Representasi yang ingin dilakukan melalui tindak wacana Polri dalam pengungkapan kasus Novel berikut ini. 1) Polri merupakan lembaga hukum yang bertanggung jawab. Representasi itu didasarkan pada penggunaan proses material sebesar 40% dari total jumlah 69 klausa. Wacana polri yang mengandung proses material berjumlah 28 klausa. 2) Polri merupakan lembaga hukum yang berkredibilitas dengan direpresentasikan melalui proses mental sebesar 28%. Persentase 28%

proses mental berasal dari 19 klausa proses mental dari keseluruhan jumlah klausa 69. Di dalam proses mental tergambar adanya rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kebenaran kasus teror Novel. Representasi instansi kepolisian yang berkredibilitas didasarkan juga pada penggunaan proses verbal sebesar 12%. Proses verbal berjumlah 8 klausa dengan total klausa 69. Proses verbal menunjukkan adanya upaya untuk menyakinkan masyarakat terkait segala tindakan kepolisian melalui pengakuan kepolisian. 3) Polri merupakan lembaga hukum yang profesional dan kooperatif dengan direpresentasikan oleh proses relasional 14% dan proses behavioral 6%. Proses relasional berjumlah 10 klausa dari keseluruhan jumlah klausa 69. Proses relasional menggambarkan hal-hal yang mencirikan dan mengidentifikasi kan kepolisian terkait kinerjanya dalam menginvestigasi kasus penyerangan terhadap Novel. Proses behavioral dengan persentase 6% berdasarkan jumlah 4 klausa dari total keseluruhan 69. Bentuk proses behavioural menunjukkan perilaku fisik atau psikologis kepolisian yang berhubungan dengan upaya-upaya mengusut kasus teror itu.

Representasi kinerja kepolisian melalui wacana yang diproduksi Polri didasarkan pada penggunaan partisipan dan sirkumstan . Partisipan yang digunakan secara dominan adalah partisipan aktif yang merujuk pada pihak kepolisian. Sirkumstan yang menyertai tindak wacana tersebut berjumlah sembilan bentuk, diantara sebab (*cause*), masalah (*matter*), cara (*manner*), rentang (*extent*), lokasi (*location*), pandangan (*angle*), penyerta (*accompainiment*), dan lingkungan (*contingency*).

Kedua, temuan berikutnya menunjukkan adanya relasi kuasa yang dibentuk oleh Polri. Relasi kuasa Polri dibentuk menggunakan leksikogramatikal yang tersusun di dalam tindak wacana Polri dengan peran serta media. Pihak kepolisian memiliki kekuasaan (*power*) yang lebih dalam konteks investigasi kasus teror air keras terhadap Novel. Kekuasaan yang dominan dimiliki Polri karena Polri merupakan lembaga hukum yang legal dalam proses hukum kasus ini. Dan pihak korban menjadi pihak yang bergantung pada kepolisian. Relasi tersebut melibatkan hubungan Polri dengan KPK, Polri dengan Korban, dan Polri dengan masyarakat.

Ketiga, faktor konteks sosial, institusional, dan situasional mempengaruhi tindak wacana Polri terkait proses penyelidikan kasus teror air keras yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan. Polri melalui tindak wacananya mencoba mempertahankan citra positif kepolisian di masyarakat. Hal yang ingin dipertegas dan dipertahankan adalah instansi kepolisian merupakan penegak hukum yang legal, kredibilitas tinggi, pertanggungjawab, transparan, dan independen sehingga tidak memihak kepada golongan mana pun selain kebenaran dan keadilan. Tindakan itu dilakukan bertujuan agar eksistensi Polri dalam struktur sosial sebagai penegak hukum yang menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang tugas dan fungsi kepolisian republik Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Representasi Kinerja Polri Terkait Kasus Teror Air Keras Novel Baswedan

Tindak wacana Polri yang termuat di media massa *online* memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai muncul dikarenakan beredarnya asumsi di masyarakat tentang penanganan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Asumsi – asumsi yang mengarah kepada kepolisian berisi tentang keraguan terhadap kepolisian dalam menyelesaikan kasus teror air keras kepada Novel Baswedan. Hal itu disebabkan karena sampai dengan penelitian ini dilakukan, tahun 2019, kasus tersebut belum menemukan motif dan tersangka dan proses penyelidikan masih berjalan. Hal-hal yang ingin disampaikan pihak Polri dikemas melalui pilihan bahasa yang digunakan. Transitivitas Halliday dan Matthiessen (2004) digunakan dalam penelitian untuk mengkaji penggunaan bahasa tersebut, sehingga ditemukan suatu hal yang ingin disampaikan. Berdasarkan temuan dengan analisis transitivitas dari tindak wacana Polri teridentifikasi bahwa ada beberapa hal yang direpresentasikan Polri terkait kinerja dalam penanganan kasus Novel Baswedan. Berikut ini penjelasan tentang representasi Polri mengenai kinerjanya yang terepresentasi dalam pernyataan langsung kepolisian.

4.2.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Polri

Pernyataan langsung kepolisian tentang kasus penyerangan air keras kepada Novel Baswedan menyiratkan beberapa hal, salah satunya rasa tanggungjawab

Polri. Representasi kinerja Polri yang menunjukkan rasa bertanggungjawab tersirat lewat wacana pernyataan langsung kepolisian. Representasi Polri yang memiliki rasa tanggung jawab dapat diidentifikasi dari penggunaan proses material dalam pernyataan langsung. Proses material menggambarkan hal-hal yang berupa peristiwa, perbuatan, atau kejadian yang dilakukan oleh Polri. Suatu hal tersebut diperjelas dengan peran sirkumstan yang melatarbelakangi proses material itu. Pemarkah proses material di dalam pernyataan Polri dapat mewakili adanya bentuk tanggungjawab Polri terhadap kasus penyerangan Novel Baswedan. Proses material dalam pernyataan langsung mendominasi dengan persentase 40%. Persentase 40% proses material diperoleh dari jumlah klausa proses material yaitu 28 klausa dari total 69 klausa. Proses material direpresentasikan dalam bentuk verba yang menggambarkan aktivitas konkret. Aktivitas konkret yang teridentifikasi dalam proses material dapat disebut sebagai bentuk rasa tanggungjawab Polri dalam proses hukum kasus teror air keras Novel Baswedan. Berikut ini temuan pemarkah proses material dalam tindak wacana Polri dalam portal berita.

No	Actor	Process: material	Goal
1.	Kita	tidak mungkin ambil,	pelaku
		sudah memberikan, udah	daftar pertanyaan,
		upayakan	pengungkapan kasus itu
		tuangkan	dalam berita acara
		ambil, tangkap, kerja	
2.	Kami	tinggal tambah, kerja, bekerja	beberapa penyidik
		mempersiapkan, koordinasi	anggota
		tetap melibatkan, sudah meminta	KPK
		mendapatkan	support
3.	tim penyidik	terus bekerja, datang, sudah melangkah	melakukan penyidikan
4.	Saya	membentuk	satuan tugas

5.	Dia (Polda)	menangani	Kasus
6.	Novel	berikan, menuding	Informasi
7.	(masyarakat)	beri waktu, bantulah berikan	(Polri), informasi yang signifikan
8.	(kamu)	sini kasih	ke saya (kepolisian)
9.	Polisi	tetap melakukan	Penyidikan

Tabel 4.1 Proses material dalam pernyataan langsung Polri

Temuan pemarkah proses material merefleksikan hal-hal yang bersifat konkret dari pihak kepolisian dalam menginvestigasi kasus ini. Pemarkah proses material tersebut melibatkan partisipan aktif (kepolisian) dan partisipan pasif (Non kepolisian). Temuan partisipan dalam pernyataan langsung Polri mengenai kasus teror keras Novel Baswedan didominasi menggunakan partisipan aktif. Penggunaan verba dalam proses material memiliki implikasi untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kepolisian telah melakukan beberapa tindakan terkait kasus Novel yang masih dalam proses hukum hingga sekarang. Kepolisian telah melakukan tindakan-tindakan nyata guna mengusut kasus penyerangan terhadap Novel. Bentuk tindakan yang dilakukan diantaranya membentuk tim penanganan, meminta keterangan korban, bekerja secara profesional, melakukan koordinasi dengan KPK, dan menindaklanjuti informasi yang diterima. Semua tindakan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar operasional penyidikan serta bersifat akuntabel. Beberapa bentuk rasa tanggungjawab tersebut akan dijabarkan di bawah ini.

Tindakan Polri yang mencerminkan bentuk tanggungjawab terhadap investigasi kasus penyerangan air keras NB yaitu mengumpulkan bukti dari korban. Tindakan Polri mengumpulkan bukti kasus Novel Bawedan direpresentasikan oleh pemarkah proses material diantaranya ‘sudah memberikan’,

‘tuangkan’, dan ‘ambil. Ketiga bentuk pemarkah tersebut memiliki konteks kalimat yang serupa. Bentuk rasa tanggung jawab Polri atas proses hukum Novel yang masih berlangsung hingga sekarang dijelaskan salah satu kutipan data berikut ini.

1. *Kita sudah memberikan daftar pertanyaan kepada yang bersangkutan (Novel) (Ed. 2/8/17)*

Kita	sudah memberikan	daftar pertanyaan	kepada yang bersangkutan (Novel)
Actor	Pr. Material	Goal	Circ: contingency

Pernyataan langsung Polri pada data [1] termuat di *kompas.com* dan *detik.com* menunjukkan salah satu bentuk realisasi rasa tanggungjawab. Kutipan data [1] menunjukkan tindakan menjemput bola yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian direpresentasikan oleh pronomina persona ‘kita’ sebagai aktor. Penggunaan ‘kita’ memberikan interpretasi adanya keterlibatan dua pihak, antara penutur dan pihak yang diajak bertutur. Kutipan klausa tersebut terjadi dalam situasi wawancara pihak kepolisian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, dengan sejumlah media. Kepolisian memberikan klarifikasi bahwa pihak penyidik kepolisian telah menempuh langkah untuk meminta keterangan korban. Penggunaan pronomina ‘kita’ bisa memberikan interpretasi adanya keterlibatan Polri dan pihak lain dalam tindakan yang direfleksikan oleh klausa tersebut. Berdasarkan penggunaan pronomina ‘kita’ terdapat ketidakjelasan atau samar yang merujuk kepada pihak lain selain Polri. Hal itu dikarenakan, dalam konteks pernyataan [1] pihak lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu yaitu para wartawan dan jika merujuk pada bentuk tindakan konkret itu terdapat

ketidakmungkinan wartawan terlibat dalam proses perwujudan tindakan itu. Ketidakmungkinan itu muncul karena wartawan tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan pengumpulan keterangan.

Penggambaran tindakan yang dilakukan dijelaskan dalam bentuk frasa verba ‘sudah memberikan’ sebagai proses material. Pemarkah proses material ‘sudah memberikan’ jika dilihat dari aspek seatis terdapat adanya unsur aspek. Unsur aspektualitas ditandai dengan pemarkah ‘sudah’ yang mengandung arti bahwa adanya suatu proses yang telah dilakukan dan memiliki tujuan. Pemarkah proses material ‘sudah memberikan’ mengandung adanya proses tindakan yang telah dilakukan oleh pihak Polri dan tujaun yang dicapai yaitu memberikan. *Goal* dari tindakan proses material tersebut adalah daftar pertanyaan. Tujuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam sirkumstan yang berisi cara pelaksanaan tindakan proses material. Sirkumstan proses material data [1] yaitu kepada yang bersangkutan (Novel). Penjabaran tersebut dapat disimpulkan pihak kepolisian melakukan tindakan nyata dengan cara memberikan daftar pertanyaan investigasi kepada NB.

Bentuk rasa tanggungjawab penegak hukum kepolisian direpresentasikan diantaranya melalui pembentukan sebuah tim untuk mengusut kasus hukum penyerangan Novel Baswedan. Kutipan berikut yang menggambarkan bentuk tanggung jawab Polri.

2. *Saya membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus Novel ini dengan membentuk 166 penyidik yang khusus mengerjakan kasus ini* (Ed. 14/3/18)

Saya	<i>membentuk</i>	satuan tugas	untuk penanganan kasus Novel ini dengan 166 penyidik
actor	Pr: material	Goal	circumstance: manner

Proses material data [2] ada di *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com* menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan satu langkah nyata yaitu membentuk tim khusus. Hal itu diperjelas di dalam sirkumstan bahwa ada 166 penyidik yang tergabung dalam satu tim untuk menangani kasus Novel. Aktor dalam proses material data [2] adalah ‘saya’ merupakan salah satu perwakilan dari kepolisian, yang diwakili oleh Kapolda Metro Jaya. Tindakan konkret tersebut sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kepolisian dalam menangani kasus teror air keras terhadap Novel Baswedan. Hal itu merupakan tindakan konkret karena dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bentuk nyata dari proses material yaitu terbentuknya tim beranggotakan 166 penyidik.

Rasa tanggungjawab Polri juga wujudkan dalam bentuk tindakan adanya ‘koordinasi’, ‘mempersiapkan’, ‘kerja’, ‘bekerja’, ‘tinggal tambah’, ‘sudah meminta’, ‘tetap melibatkan’, dan ‘mendapatkan’. Salah satu tindakan konkret Polri direpresentasikan oleh verba ‘koordinasi’ dan ‘mempersiapkan’ yang dilingkupi dengan konteks sama.

3. *Kami koordinasi dengan KPK kami tidak masalah* (Ed. 6/11/17)

Kami	koordinasi	dengan KPK kami tidak masalah
Actor	Pr Material	Circumstan: accompaniment

Kutipan [3] termuat di *kompas.com* dan *detik.com* memiliki representasi bentuk tanggungjawab Polri berupa melaksanakan koordinasi dengan melibatkan pihak KPK. Aktor dalam kutipan [3] digambarkan dalam bentuk pronomina persona ‘kami’. Pronomina persona ‘kami’ mencakup pihak kepolisian yang terdiri atas tim penyidik atau lebih dari seorang. Tindakan yang dilakukan oleh Polri diungkapkan pemarkah proses material ‘koordinasi’. Sirkumstan jenis penyerta (*accompaniment*) menjelaskan proses material yang dilakukan menyertakan pihak KPK dalam proses penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap NB.

Bentuk tanggungjawab pihak polri dalam penanganan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan berupa mendatangi Novel selaku korban untuk meminta keterangan. Berikut ini kutipan yang menggambarkan hal itu.

4. Tim kemarin datang dengan pihak KPK juga ditanya itu dia (Novel_ juga enggak mau menyampaikan (Ed. 6/11/17)

Tim	datang	dengan pihak KPK juga ditanya itu dia (Novel) juga enggak mau menyampaikan
Actor	Pr. Material	<i>Circumstance: accompaniment</i>

Kutipan data [4] menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan oleh kepolisian yaitu mendatangi Novel Baswedan. Pihak kepolisian direpresentasikan oleh pronomina persona ‘tim’ sebagai *actor*. Kata kerja (verba) ‘datang’ merupakan bentuk proses material yang merefleksikan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara menguji suatu tepat atau seseorang sebagai tujuannya. Hal yang telah dilakukan oleh *actor* dengan diperjelas oleh penggunaan sirkumstan manner yaitu ‘dengan pihak KPK juga ditanya itu dia (Novel) juga enggak mau menyampaikan’. Oleh sebab itu kutipan [4] yang termuat di *kompas.com* dan

detik.com menunjukkan tindakan konkret yang dilakukan oleh kepolisian berupa mendatangi Novel Baswedan bersama pihak KPK. Penjelasan tersebut diungkapkan adanya penggunaan sirkumstan penyerta (*accompaniment*).

Tindakan bersifat berkelanjutan yang dilakukan oleh penegak hukum adalah melakukan penyidikan. Penegak hukum berwacana bahwa pihak mereka konsisten melaksanakan investigasi peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Hal itu teridentifikasi dari klausa berikut ini.

5. *Polisi tetap melakukan penyidikan* (Ed. 22/218)

Polisi	tetap melakukan	penyidikan
<i>Actor</i>	<i>Pr. Material</i>	<i>Goal</i>

Kutipan data [5] termuat di portal *okezone.com* menunjukkan adanya bentuk tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Keterlibatan pihak kepolisian direpresentasikan oleh pronoun ‘polisi’ sebagai *actor*. Bentuk tindakan yang dilakukan direpresentasikan oleh verba ‘melakukan’ sebagai proses material. Proses material tersebut juga memperjelas bahwa tindakan yang dilakukan bersifat konsisten. Sifat konsistensi penggunaan kata adverbial ‘tetap’ berdasarkan aspek semantis yang menunjukkan suatu keadaan dengan kondisi tidak berubah dan konsisten. Hal yang dicapai dalam klausa [5] adalah penyidikan sebagai suatu hal yang menjadi bentuk tujuan dari tindakan kepolisian.

Proses material dalam pernyataan kepolisian menunjukkan tindakan-tindakan konkret kepolisian yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk tanggung

jawab Polri. Persentase proses material yang mendominasi temuan data, 40%, dapat diimplikasikan bahwa Polri memiliki tujuan untuk menekankan rasa tanggungjawab yang dimiliki Polri. Hal yang ditekankan Polri itu dapat juga mengindikasikan bahwa Polri instansi penegak hukum yang akuntabel. Pernyataan itu didasarkan pada temuan tindakan penyidik kepolisian bisa dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti fisik dan prosedur yang sistematis.

Berdasarkan hasil analisis pemberitaan kasus teror air keras Novel Baswedan menjadi topik utama di media *kompas.com*, *detik.com*, *okezone.com*, dan *tempo.co*. Pernyataan-pernyataan langsung kepolisian yang merepresentasikan bentuk tanggungjawab Polri termuat dalam media-media tersebut. Akan tetapi, porsi tiap portal berita dalam memberitakan kasus Novel Baswedan berbeda-beda. Masing-masing portal berita memiliki kecenderungan tersendiri dalam memberitakan kasus tersebut. Berdasarkan hasil temuan pada data, pernyataan Polri yang merepresentasikan kinerja Polri secara positif didominasi oleh pemberitaan *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com*. Portal berita *tempo.co* memberitakan juga kasus tersebut akan tetapi lebih didominasi dari perspektif pihak selain Polri. Pemberitaan *tempo.co* dalam memberitakan kasus teror itu dapat menjadi suatu hal yang kontradiktif dengan bentuk-bentuk tanggungjawab dari pihak Polri.

4.2.2.2 Bentuk Kredibilitas Polri

Tindak wacana Polri mengenai penanganan kasus teror air keras yang menimpa Novel Baswedan menyiratkan bahwa Polri memiliki kredibilitas. Polri memiliki kredibilitas sebagai penegak hukum yang menangani kasus penyerangan itu. Kredibilitas tersebut berkaitan dengan hal kepercayaan yang ditunjukkan kepada korban dan publik. Representasi itu menunjukkan bahwa sebagai penegak hukum, instansi kepolisian dapat dipercaya untuk menyelesaikan kasus.

Representasi bahwa Polri memiliki kredibilitas tersirat lewat pernyataan-pernyataan langsung kepolisian. Hal itu dapat diketahui dengan penerapan analisis tranitivitas pada pernyataan langsung kepolisian. Hasil temuan menunjukkan bahwa proses mental menjadi salah satu proses yang merepresentasikan sikap kredibilitas Polri. Proses mental dalam pernyataan langsung Polri memiliki persentase 28%. Jumlah data proses mental adalah 20 klausa dari keseluruhan data yang berjumlah 69 klausa. Proses mental menunjukkan adanya upaya untuk meyakinkan dan memberi pemahaman secara kognisi kepada masyarakat. Pihak Polri lewat pernyataan-pernyataan langsung tentang kasus penyerangan air keras terhadap Novel memberikan informasi perkembangan penyidikan. Berikut ini bentuk-bentuk prosos mental yang merepresentasikan bentuk kredibilitas dalam menangani kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

<i>No</i>	<i>Senser</i>	<i>Process: mental</i>	<i>Phenomenon</i>
1.	Kita	akan lakukan,akan selidiki akan teruskan	Penyidikan
		mau ,mau	periksa,bagus, bersih
		coba nanti	
		tidak main-main	
		jangan menanggapi	yang lambat atau menghambat
2.	Kami	dalami,akan berangkat	Keterangan
3.	Tim	Bisa	kerja sama
4.	Saya	ingin meyakinkan akan ungkap	penyidik terus bekerja maksimal

Tabel 4.2 Proses mental dalam pernyataan langsung Polri

Senser dalam proses mental tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kinerja Polri. Proses mental dalam tindak wacana Polri didominasi oleh partisipan aktif (Polri). Tindak wacana Polri bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka memiliki rencana-rencana dalam proses penyelesaian kasus ini. Harapan dan keinginan Polri terinterpretasi dalam bentuk proses mental. Ada keinginan kuat dan besar dari instansi kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut guna menegakkan kebenaran. Polri berkeinginan menuntaskan kasus tersebut hingga selesai. Polri juga mencoba meyakinkan publik bawa instansi mereka bersih dan memiliki kredibilitas. Hal itu yang ingin diperjelas atau diyakinkan Polri direpresentasikan *phenomenon*.

Pemarkah proses mental dalam tabel 4.2 menunjukkan hal-hal atau rencana-rencana yang akan dan sudah dilakukan oleh kepolisian. Hal-hal tersebut berkaitan dengan proses penyidikan meliputi, pengumpulan informasi, keterangan, proses penyidikan yang terus berjalan, dan sebagainya. Proses mental yang ditandai bentuk verba digunakan untukewartakan dan juga meyakinkan publik

terhadap kinerja kepolisian. Polri memiliki tujuan untuk meyakinkan dan memberikan pemahaman secara kognisi bahwa kasus penyerangan air keras Novel dapat terselesaikan. Keseriusan Polri tersebut terefleksi lewat bentuk proses mental diantaranya frasa ‘tidak main-main’, ‘jangan menganggap’, ‘akan teruskan’, dan ‘akan ungkap’. Bentuk-bentuk tersebut menjadi alat kebahasaan dalam tindak wacana Polri guna meyakinkan masyarakat.

Instansi kepolisian merupakan penegak hukum yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002. Sebagai penegak hukum yang legal, kepolisian akan berusaha untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Upaya tersebut juga dilakukan dalam investigasi teror air keras yang melukai Novel Baswedan. Bentuk kredibilitas yang dimiliki Polri diantaranya upaya untuk meyakinkan publik mengenai keseriusan penyidik. Hal itu dijelaskan dalam kutipan data berikut ini.

6. *Saya ingin meyakinkan bahwa penyidik sampai hari ini terus bekerja melakukan penyelidikan”*(Ed. 14/3/18)

Saya	ingin meyakinkan	bahwa penyidik sampai hari ini terus bekerja melakukan penyelidikan.
<i>senser</i>	Pr: mental	<i>Phenomenon</i>

Kutipan data [6] *senser* direpresentasikan oleh pronomina persona ‘saya’ yang merujuk pada Kapolda Metro Jaya. Saya merupakan perwakilan dari anggota kepolisian yang berkewenangan dalam menangani kasus penyerangan Novel. Proses mental dalam kutipan [6] ditunjukkan oleh frasa verba ‘ingin meyakinkan’. Frasa verba tersebut menunjukkan tindakan konkret yang dilakukan oleh pihak

kepolisian mengenai penanganan teror yang menyerang NB. Pada frasa tersebut juga terdapat penggunaan modal 'ingin' yang teridentifikasi sebagai pemarah modal intensional. Penggunaan modal 'ingin' oleh *senser* menunjukkan adanya keinginan terhadap suatu hal yang hendak dicapai oleh pihak partisipan, *senser*. Hal yang hendak dicapai *senser* yakni sebuah tindakan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keyakinan.

Suatu hal yang ingin ditunjukkan oleh proses mental pada kutipan [6] tersurat dalam *phenomenon*. *Phenomenon* dalam kutipan data itu menunjukkan tindakan nyata yang menjelaskan proses mental dalam pernyataan langsung kepolisian. Kutipan klausa [6] termuat dalam *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com* menunjukkan adanya tindakan kepolisian yang bersifat mengungkapkan keinginan dalam menyelesaikan kasus itu. Hal itu menunjukkan, bahwa kepolisian berkeinginan agar masyarakat mempercayai kinerja anggota penyidik yang terus melakukan pengusutan. Pemikiran yang ingin disampaikan Polri direpresentasikan dalam *phenomenon* 'bahwa penyidik sampai hari ini terus bekerja melakukan penyelidikan'. Berdasarkan analisis komponen dalam klausa itu dapat diinterpretasikan bahwa adanya keinginan Polri untuk menyakinkan masyarakat bahwa anggota kepolisian terus bekerja dalam proses hukum teror Novel Baswedan.

Pernyataan kepolisian yang menunjukkan sikap berkredibilitas adalah dengan merencanakan tindakan untuk mengusut kasus teror terhadap NB. Bentuk-bentuk refleksi kredibilitas Polri disampaikan oleh beberapa bentuk partisipan,

diantaranya ‘kita’. Pronomina ‘kita’ melakukan tindak wacana yang direpresentasikan bentuk verbal ‘akan teruskan’ dan ‘akan selidiki’ yang memiliki konteks sama dalam wacana itu. Rencana yang akan dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap keterangan yang diberikan oleh Novel. Kutipan yang terdapat bentuk proses mental itu dijelaskan berikut ini..

7. *Kita akan lakukan penyidikan kalau itu sudah fakta hukum dan ada alat bukti.* (Ed. 1/8/17)

Kita	akan lakukan	penyidikan	kalau itu sudah fakta hukum dan ada alat buktinya
Senser	Pr. Mental	<i>phenomenon</i>	Circumstance: manner

Senser kutipan [7] itu menggunakan pronomina persona ‘kita’ yang mewakili pihak kepolisian. Penggunaan pronomina ‘kita’ mengandung unsur ketidakjelasan atau samar, karena pihak lain yang terlibat selain Polri tidak jelas. Ketidakjelasan dikarenakan tindak wacana tersebut terjadi pada saat proses wawancara media dan kepolisian. Penggunaan pronomina ‘kita’ seharusnya merepresentasikan pihak penutur (Polri) dan mitra tutur (media), sedangkan mitra tutur kutipan itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang hendak dilakukan oleh kepolisian.

Proses mental dalam kutipan dideskripsikan oleh frasa verba ‘akan lakukan’. Penggunaan frasa verba tersebut guna merepresentasikan tindakan Polri yang belum terlaksana. Pemakaian proses mental dalam klausa tersebut memiliki modal ‘akan’ yang teridentifikasi sebagai modal intensional, menyatakan sebuah keinginan. Penggunaan modal intensional dapat diinterpretasikan bahwa *senser* memiliki kewenangan untuk merealisasikan ‘hal’ yang direpresentasi ‘akan

lakukan'. Penggunaan 'akan' dari segi semantis memiliki makna menyatakan suatu proses yang belum dilakukan dan akan dilakukan tetapi masih bersifat abstrak dan belum ada langkah konkret. Hal itu diperkuat dengan informasi yang tersurat dalam sirkumstan, yakni 'hal' yang direpresentasikan pemarkah proses mental dapat dilakukan dengan tercapainya ketentuan di dalam sirkumstan itu. Tindakan yang akan dilakukan oleh *senser* yaitu akan melakukan penyidikan terhadap keterangan yang didapatkan jika hal itu merupakan fakta dan ada bukti. Frasa verba dalam kutipan data [7] itu bersifat kognisi.

Bentuk kredibilitas lain dari Polri yang serupa dengan kutipan data [7] ialah kutipan klausa dengan menggunakan pemarkah 'akan berangkat'. Pemarkah proses mental 'akan berangkat' merepresentasikan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh pihak partisipan dengan syarat tertentu. Pernyataan itu dijelaskan oleh analisis klausa di bawah ini.

8. *Kami akan berangkat kalau KPK menyampaikan pihak dokter sudah mengizinkan. (Ed. 6/11/17)*

Kami	akan	berangkat	kalau KPK menyampaikan pihak dokter sudah mengizinkan
Senser	Pr. Mental	<i>Phenomenon</i>	Circumstance: manner

Senser kutipan pernyataan [8] adalah pronomina persona kami. Pronomina persona kami merepresentasikan tim penyidik yang terdiri dari pihak kepolisian. Proses mental dalam kutipan data ditunjukkan oleh adverbial 'akan'. Adverbial 'akan' merupakan bentuk modal intensional dapat diinterpretasikan adanya sebuah keinginan yang hendak dicapai. Dari aspektualitas 'akan' bermakna suatu tindakan yang masih bersifat abstrak dan belum ada upaya konkret untuk

merealisasikan tindakan itu. Suatu tindakan yang akan dilaksanakan oleh *senser* adalah ‘berangkat’ yang merupakan *phenomenon*. Tindakan ‘berangkat’ dari partisipan masih bersifat abstrak dan bisa terjadi dengan syarat tercapainya ‘hal’ yang direpresentasikan sirkumstan. Hal yang direpresentasikan sirkumstan yaitu suatu hal itu akan terjadi jika sudah mendapatkan kepastian dari KPK mengenai perizinan dari dokter. Kutipan data [8] bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan bahwa tim penyidik akan meminta keterangan NB selaku korban. Tindakan tersebut baru bisa direalisasikan jika sudah mendapatkan kabar dari KPK mengenai perizinan dari dokter untuk melakukan BAP terhadap Novel Baswedan.

Partisipan ‘kita’ dalam temuan data proses mental merepresentasikan juga sebuah pemikiran dan niat yang mengandung hal positif. Pemikiran atau niatan tersebut direpresentasikan oleh modal ‘mau’, seperti kutipan berikut.

9. *Kita mau periksa, ah sudahlah engga usahlah, kita ngobrol-ngobrol saja, katanya (Novel) begitu.* (Eds. 2/8/17)

kita	mau	periksa	<i>ah sudahlah engga usahlah, kita ngobrol-ngobrol saja, katanya (Novel) begitu.</i>
senser	Pr. Mental	<i>Phenomenon</i>	Circumstance: angel

Kutipan [9] masih menggunakan *senser* ‘kita’ guna merepresentasikan pihak kepolisian dan pihak lain selain kepolisian. Bentuk kredibilitas partisipan direprepetasikan oleh ‘mau’. ‘Mau’ merupakan pemarkah aspekualitas yang menandakan adanya suatu proses atau tindakan yang masih bersifat abstrak dan belum terjadi, tetapi sudah ada langkah yang ditempuh. Bentuk aspek itu

menandakan adanya sebuah awalan dari sebuah proses yang memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir yang hendak dicapai yakni ‘periksa’. Berdasarkan keberadaan tiap komponen tersebut, kutipan [9] dapat diinterpretasikan adanya keinginan melakukan proses tindakan yang bersifat abstrak dari Polri untuk melakukan pemeriksaan Novel. Akan tetapi, keinginan tersebut sudah memiliki kepastian terlaksana karena telah dilakukan meskipun belum prosesnya belum terselesaikan. Hal itu diperkuat dengan informasi yang terkandung di dalam sirkumstan mengenai penolakan dari pihak Novel atas tindakan Polri.

Perwujudan kredibilitas yang ingin ditunjukkan oleh Polri adalah dengan memberikan pemahaman kesanggupan mereka dalam menangani kasus ini. Polri memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tim penyidik dapat bekerja sama dengan pihak KPK. Hal itu tersurat di kutipan data [i].

10. *Tim ini bisa bekerja sama secara teknis lapangan karena KK memiliki kemampuan pengawasan*

Tim ini	Bbsa	kerja sama	secara teknis lapangan karena KPK memiliki kemampuan pengawasan
Senser	Pr. Mental	<i>Phenomenon</i>	Circumstance: <i>cause</i>

Senser pernyataan [10] direalisasikan oleh pronomina persona ‘tim’. ‘Tim’ merepresentasikan tim penyidik yang telah dibentuk oleh kepolisian RI. Tim yang berisi anggota kepolisian dan anggota KPK. Proses mental kutipan data [10] diwujudkan oleh verba ‘bisa’ guna menyatakan tindakan yang akan dilakukan oleh *senser*. Bentuk yang ingin direalisasikan adalah ‘kerja sama’ sebagai *phenomenon*. Sirkumstan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai suatu hal yang akan direalisasikan. Pernyataan [10] dapat diinterpretasikan

sebagai upaya untuk meyakinkan dan memberikan pengertian bahwa anggota kepolisian dan KPK bisa bekerja sama dalam investigasi.

Representasi dari kinerja Polri sebagai lembaga penegak hukum berkredibilitas juga ditandai oleh penggunaan proses verbal. Proses verbal ditemukan dalam pernyataan langsung kepolisian. Proses verbal dengan persentase 12% menunjukkan perilaku verbal kepolisian yang berkaitan hal-hal sistematis dalam penyidikan. Persentase 12% berdasarkan jumlah data proses verbal yaitu 8 klausa dari keseluruhan data 69 klausa. Berikut ini bentuk-bentuk kredibilitas Polri yang direpresentasikan oleh penggunaan proses verbal.

<i>No</i>	<i>Sayer</i>	<i>Process: verbal</i>	<i>Verbiage</i>
1.	Saya	tanya, bilang, sampaikan	tugas pokok dan fungsi, kami optimis bisa terungkap, kasus itu ada karekateristiknya masing-masing.
2.	Kita	sudah bilang	tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat
3.	Penyidik	menanyakan	
4.	keterangan Novel	disampaikan	

Tabel 4.3 Proses verbal dalam Pernyataan Langsung Polri

Penggunaan verba yang merepresentasikan proses verbal dalam pernyataan langsung pihak kepolisian menunjukkan bahwa pihak kepolisianewartakan tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan kepada masyarakat. Berdasarkan data, hal lain yang diberitahukan selain tindakan kepolisian yaitu keadaan di lapangan yang berhubungan dengan proses penyidikan. Hal itu dilakukan supaya masyarakat mengetahui tindakan yang telah dilakukan oleh kepolisian. Dan juga, bertujuan memberikan pemahaman kepada publik bahwa setiap kasus memiliki

karakteristik yang berbeda sehingga proses penanganannya pun akan berbeda. Polri berusaha untuk menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan penyiraman air keras kepada Novel.

Perilaku yang ditandai oleh proses verbal menggambarkan bentuk kredibilitas yang dimiliki Polri. Wujud kredibilitas yang ingin disampaikan tersebut diungkapkan melalui *verbiage*. *Verbiage* yang ada dalam proses verba, diantaranya ‘tugas pokok dan fungsi’, ‘optimis bisa terungkap’ dan ‘informasi’. Bentuk *verbiage* tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian bisa dipercaya dan memiliki komitmen dalam menangani kasus tersebut, kepolisian memiliki keyakinan kuat bisa mengungkap kasus ini sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum. Hal itu dapat terlihat pada kutipan klausa berikut ini.

11. “*Sekarang saya tanya, tupoksinya gimana?*” (Ed. 13/6/17)

Sekarang	saya	tanya	tupoksinya gimana
<i>Circumstance:location</i>	<i>Sayer</i>	Pr: verbal	<i>Verbiage</i>

Kutipan klausa tersebut menunjukkan Polri melakukan pemberitahuan kepada publik terkait pencapaian, tindakan-tindakan, dan keadaan yang berhubungan dengan penyelidikan kasus Novel. Kutipan tersebut muncul pada pemberitaan berita *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com* dengan konteks keinginan pihak KPK untuk terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan teror air keras Novel Bawedan. Pronomina persona saya sebagai *sayer* yang mewakili instansi Polri menanyakan terkait tugas pokok instansi KPK yang ingin dilibatkan ke dalam tim penyidik. Pemarkah verba ‘tanya’ merepresentasikan proses verbal sebagai bentuk Polri memiliki kredibilitas. Partisipan ‘saya’ melakukan tindakan

pasti berupa bertanya mengenai tugas pokok dan fungsi dari KPK. *Verbiage* yang direpresentasikan oleh ‘tupoksinya gimana’ memiliki maksud ada yang tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh pihak KPK. Pronoina ‘-nya’ merujuk kepada KPK jika dihubungkan dengan konteks wacana. Pananda temporal ‘sekarang’ menandakan waktu terjadinya tindak wacana tersebut. Kutipan klausa tersebut dapat diinterpretasikan, adanya tujuan lain yang ingin dicapai Polri selain bertanya secara lugas mengenai pembagian tugas pokok dan fungsi antara KPK dan Polri. Tujuan lain yang dimungkinkan ingin dicapai yakni memberikan pemahaman bahwa KPK dan Polri punya kewenangan berbeda. Terkait konteks proses hukum Novel Baswedan, Polri memiliki kewenangan yang legal untuk menyidik dan menyelidiki sehingga publik diharapkan bisa mempercayai.

Tujuan serupa yang hendak dicapai mengenai kepercayaan kepada Polri juga tergambar dalam kutipan berikut ini.

12. *Saya bilang kan beberapa kali kami optimis bisa terungkap, ini hanya masalah waktu.* (Ed. 12/4/18)

saya	Bilang	kan beberapa kali	kami optimis bisa terungkap ini hanya masalah waktu
<i>Sayer</i>	Pr. Verbal	<i>Circumstance:extent</i>	<i>Verbiage</i>

Kutipan pernyataan [12] menggunakan pronomina persona ‘saya’ sebagai senser. Pronomina personanya merepresentasikan pihak Humas Mabes Polri. *Senser* memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan penyelidikan kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan. Proses mental dalam direpresentasikan oleh verba ‘bilang’. Hal yang ingin disampaikan oleh *senser* yaitu keoptimisan kepolisian dalam menangani kasus NB. Penekanan pada rasa

optimis Polri dipertegas adanya sirkumstan yang menggambarkan frekuensi. Sirkumstan ‘kan beberapa kali’ menunjukkan adanya tindakan yang berfrekuensi berulang-ulang dengan hal yang sama yakni keoptimisan. Berdasarkan penjabaran itu kutipan [12] di *kompas.com* dapat diinterpretasikan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kepolisian optimis dapat mengungkap kasus penyerangan Novel hingga tuntas.

Keoptimisan pihak polri dalam menyelesaikan kasus penyerangan Novel Baswedan tersirat juga di dalam kutipan data [13] ini.

13. *Kita sudah bilang beberapa kali tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat.* (Ed. 13/6/17)

Kita	sudah bilang	beberapa kali	tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat
<i>sayer</i>	<i>Pr verbal</i>	<i>Cr. Extant</i>	<i>Verbiage</i>

Sayer yang diisi oleh pronomina persona ‘kita’ merepresetasikan pihak tim kepolisian Metro Jaya, karena kasus penyerangan NB terjadi di wilayah pengawasan Polda Metro Jaya. Penggunaan pronomina ‘kita’ haruslah melibatkan peatur dan mitra tutur, tetapi dalam konteks kutipan tersebut mitra tutur bersifat samar. Keberadaan mitra tutur tidak jelas karena dalam kutipan itu penutur yang terlibat adalah Polri dan media. Dan, media (wartawan) tidak memiliki kewenangan terhadap proses hukum Novel Baswedan. Oleh karena itu, pronomina ‘kita’ kutipan itu bersifat samar untuk pihak lain yang ikut terlibat. Proses mental mendeskripsikan suatu hal yang telah disampaikan oleh *Sayer*, Kapolda Metro Jaya. Hal yang disampaikan oleh *sayer* diungkapkan di dalam *verbiage* ‘tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat’. Di dalam *verbiage*

terdapat pemarah negasi ‘tidak’ yang menyangkal konteks yakni KPK mempertanyakan kesanggupan Polri dalam mengungkap kasus hukum Novel Baswedan. *Verbiage* berisi hal yang menyatakan bahwa tidak semua peristiwa dengan cepat dapat diselesaikan. Pernyataan langsung [13] dapat diinterpretasikan untuk menyampaikan kondisi perkembangan penanganan kasus NB kepada masyarakat dan juga meyakinkan masyarakat bahwa proses hukum tetap berjalan meski dalam kurun waktu tidak sebentar. Hal itu disampaikan agar masyarakat konsisten mempercayakan penanganan kasus penyerangan kasus NB kepada pihak kepolisian.

Tindakan yang ditempuh kepolisian dalam mengusut penyerangan terhadap senior KPK, Novel Baswedan salah satunya meminta keterangan kepada korban. Bentuk kredibilitas Polr itu terdapat di pernyataan [14] berikut ini.

14. *Penyidik menanyakan juga kepada yang bersangkutan (Novel) tentang apa yang dia sampaikan ke media-media.* (Ed. 6/11/17)

penyidik	Menanyakan	juga kepada yang bersangkutan (Novel)	tentang apa yang dia sampaikan ke media-media
<i>Sayer</i>	Pr. Verbal	<i>Reciever</i>	Circumstance: matter

Penyidik merupakan *sayer* dalam kutipan data [14] tersebut. *Sayer* melakukan tindakan verbal dalam pernyataan itu. Tindakan verbal yang dilakukan adalah menanyakan kepada pihak Novel Baswedan., sehingga proses verbal berupa ‘menanyakan’. Novel Baswedan sebagai *reiever* atau pihak yang dituju oleh *sayer*. Kutipan [14] bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyidik menanyakan hal-hal yang terkait penyerangan kepada Novel

Baswedan. Hal itu memiliki interpretasi untuk membuat masyarakat yakin bahwa pihak kepolisian telah melakukan tindakan-tindakan dalam menyelesaikan kasus penyerangan itu.

Proses mental dan proses verbal menjadi sarana bagi Polri untuk memberitahukan dan mempertahankan kredibilitas Polri. Proses mental digunakan untuk membentuk keyakinan dan konsistensi masyarakat terhadap reputasi kepolisian. Pernyataan yang terindikasi sebagai proses mental memberikan informasi mengenai harapan dan keinginan *senser* dalam konteks penanganan kasus penyerangan air keras kepada NB. Proses verbal dalam pernyataan langsung Polri berisi informasi-informasi tentang kebijakan dan perkembangan penanganan kasus penyerangan air keras Novel Baswedan. Hal-hal yang direpresentasikan oleh proses mental dan verbal dalam penjebaran sebelumnya merupakan bentuk-bentuk dari kredibilitas Polri. Bentuk-bentuk yang direpresentasikan itu menunjukkan kredibilitas yang dimiliki Polri dalam menangani kasus hukum Novel Baswedan. Akan tetapi, pernyataan langsung yang merepresentasikan bentuk kredibilitas Polri tidak dimuat dalam porsi sama di media. *Kompas.com* dan *detik.com* memiliki kecenderungan memberitakan representasi bentuk kredibilitas Polri lebih dominan daripada *tempo.co* dan *okezone.com*.

4.2.2.3 Bentuk Kooperatif dan Profesionalitas Polri

Instansi kepolisian memiliki kewenangan untuk menyidik dan menyelidiki kasus tindak pidana dan perdata. Penyerangan air keras yang melukai wajah penyidik senior KPK, Novel Baswedan, termasuk dalam tindak pidana. Dalam penanganan kasus kepolisian dituntut untuk bersikap profesional dan kooperatif.

Bentuk profesionalitas dan sikap kooperatif yang kepolisian diterpreasikan melalui pernyataan-pernyataan langsung Polri. Pernyataan langsung Polri yang terindikasi menggambarkan sikap profesional dan kooperatif yaitu yang mengandung proses relasional. Proses relasional menjadi salah satu alat linguistik untuk menginterpretasikan sikap profesional dan kooperatif tersebut.

Tindak wacana mengenai penanganan kasus teror air keras Novel Baswedan menggunakan proses relasional. Temuan bentuk proses relasional sebesar 15% dalam pernyataan langsung. Persentase itu dari perhitungan jumlah data proses relasional sebanyak 10 klausa dari keseluruhan data 69 klausa. 10 klausa yang merepresentasikan proses relasional termuat dalam media *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com*. Tetapi, di media *tempo.co* dalam data pernyataan langsung yang digunakan tidak teridentifikasi adanya representasi bentuk profesionalitas dan kooperatif Polri.

Proses relasioal tersebut menunjukkan hubungan intensitas dan hubungan perluasan yang berkaitan dengan penyerangan air keras kepada Novel Baswedan. Penggunaan proses relasional merepresentasikan bahwa Polri merupakan penegak hukum yang bersifat profesional. Representasi itu ditandai oleh penggunaan

bentuk proses relasional atributif (*relational attribute*). Relasional atributif merupakan hubungan yang mencirikan partisipannya, yaitu Polri. Berikut ini bentuk proses relasional yang merepresentasikan bentuk profesionalitas dan kooperatif pihak kepolisian dalam tindak wacana Polri.

No	<i>Carrier</i>	<i>Process:relational</i>	<i>Attribute</i>
1.	Kami semua	Adalah	transparan, maksimal soal itu
2.	Kita	Adalah	Profesional

Tabel 4.4 Proses Relasional Aributif dalam Pernyataan Langsung Polri

Bentuk-bentuk proses relasioal atributif itu merupakan temuan dalam data yang termuat di *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com*. Berdasarkan data penelitian yang digunakan, pemberitana *tempo.co* tidak ditemukan yang mengindikasikan bentuk profesionalitas dan kooperatifitas Polri. Proses relasional tersebut memiliki *carrier*, sebagai hal yang dicirikan dan *attribute*, sebagai bentuk yang dicirikan. *Carrie* dalam proses relasional atributif adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian menggambarkan instansi kepolisian dengan proses realsional. *Attribue* dalam proses relasional mencirikan instansi kepolisian. Instansi kepolsian dicirikan sebagai instansi yang profesional dan transparan. Polri bertujuan memperlihatkan bahwa mereka adalah instansi penegak hukum yang bekerja transparan dalam mengungkap kasus penyerangan air keras kepada Novel. Kepolisian juga menunjukkan adanya sikap profesionalitas yang dijunjung dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Kutipan klausa yang menunjukkan bentuk profesionaitas salah satunya berikut ini.

15. “*Kami semua transparan...*” (Ed. 22/2/18)

Kami semua	adalah	Transparan
<i>Carrier</i>	Pro: <i>relational atribute</i>	<i>Attribute</i>

Kutipan data itu menunjukkan adanya hubungan antara pihak kepolisian dan pihak lain terkait proses hukum kasus hukum Novel Baswedan. Konteks dari kutipan itu yakni adanya permintaan KPK untuk bergabung dalam proses penyidikan dan direspon oleh Polri. *Carrier* merepresentasikan pihak kepolisian yang terdiri bukan hanya perorangan akan tetapi sebagai satu lembaga hukum dengan lebih dari satu anggota (jamak). Hal yang dicirikan oleh *carrier* ‘kami’ yaitu sifat transparansi. *Attribute* ‘transparan’ merupakan adjektiva sehingga menunjukkan adanya sifat transparan yang dimiliki oleh *carrier*. Kutipan [15] dapat diinterpretasikan bahwa instansi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum bersifat transparan kepada publik terkait proses penyelidikan kasus serangan air keras terhadap Novel Baswedan. Berdasarkan temuan proses *relational attribute* dalam data menunjukkan bahwa Polri ingin menegaskan posisi, keadaan, dan kredibilitas dalam menangani kasus kepada masyarakat.

Sikap profesionalitas yang dimiliki oleh Polri ditegaskan lagi secara langsung, seperti dalam kutipan data [16] berikut ini.

16. *Kita (adalah) profesional ...*(Ed.6/11/17)

Kita	(adalah)	Profesional
<i>Carrier</i>	Pro: <i>relational attribute</i>	<i>Attribute</i>

Carrier atau penyandang dalam data [16] diwakili oleh pronomina persona jamak ‘kita’. Pronomina persona ‘kita’ merepresentasi pihak kepolisian yang dalam pernyataan [16] diungkapkan oleh Kepala Humas Polri. Pihak lain yang terlibat dalam tindak wacana bersifat samar karena mitra tutur kutipan tersebut adalah media (wartawan). Hal yang ingin disandang oleh *carrier* adalah sifat profesional.

Profesional merupakan adverbial yang dapat menandai suatu hal. Di kutipan itu dapat diinterpretasikan bahwa pihak kepolisian menegaskan secara langsung sifat yang dimiliki oleh instansi kepolisian. Pernyataan [16] menunjukkan jika *carrier*, 'kita', merupakan lembaga hukum yang memiliki profesionalitas.

Proses relasional lain yang memperkuat interpretasi bahwa Polri melakukan kinerjanya secara profesional adalah proses relasional perluasan makna atau *identifying*. Hubungan relasional perluasan makna menggambarkan hal yang dimiliki atau menerangkan satu keadaan yang berkaitan dengan kasus teror air keras kepada Novel Baswedan. Berikut ini bentuk-bentuk proses relasional yang terdapat di dalam data.

<i>No</i>	<i>Identified</i>	<i>Process:relational</i>	<i>Identifier</i>
1.	Semua orang	Punya	hak yang sama,
2.	Kami	Memiliki	kepentingan,
3.	Kepolisian	telah mempunyai	penyelesaian 60%

Tabel 4.5 Proses relasional identifikatif dalam pernyataan langsung Polri.

Temuan bentuk-bentuk proses relasional pada tabel 4.5 menunjukkan adanya penggambaran kepemilikan dan suatu keadaan yang sandang oleh *identified*. Temuan itu menunjukkan bahwa, Polri mengatakan semua orang hak yang sama terkait mendapatkan pelayanan hukum. Polri melakukan penegasan, hak untuk mendapatkan kejelasan tentang kasus penyerangan air keras bagi diri Novel Baswedan. Berknaan dengan itu, Polri mengklaim telah punya hasil investigasi penyerangan kepada Novel sebesar 60% . Proses relasional tersebut bertujuan menunjukkan progres positif yang dimiliki oleh instansi kepolisian dalam menanganani kasus air keras Novel Baswedan.

Klausa yang dapat mempertegas bahwa penilaian kinerja kepolisian yang profesional dalam menangani kasus Novel Baswedan yaitu berikut ini.

17. “*Semua orang punya hak yang sama..*” (Ed. 6/11/17)

Semua orang	punya	hak yang sama
<i>Identified</i>	<i>Pr: relational</i>	<i>Identifier</i>

Klausa data [17] menunjukkan pernyataan Polri mengenai hak warga negara Indonesia mengenai pelayanan hukum. Polri memberikan pernyataan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan sama dalam hal mendapatkan pelayanan hukum. Persepsi tersebut dilandaskan pada penggunaan *identified* ‘semua orang’ yang bersifat jamak dan merujuk pada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kesamaan hak itu juga dimiliki oleh Novel Baswedan selaku korban dalam penyerangan air keras yang mengenai wajahnya. Kutipan [17] dapat diimplikasikan bahwa Kepolisian menekankan Novel juga memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal yang ditekankan dalam kutipan itu bisa menjadi bentuk perwujudan dari sikap profesionalitas Polri terhadap proses hukum teror air keras.

Perihal lain yang ingin disampaikan oleh kepolisian melalui penggunaan alat kebahasaan yang mengandung proses *relational identifying* yaitu pencapaian penyelidikan pihak kepolisian. Pencapaian yang disampaikan lewat proses relasional sebagai berikut.

18. *Kepolisian telah mempunyai penyelesaian 60%* (Ed. 18/6/18)

Kepolisian	telah mempunyai	penyelesaian 60%
<i>Identified</i>	<i>Pr. Relational</i>	<i>Identifier</i>

Data [18] merupakan pernyataan yang termasuk jenis proses relational identifikatif. Proses relasional identifikatif tersebut memiliki *identified* berupa kepolisian. Kepolisian merupakan hal yang merepresentasikan hal yang dijelaskan oleh *identified*. *Identified* yang disebutkan dalam kutipan data [18] yaitu ‘penyelesaian 60%’. Proses relasional dalam kutipan data itu yaitu ‘telah mempunyai’. Penggunaan ‘telah’ dari segi semantis merupakan aspek semantik dari sebuah situasi yang menggambarkan adanya hasil yang didapatkan. Pernyataan itu lebih terlihat jelas pada makna ‘telah mempunyai’ yang berarti adanya sebuah hasil yang sudah dimiliki oleh *identified*. Hasil yang telah dimiliki direpresentasikan oleh ‘penyelesaian 70%, *identifier*. Keterlibatan *identifier* memperjelas hal yang dimiliki proses relasional. Kutipan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pihak kepolisian telah memiliki progres dalam menyelidiki kasus penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan sebesar 60%. Implikasi dari penggunaan klausa [q] adalah untuk menjelaskan dan menginformasikan progres yang telah dicapai kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan ke publik dengan kemungkinan tujuan untuk membangun kepercayaan terhadap loyalitas dan profesionalitas kepolisian.

Penggunaan proses relasional dalam pernyataan langsung Polri memiliki tujuan untuk mencerminkan sisi profesionalitas Polri. Di dalam proses proses relasional tersebut ditemukan bentuk-bentuk penanda yang menggambarkan profesionalitas Polri. Bentuk profesionalitas Polri dalam memproses kasus penyerangan air keras Novel Baswedan dijelaskan oleh *identified*. *Identified*

yang ditemukan, meliputi ‘transparan’, ‘profesional’, ‘maksimal’, ‘hak yang sama’, ‘penyelesaian 60%’, dan ‘kepentingan’.

Representasi bahwa Polri merupakan lembaga hukum yang menjunjung tinggi profesionalitas juga terefleksi dari penggunaan proses behavioral. Proses behavioral menunjukkan suatu perilaku Polri baik secara fisik atau psikologis. Proses *behavioural* (perilaku) yang ditemukan memiliki persentase sebesar 6% dengan 4 klausa. Klausa-klausa tersebut muncul dalam data pernyataan langsung Polri yang termuat di *kompas.com*, *detik.com*, dan *okezone.com*. Ketiga media tersebut memiliki kecenderungan lebih dominan dalam merepresentasikan bentuk sikap kooperatif Polri. Nilai 6% merepresentasikan tindakan-tindakan secara fisik atau psikologis kepolisian dalam menangani kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Berikut ini tindakan-tindakan yang direpresentasikan proses *behavioural* dari tindak wacana Polri, sebagai berikut:

No	Behaver	Process	
1.	Saksi	melihat	Penyerangan
2.	Kami	menyentuh, doakan	hal-hal teknis, semakin hebat dan semakin banyak memberikan keterangan
3.	TGPF	tidak menyentuh	hal-hal teknis

Tabel 4.6 Proses Behavioral dalam Pernyataan Langsung Polri

Proses behavioral mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku fisik atau psikologis dari *behaveer*. Perilaku fisik atau psikologis yang ditunjukkan oleh *behaveer* berkaitan dengan proses investigasi penyerangan air keras yang melukai Novel Baswedan. Hal yang ingin disampaikan kepolisian dalam pernyataan langsung diantaranya.

19. *Kami menyentuh ha-hal teknis tapi tentunya dibantu oleh masyarakat.*
(Ed.11/4/18)

Kami	menyentuh	hal-hal teknis	tapi tentunya dibantu oleh masyarakat
<i>Behaver</i>	<i>Pr. behavioral</i>	<i>Phenomenon</i>	<i>Circumstance: manner</i>

Konteks kutipan yaitu penolakan Polri akan usulan pembentukan TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) dari pihak KPK dan pihak lain. Pronomina persona ‘kami’ menempati posisi *behave*r dalam kutipan data [19]. Kami merepresentasikan pihak kepolisian mengenai kemampuan lebih mereka dalam mengusut kasus penyerangan hingga ke hal-hal teknis. Proses behavioral dalam kutipan [19] diwakili oleh verba ‘menyentuh’. Verba ‘menyentuh’ memiliki makna ada proses bersinggungan dari dua hal atau situasi. Proses behavioral yang direpresentasikan verba ‘menyentuh’ merupakan bentuk metafora. Verba ‘menyentuh’ memiliki penjabar secara implisit dalam kutipan data [19] yakni menjelaskan tindakan yang bisa dilakukan oleh pihak terkait dan kemungkinan tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Kutipan pernyataan langsung itu dapat memberikan pesan informasi bahwa pihak kepolisian memiliki kewenangan dan kemampuan untuk melakukan serangkaian investigasi.

Temuan proses *behavioural* sebesar 6% dalam data mengindikasikan Polri telah melakukan tindakan fisik atau pun psikologis selama proses pengusutan kasus serangan terhadap Novel. Polri menggunakan verba yang merepresentasikan proses *behavioural* untuk memberikan pemahaman tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh Polri. Polri memberikan pemahaman bahwa hanya instansi kepolisian yang bisa menyelesaikan kasus ini. Itu dikarenakan, Polri

memiliki sarana dan prasarana untuk melakukan investigasi kasus kriminal tindak pidana. Oleh sebab itu, Polri mengatakan TGFP (Tim Gabungan Pencari Fakta) dirasa tidak mampu. Proses behavioral mengindikasikan Polri ingin memberikan pemahaman kepada publik bahwa instansi kepolisian mampu menyelesaikan kasus tersebut didukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Dan juga, Polri mencoba untuk menunjukkan sikap kooperatif dengan mengharapkan keterangan lanjutan dari Novel Baswedan.

Berdasarkan penjabaran di atas, proses transitivitas yang ditemukan dalam data penelitian merepresentasikan bahwa; Polri merupakan penegak hukum yang bertanggung jawab; penegak hukum yang berkredibilitas; dan penegak hukum yang profesional dan kooperatif. Bentuk tanggung jawab yang ditunjukkan Polri direpresentasikan dalam proses material sebesar 40%. Bentuk kredibilitas yang dimiliki Polri direpresentasikan oleh proses mental sebesar 28% dan proses verbal 12%. Dan untuk, bentuk sikap profesionalitas dan kooperatif Polri direpresetasikan oleh prosoes relasional 14% menjadi dan proses behavioral 6%. Persentase-persentase tersebut menjadi representasi dari hal-hal yang ingin disampaikan oleh Polri terkait kinerja mereka dalam invesigasi kasus teror air keras terhadap Novel. Besaran persentasi proses material mendominasi yaitu 40%. Hal itu bisa diinterpretasikan Polri memiliki rasa tanggungjawab dan niat mengungkap kasus penyerangan air keras kepada Novel. Simpulan tersebut berdasarkan tujuan dari proses material dalam penggunaan bahasa, bahwa bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan yang bersifat konkret dari pihak *actor*. Di dalam pernyataan langsung kepolisian berjenis proses material

bertujuan untuk memberikan informasi perkembangan proses penyelidikan kasus teror air keras kepada Novel kepada masyarakat. Hal itu dapat disimpulkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi kepolisian.

Komponen trasitivitas lain yang digunakan untuk melihat hal yang ingin direpresentasikan oleh pihak kepolisian yaitu partisipan. Partisipan akan menunjukkan siapa yang terlibat dengan menggunakan bentuk leksikogramatika apa. Di dalam tindak wacana Polri terdapat dua jenis partisipan yaitu partisipan aktif dan partisipan pasif. Partisipan aktif merupakan pihak yang melakukan hal dalam wacana tersebut. Di dalam pernyataan langsung kepolisian terlihat bahwa didominasi oleh partisipan aktif. Hal itu terjadi karena representasi dilihat dari sudut pandang Polri dalam menangani penyerangan terhadap Novel. Akan tetapi, terdapat juga pronoun yang merujuk pada kepolisian menempati posisi partisipan pasif.

Partisipan memiliki pengaruh dalam tindak wacana Polri dalam hal investigasi kasus penyerangan kepada Novel Baswedan. Keberadaan partisipan menjadi penentu siapa atau apa yang melakukan suatu hal terkait kasus penyerangan air keras Novel. Partisipan aktif yang didominasi oleh kepolisian berjumlah 56 klausa. Partisipan aktif kepolisian direpresetasikan oleh berbagai penggunaan pronomina. Pronomina-pronomina persona yang digunakan dalam wacana diantaranya, 'saya', 'kita', 'kami', 'tim penyidik', 'penyidik Polda Metro Jaya', dan 'Polisi'. Pronomina personayang merujuk pada instansi kepolisian tersebut mewakili beberapa jabatan struktural dalam kepolisian, meliputi Divhumas Polri, ASOPS Polri, Kapolda Metro Jaya, Wakapolri, dan Kabareskrim

Polri. Lebih spesifiknya lagi, partisipan ‘kami’ merepresentasikan tim gabungan dari beberapa pihak kepolisian dan KPK. Tim tersebut dibentuk untuk investigasi mengungkap tersangka dibalik penyerangan air keras ke NB. Pronomina persona ‘kami’ juga merepresentasikan pihak kepolisian secara keseluruhan. Penggunaan pronomina tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pihak kepolisian menunjukkan keterlibatan instansi kepolisian dan KPK dalam menyelesaikan kasus penyerangan terhadap NB. Pronomina persona ‘kami’ merepresentasikan perwakilan tim pihak kepolisian yang menangani langsung kasus tersebut dan perwakilan Humas Polri. Hal yang dapat disimpulkan dari penggunaan pronomina persona ‘kami’ adalah Polri memperlihatkan kewenangannya dalam menyelidiki kasus kekerasan air keras terhadap Novel.

Bentuk pronomina persona lain yaitu penggunaan pronomina persona orang pertama tunggal ‘saya’. Pronomina persona ‘saya’ merepresentasikan Kapolda Metro Jaya yang bisa disimpulkan bahwa Kapolda Metro Jaya memiliki kewenangan dalam penanganan langsung investigasi kasus karena terjadi di dalam wilayah kerja Polda Metro Jaya. Partisipan ‘tim penyidik’ merepresentasikan anggota-anggota kepolisian yang dibentuk untuk memproses kasus ini. Pronomina ‘tim penyidik’ merefleksikan adanya sebuah tim yang terdiri dari beberapa anggota kepolisian dan memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan kasus penyerangan Novel Baswedan.

Tindak wacana Polri menyebutkan adanya partisipan ‘penyidik Polda Metro Jaya’. Bentuk partisipan tersebut ada di kalimat ‘*Supaya penyidik Polda Metro Jaya bisa menindaklanjutinya, informasi-informasi yang dianggap penting oleh*

saudara Novel, hendaknya disampaikan kepada penyidik (Ed. 15/6/17). Partisipan tersebut menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya memiliki sebuah tim yang bertugas untuk menindaklanjuti semua informasi berkaitan dengan progres investigasi kasus Novel.

Kepolisian juga direpresentasikan oleh bentuk partisipan pasif dalam pernyataan langsung tentang kasus itu. Temuan bentuk partisipan pasif yang merujuk pihak kepolisian ada di 3 klausa. Pronomina-pronomina personayang mewakili kepolisian yaitu 'Polri', 'saya', dan 'kepolisian'. Kata ganti orang pertama 'saya' merujuk pada Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya yang memiliki kewenangan untuk memantau kasus penyerangan terhadap Novel karena terjadi di wilayah kerja Polda Metro.

Bentuk partisipan aktif lain yang digunakan dalam pernyataan langsung Polri yaitu 'TGPF', 'Novel Baswedan', 'saksi', 'masyarakat', dan 'semua orang'. Partisipan-partisipan aktif tersebut bukanlah merujuk kepada pihak kepolisian. Bentuk partisipan itu merujuk kepada pihak lain yang memiliki hubungan langsung atau pun tidak dengan kasus penyerangan air keras Novel. Lima bentuk partisipan aktif itu memiliki rincian, partisipan 'TGPF' terdapat di 2 klausa, 'Novel Baswedan' ada di 6 klausa, 'saksi' ditemukan di 2 klausa, 'masyarakat' di 3 klausa, dan 'semua orang' hanya 1 klausa. Jumlah total klausa dengan bentuk partisipan aktif selain Polri adalah 14 klausa. Penggunaan bentuk partisipan tersebut menunjukkan 'hal-hal' yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh partisipan dalam konteks investigasi kasus ini.

Bentuk partisipan lain yang ada yaitu TGPF dan Novel Baswedan. Partisipan menjelaskan suatu hal yang dilakukan, akan dilakukan, atau tidak dapat dilakukan oleh partisipan terkait proses penanganan kasus teror air keras yang dialami oleh penyidik KPK, Novel Baswedan. Bentuk partisipan TGPF dalam pernyataan langsung kepolisian dijelaskan tidak bisa optimal dalam menangani kasus ini. Partisipan-partisipan tersebut dapat berkontribusi langsung dan tidak langsung dalam proses investigasi kasus penyerangan air keras yang melukai penyidik senior KPK, Novel Baswedan pada 11 April 2017.

Sirkumstan merupakan keterangan yang akan memperjelas sebuah proses. Temuan sirkumstan yang ada dalam pernyataan langsung Polri yaitu cara (*manner*), sebab (*cause*), masalah (*matter*), rentang (*extent*), lokasi (*location*), pandangan (*angle*), penyerta (*accompaniment*), dan lingkungan (*contingency*). Sirkumstan cara (*manner*) direpresentasikan ke dalam frasa diantaranya ‘hendaknya disampaikan kepada penyidik upaya tidak terjadi tendensi alat tudingan’. Hal itu menjelaskan suatu proses yang harus ditempuh jika Novel atau masyarakat memiliki informasi berkaitan dengan peristiwa penyerangan. Informasi tersebut harus disampaikan secara resmi kepada penyidik. ‘kalau sudah diisi dan dijawab’, sirkumstan itu menjelaskan kondisi penyidik yang akan mengambil daftar pertanyaan jika sudah dijawab oleh Novel selaku korban. Daftar pertanyaan itu merupakan satu dari beberapa proses pengumpulan bukti dan kesaksian. Frasa ‘sangat luar biasa’ menggambarkan situasi yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam investigasi kasus penyerangan kepada Novel. Sirkumstan digunakan untuk memperjelas tindakan nyata yang dilakukan oleh kepolisian.

Kepolisian menunjukkan, ketika mereka melakukan investigasi ada pihak-pihak yang memantau dan terlibat untuk menjaga kenetralan hasil investigasi tersebut. Kepolisian juga mengungkapkan kepastian ditindaklanjutinya suatu informasi jika memiliki bukti penunjang kuat. Informasi yang didapat akan diproses sesuai SOP investigasi.

Sirkumstan masalah (*matter*) memperjelas tentang suatu hal atau tindakan. Pernyataan langsung kepolisian yang memiliki frasa-frasa yang termasuk *matter*. Frasa-frasa itu meliputi, tentang apa yang disampaikan ke media, dan informasi apa. Sirkumstan itu ada di pernyataan tentang usaha kepolisian menanyakan keterangan novel yang disampaikan ke media. Kepolisian menunjukkan bahwa informasi tersebut seharusnya disampaikan ke pihak kepolisian supaya berguna. Kepolisian ingin menunjukkan bahwa pihak kepolisian akan menerima secara terbuka tanpa intervensi pihak lain semua informasi yang diberikan secara resmi.

Sirkumstan sebab (*cause*) ada beberapa frasa yang digunakan diantaranya, ‘yang tidak ada kaitannya’ dan ‘daripada informasi itu kemana-mana’. Frasa-frasa itu memperjelas situasi yang dilakukan kepolisian. Kepolisian ini menunjukkan bahwa mereka tidak asal menentukan pelaku dalam kasus penyerangan ini. Hal itu dijelaskan pada sirkumstan ‘yang tidak ada kaitannya’. Bentuk sirkumstan lain yaitu ‘daripada informasi itu kemana-mana’. Pihak penyidik kepolisian juga menghimbau agar informasi tentang terduga pelaku diberikan dalam berita acara. Hal itu untuk menghindari beredannya informasi-informasi yang tidak valid dan berakibat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, informasi –informasi dari pihak-

pihak lain sangat diharapkan, informasi tersebut bisa membantu dalam penyelesaian kasus penyerangan terhadap Novel.

Sirkumstan rentang (*extent*) berkaitan dengan periode, jarak, jumlah, dan skala. Temuan dalam data sirkumstan ditunjukkan dalam beberapa frasa yaitu 'sudah sejak awal', dan 'beberapa kali'. Frasa-frasa tersebut merepresentasikan proses penyidikan dan tindakan yang telah dilakukan selama proses tersebut. Polri menunjukkan bahwa proses penyelidikan yang sudah dilakukan berbulan-bulan mengalami progres yang baik. Kepolisian memperkuat dengan adanya pernyataan berulang bahwa mereka optimis bisa menyelesaikan kasus hingga tuntas.

Sirkumstan lokasi (*location*) mendeskripsikan tentang persoalan waktu dalam konteks investigasi kepolisian. Bentuk lokasi yang ditemukan diantaranya 'pada satu tahun lalu sejak peristiwa itu terjadi', itu menjelaskan waktu dimulainya proses pengumpulan saksi, barang bukti CCTV, dan memintai keterangan korban (Novel). Sirkumstan lokasi lain 'kemarin' yang menjelaskan permulaan waktu kapan pihak kepolisian melibatkan KPK dalam menyelidiki kasus penyerangan terhadap Novel.

Sirkumstan pandangan (*angle*) yang ditemukan ialah 'sudahlah, enggak usahlah, kita ngobrol-ngobrol saja, katanya (Novel) begitu'. Bentuk sirkumstan itu menjelaskan respon yang diperoleh kepolisian saat meminta keterangan Novel pada saat di rumah sakit. Sirkumstan lingkungan (*contingency*) menggambarkan kondisi yang menjadi penyerta wacana. Temuan sirkumstan lingkungan yang ada di pernyataan langsung kepolisian yaitu 'ketika saudara Novel Baswedan sehat'. Bentuk sirkumstan itu menggambarkan kondisi yang melingkupi pernyataan Polri.

Penggunaan bentuk partisipan dan bentuk sirkumstan dalam pernyataan langsung kepolisian mendukung pesan yang disampaikan proses. Partisipan pasif dan aktif memberikan penjelasan lebih mengenai pihak yang ‘melakukan’ dan ‘dikenai’ oleh proses. Hubungan keduanya menunjukkan bahwa dalam tindak wacana Polri, pihak yang dominan ‘melakukan’ atau ‘dikenai’ proses yaitu pihak kepolisian. Tidak hanya itu, sirkumstan yang memberikan penjelasan lebih pada pesan yang termuat oleh proses, meliputi (*manner*), sebab (*cause*), masalah (*matter*), rentang (*extent*), lokasi (*location*), *pandangan (angle)*, penyerta (*accompaniment*), dan lingkungan (*contingency*). Bentuk-bentuk sirkumstan tersebut memberikan penjelasan lebih mengenai kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK, Novel Baswedan. Temuan keterkaitan antara bentuk partisipan dan sirkumstan dalam pernyataan langsung Polri dapat diinterpretasikan sebagai cara untuk menetralsir asumsi negatif yang beredar di publik.

Penjabaran bentuk proses transitivitas, proses material, proses mental, proses verbal, proses behavioral, dan proses relasional; sirkumstan cara (*manner*), sebab (*cause*), masalah (*matter*), rentang (*extent*), lokasi (*location*), *pandangan (angle)*, penyerta (*accompaniment*), dan lingkungan (*contingency*); dan partisipan aktif serta pasif di dalam data yang telah diduksikan tersebut merupakan representasi positif dari kinerja kepolisian. Representasi yang bermuatan positif dari kinerja Polri ditunjukkan oleh adanya bentuk tanggungjawab, bentuk kredibilitas, dan bentuk sikap kooperatif serta profesionalitas dari Polri dalam menangani kasus teror air keras Novel Baswedan. Persepsi itu dapat muncul dalam

pernyataan langsung Polri yang muncul di media *kompas.com*, *detik.com*, *okezone.com*, dan *tempo.co*.

Namun media *kompas.com*, *detik.com*, *okezone.com* dan *tempo.co* memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memberitakan representasi positif dari kinerja Polri. Berdasarkan data yang digunakan, media *kompas.com* dan *detik.com* menjadi media dominan dalam memberitakan representasi positif itu. Dari 42 total kutipan pernyataan langsung Polri dalam bentuk kalimat dan paragraf teridentifikasi bahwa 36 kutipan termuat di *kompas.com* dan 20 kutipan termuat dalam *detik.com*. Kutipan data yang termuat *kompas.com* dan *detik.com* teridentifikasi merepresentasikan proses material, verbal, mental, behavioral, dan realasional. Kecenderungan itu berbeda dengan media *okezone.com* dan *tempo.com* dalam data yang digunakan. Media *okezone.com* hanya terdapat 8 kutipan pernyataan langsung yang merepresentasikan proses mental, material, dan proses verbal. Hal itu serupa dengan kutipan yang termuat di *tempo.com*, sejumlah 5 kutipan pernyataan langsung Polri. Kutipan tersebut teridentifikasi hanya terdapat representasi prosesmental.

Kecenderungan kutipan data yang termuat dalam media berbeda-beda dapat disebabkan oleh keberpihakan media terhadap pemberitaan. Media dituntut untuk independen dalam memberitakan suatu peristiwa, termasuk kasus teror air keras Novel. Tetapi, ideologi yang dimiliki oleh masing-masing media dapat mempengaruhi keberimbangan media dalam memberitakan suatu peristiwa. Hal itu terlihat dari permasalahan representasi kinerja Polri yang dilihat dari perspektif

Polri. Dalam merepresentasikan kinerja tadi, kecenderungan media dalam mengambil sisi pemberitaan terlihat dari temuan-temuan yang telah dijabarkan di atas. Dominasi jumlah kutipan yang muncul pada media *kompas.com* dan *detik.com* dapat direpresentasikan bahwa kedua media tersebut memiliki kecenderungan lebih besar dalam merepresentasikan secara positif kinerja Polri. Hal itu berbeda dengan media *okezone.com* dan *tempo.com* yang memiliki kecenderungan lebih kecil dalam merepresentasikan positif kinerja Polri.

Represetasi positif mengenai kinerja kepolisian dalam proses hukum teror air keras yang masih berjalan tidak dapat menjadi interpretasi mutlak. Interpretasi positif mengenai kinerja Polri tidak bisa mutlak karena proses hukum kasus teror itu masih berjalan hingga sekarang, September 2019. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kutidakmutlakan represetasi kinerja Polri adalah persepsi yang dilontarkan pihak lain, KPK, DPR, Novel Baswedan, LSM yang memberikan respon terhadap kinerja Polri.

Berdasarkan data yang telah dihimpun dari media *kompas.com*, *detik.com*, *okezone.com*, dan *tempo.co* memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Media *kompas.com* dan *detik.com* dalam memberitakan kinerja Polri dalam kasus Novel Baswedan cenderung ke arah positif. Kecenderungan pemberitaan positif dapat terlihat dari bentuk-bentuk representasi kinerja tersebut termuat oleh kedua media tersebut. Kecenderungan positifnya representasi tersebut muncul karena dilihat dari segi pernyataan langsung kepolisian. Pernyataan tersebut muncul sebagai bentuk respon terhadap negatif terhadap kinerja Polri. Salah satu bentuk asumsi

negatif tersebut muncul di pemberitaan *detik.com* yang diutarakan oleh Wakil Ketua Komnas HAM, M Nurhkhairon, 10 Agustus 2017.

20. “*Kami melihatnya cenderung lambat. Meski ada keterlambatan, kami masih melihat, ya kita dorong saja supaya dapat menyelesaikan*” (10/8/17)

Kami	melihatnya	cenderung lambat
<i>Behaver</i>	<i>Pr behavioural</i>	<i>Phenomenon</i>

Pernyataan tersebut merupakan salah satu bentuk kontradiktif dari representasi kinerja Polri yang cenderung positif. Hal itu dikarenakan partisipan ‘kami’, Komnas Ham’ memiliki anggapan bahwa proses hukum dari kasus Novel tidaklah cepat. Penilaian komnas HAM tersebut direpresentasikan oleh *phenomenon* ‘cenderung lambat’ yang merujuk pada kinerja kepolisian. Akan tetapi, dalam di dalam pernyataan tersebut komnas HAM juga masih mendukung upaya yang dilakukan Polri. Salah satu pernyataan dari pihak Komnas HAM tersebut akan menjadi kontradiktif dengan representasi kinerja Polri dalam hal kredibilitas. Adanya pernyataan tersebut dapat memicu munculnya keraguan publik terhadap kinerja Polri, sehingga akan berimbas pada kredibilitas Polri. Pernyataan sebut mengandung unsur negatif terhadap kinerja Polri yang dikatakan lambat.

Media lain yang cukup kritis terhadap pemberitaan kasus ini adalah *tempo.co*. Jika dilihat dari data yang dihimpun berdasarkan pernyataan langsung Polri terkait kinerjanya yang cenderung positif, media *tempo.co* memiliki kecenderungan yang paling rendah. Dari total data kutipan pernyataan langsung Polri yang dimuat oleh *tempo.co* hanya berjumlah 5 pernyataan. Pemberitaan pada *tempo.co* terkait kinerja Polri cenderung melihat dari sisi pihak lain, selain kepolisian. Oleh sebab

itu muncul beberapa pemberitaan yang isinya kontradiktif tentang kinerja Polri, seperti berikut ini.

21. *“kita sudah begitu maju dan mengetahui bahwa ada tarik-menarik kepentingan penengak hukum” (8/7/17)*

Kutipan pernyataan tersebut disampaikan oleh koordinator Kontras Haris Anzar pada *tempo.co*. pernyataan itu menggunakan partisipan ‘kita’ yang meruju pada pihak Kontras dan juga dapat diimplikasikan sebagai bentuk persuasi kepada masyarakat. Konteks yang melatarbelakangi kutipan tersebut adalah hilangnya sidik jari para pelaku pada cangkir air keras. Haris berpendapat bahwa fokusnya bukan kepada siapa pemilki sidik jari, tetapi pada siapa yang menghapus sidik jari tersebut, ‘*sidik jarinya itu siapa yang hapus? Atas kepentingan siapa dan siapa yang bertanggungjawab, struktur komandonya?*’. Penyataan-pertanyaan itu muncul sebelum pernyataan yang diutarakan harus dapat menimbulkan keraguan pada publik atas kinerja Polri. Penggunaan verba ‘*tarik-menarik*’ juga menimbulkan dapat menimbulkan pemikiran yang bertolak belakang mengenai representasi kinerja Polri yang positif. Hal itu dikarenakan, ‘*tarik-menarik*’ memiliki nilai semanti negatif dimana menggambarkan keadaan yang tidak tetap dan cenderung ada unsur kesengajaan. Pernyataan tersebut dapat menimbulkan keraguan dalam sikap profesionalitas dan kooperatif. Pernyataan itu merupakan salah satu bentuk pemberitaan kinerja Polri yang kontradiktif dengan representasi kinerja Polri yang cenderung positif. Media *tempo.co* cenderung memberitakan dari sudut luar Polri mengenai kasus ini, sehingga memunculkan pernyataan yang kontradiktif dari repesenatsi kinerja Polri.

Suatu hal yang kontradiktif juga muncul dari pemberitaan *okezone.com* yang berisi tentang pendapat Abraham Samad tentang pentingnya pembentukan TGPF. Hal serupa mengenai pembentukan TGPF juga pernah disampaikan oleh Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Danhil nazar, di *detik.com* 3 Januari 2018. Konteks yang melingkupi pernyataan itu ialah kasus Novel sudah berumur 1 tahun akan tetapi pelaku dan motif belum terungkap.

22. “*Kalau tidak dibentuk saya yakin kasus ini tidak akan pernah terungkap dan kalau ini tidak terungkap maka akibatnya akan semakin parah. Tidak ada jaminan bagi penyidik KPK bahkan pimpinan tidak akan terkena seperti yang dialami Novel*” (Ed. 12/4/18)

Pada kutipan tersebut mengandung pemarkah proses mental pada klausa ‘saya yakin kasus ini tidak akan pernah terungkap’. *Senser* dari klausa itu adalah pihak Abraham Samad. Dan pemarkah proses mental direpresentasikan oleh ‘yakin’ yang merujuk pada sebuah keyakinan yang dimiliki oleh *senser*. Hal yang diyakini oleh *senser* ialah keadaan tidak akan terungkapnya kasus itu, teror air keras Novel, kalau tidak dibentuk TGPF. Pernyataan Abraham yang berisi keyakinannya tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Polri mengenai keberadaan TGPF. Pernyataan Polri tersebut berbunyi ‘*TGPF sudah banyak dibentuk, dalam case-case tertentu tapi tidak sekali lagi tidak optimal perannya*’ (Ed. 11/4/18). Implikasi dari pernyataan mantan ketua KPK tersebut dapat menyangsikan keberhasilan temuan penyelesaian kepolisian sebesar 60%. Dan juga, dapat mematahkan representasi positif yang muncul dari bentuk-bentuk tindakan Polri yang mencerminkan kredibilitas dan profesionalitas.

Berdasarkan analisis representasi kinerja kepolisian sebagai penegak hukum yang legal ditemukan beberapa bentuk representasi yaitu, tanggungjawab, kredibilitas, sikap kooperatif dan profesionalitas. Akan tetapi, representasi tersebut tidaklah bersifat mutlak karena proses hukum kasus ini masih berjalan hingga sekarang, 2019. Sifat tidak mutlak tersebut juga muncul karena ada pernyataan pihak-pihak lain yang kontradiktif dengan pernyataan kepolisian. Pernyataan-pernyataan kontradiktif tersebut tidaklah bertolakbelakang secara spesifik dan mutlak dengan setiap bentuk representasi kinerja. Oleh sebab itu keberadaan pernyataan yang kontradiktif juga tidak dapat secara absolut merepresentasikan negatif kinerja Polri.

Pernyataan yang bersifat kontradiktif terhadap representasi kinerja Polri cenderung muncul pada media *tempo.co*. Media *tempo.co* memiliki kecenderungan lebih banyak memberitakan dari pihak selain Polri. Hal itu terbukti dari jumlah data yang mengandung representasi positif Polri, *tempo.co* memiliki jumlah terendah. Pilihan bahasa yang digunakan *tempo.co* memiliki kecenderungan lebih tajam dan persuasif. Media *kompas.com* dan *detik.com* cenderung memberitakan dari segi penegak hukum kepolisian, sehingga data dari kedua media tersebut lebih banyak muncul. Meskipun *detik.com* juga memberitakan informasi yang bersifat kontradiktif dengan kinerja Polri akan tetapi kecenderungannya lebih kecil. Dan *okezone.com* dalam memberitakan lebih cenderung berimbang dari beberapa pihak.

4.2.2 Relasi Kuasa dalam Tindak Wacana Polri tentang Kasus Novel Baswedan

Interpretasi dilakukan dengan menarik hubungan informasi yang terkandung di dalam deksripsi teks dengan hal yang ‘diketahui’ atau ditafsirkan peneliti. Komoponen *members resource* yang dimiliki akan mempengaruhi hasil interpretasi wacana, termasuk tindak wacana Polri terkait kasus teror air keras Novel Baswedan. Temuan hasil deskripsi data dan interpretasi data tentang representasi kinerja Polri yaitu pernyataan langsung Polri menyiratkan adanya bentuk tanggungjawab, bentuk kredibilitas, bentuk sifat kooperatif dan profesionalitas yang dimiliki Polri. Bentuk-bentuk representas kinerja Polri tersebut dapat diinterpretasikan juga sebagai implikasi adanya relasi kuasa yang dibangun lewat wacana.

Wacana pernyataan langsung kepolisian yang termuat di portal berita *online kompas.com, detik.com, okezone.com, dan tempo.co* memunculkan adanya relasi kuasa (*power relations*) yang coba dibangun. Relasi kuasa muncul dikarenakan ada dominasi salah satu pihak antara kepolisian dan Novel Baswedan sebagai korban. Di dalam konteks wacana ini, Polri merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menuntaskan kasus teror air keras Novel Baswedan karena termasuk tindak hukum pidana. Berdasarkan konteks tersebut, posisi Polri relatif lebih mendominasi dari pada korban (Novel) dalam kasus tersebut. Korban di dalam proses kasus hukum ini menjadi pihak yang bergantung pada hasil kinerja

kepolisian. Adanya perundang-undangan yang menaungi tugas Polri menjadi dasar tindakan kepolisian.

Pernyataan langsung pihak kepolisian juga menyiratkan adanya relasi kuasa Polri dengan pihak lain, seperti KPK dan Masyarakat. Kepemilikan kekuasaan lebih Polri menimbulkan adanya dominasi kekuasaan antara Polri dengan kedua pihak tersebut. Hubungan antara Polri dengan KPK dan masyarakat dalam kasus hukum Novel Baswedan dapat mengimplikasikan adanya sinergisitas. Keberadaan relasi kuasa tersebut dibangun melalui bahasa dan peran media sebagai sarana penyebaran tindak wacana Polri. Media *kompas.com*, *detik.com*, *okezone.com*, dan *tempo.co* memiliki kewenangan untuk melakukan penyutingan terhadap teks sehingga berimbas pada produksi teks berita yang akan interpretasi pembaca. Relasi kuasa yang dibangun Polri melalui bahasa dan peran media akan dideskripsikan di bawah ini.

4.2.2.1 Relasi Polri dengan Novel Baswedan

Legalitas tugas dan fungsi kepolisian diatur oleh UU no 2 tahun 2002 yang berisi 45 pasal. Pasal 2 secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tindak wacana Polri yang berkaitan dengan proses hukum teror air keras Novel mencerminkan adanya hubungan antara Polri dengan masyarakat dan Polri dengan korban (Novel). Keberadaan peraturan yang mengatur tugas Polri membuat secara struktural Polri memiliki kekuasaan (*power*)

yang lebih dari pihak korban atau masyarakat. Relasi kekuasaan Polri dapat diidentifikasi melalui penggunaan proses, sirkumstan, dan partisipan dari pernyataan langsung Polri yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dari tanggungjawab, kredibilitas, sikap kooperatif dan profesionalitas Polri.

Interpretasi adanya relasi kuasa yang ingin ditunjukkan Polri juga dapat tercermin dalam penggunaan pemarkah *mood*. Penggunaan klausa yang memiliki dapat diimpilkasikan adanya hal yang ingin ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Hal yang ingin ditunjukkan tersebut dapat memberikan citra positif bagi pihak kepolisian. berdasarkan data terdapat 19 kalimat yang teridentifikasi menggunakan sistem *mood*. Data pernyataan kepolisian ditemukan adanya *mood* delaratif dan interogatif. *Mood* deklaratif mendominasi dalam pernyataan kepolisian. *Mood* tersebut direpresentasikan dengan penggunaan modal ‘akan’ dan ‘harus’. Penggunaan modal ‘akan’ dan ‘harus’ dalam kalimat pernyataan berhubungan dengan pihak kepolisian sebagai subjek. Berikut ini pernyataan langsung kepolisian yang mengandung unsur mood.

23. “*Makanya kita akan ke sana memeriksa yang bersangkutan.*” (Ed. 2/8/17)

Penggunaan modal ‘akan’ merepresentasikan kepastian bahwa pihak penyidik kepolisian menyelidiki kasus teror kepada Novel Baswedan. Penggunaan modal ‘akan’ juga memperjelas posisi kepolisian yang memiliki kewenangan penuh dalam menyelidiki kasus itu. Berdasarkan penggunaan modal ‘akan’ yang dalam gramatikal Bahasa Indonesia termasuk jenis modalitas intensional yang menyatakan makna ‘keakanan’. Makna ‘keakanan’ tersebut mengandung anggapan bahwa Polri memiliki kuasa dan kewenangan dalam melakukan proses

pemeriksaan. Oleh sebab itu, kepolisian dilegalkan melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyelidikan termasuk meminta kesaksian korban.

Modal ‘harus’ dalam data berkaitan dengan penyampaian informasi-informasi apapun yang berhubungan dengan kasus penyerangan kepada Novel. Penjabaran itu ditunjukkan dalam kutipan pernyataan berikut ini.

24. “*Apa yang mendukung pernyataan Novel **harus** diserahkan ke polisi.*”(Ed. 15/6/17)

Modal ‘harus’ merepresentasikan sebuah aturan baku yang bersifat mengikat bahwa informasi apapun jika berkaitan dengan sebuah kasus harus di BAP. Hal itu dilakukan supaya informasi tersebut investigasi lebih lanjut oleh penyidik. Mood dalam kalimat deklaratif tersebut menggambarkan kekuasaan Polri dalam konteks penanganan kasus yang menimpa Novel Baswedan. Modalitas ‘harus’ yang dapat menggambarkan kekuasaan Polri dalam konteks itu karena ‘harus’ adalah modalitas epistemik. Bentuk modalitas epistemik ‘harus’ dalam gramatikal Bahasa Indonesia memiliki makna ‘keharusan’. Berdasarkan hal itu, penggunaan modal ‘harus’ dapat menggambarkan secara eksplisit kekuasaan yang dimiliki oleh Polri dalam proses penanganan teror air keras terhadap Novel Baswedan.

Bentuk *mood* interogatif direpresentasikan dalam bentuk modal ‘akan’. Kalimat interogatif berisi pertanyaan langsung yang diajukan kepolisian kepada pihak kedua atau ketiga terkait kasus penyerangan air keras. Berikut data yang menandung unsur mood interogatif.

25. *Kalau diberikan kepada penyidik, kita akan teruskan, kita akan selidiki, benar enggak?* (Ed. 15/6/17)

Berdasarkan *mood* interogatif menggambarkan bahwa ada kekuasaan yang dimiliki Polri untuk mengambil tindakan terkait kasus tersebut. Pemarkah modal ‘akan’ merupakan modal intesional yang menyatakan keinginan terhadap suatu hal. ‘akan’ dari segi aspektualitas bermakna adanya sebuah proses yang belum selesai dan memiliki tujuan yang pasti. Akan tetapi, dalam mencapai tujuan proses tersebut partisipan sudah melakukan suatu langkah.

Penggunaan modal dalam tindak wacana Polri dapat diimplikasikan adanya kewenangan yang dimiliki Polri dan bersifat legal. Kewenangan Polri menyiratkan adanya kekuasaan (*power*) yang dimiliki. Hal itu dapat dibuktikan pada penggunaan bentuk partisipan yang diikuti pemarkah modal tersebut. Bentuk partisipan yang ada berupa ‘kita’ dan ‘kami’. Kedua partisipan tersebut merujuk pada kepolisian berdasarkan konteks wacana yang melingkupi. Tetap, dalam penggunaan ‘kita’ terdapat kesamaran pihak kedua yang terlibat karena mitra tutur di dalam konteks itu adalah media. Dan media atau kemungkinan merujuk pada wartawan dan masyarakat tidak memiliki kewenangan legal dalam proses hukum kasus itu.

Bentuk-bentuk modal tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa ‘suatu hal’ tujuan itu dapat dilakukan oleh partisipan, Polri. *Mood* akan menunjukkan keberadaan posisi penutur yaitu Polri di dalam wacana tersebut. Posisi Polri dalam kasus tersebut memiliki *power* jika dibandingkan dengan korban, Novel Baswedan, ataupun pihak lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh Polri untuk

melakukan tindakan-tindakan seperti terrepresentasi pada kalimat dengan mood sistem bersifat legal dan akuntabel.

Legalitas dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Polri sebagai bentuk dari relasi kuasa antara Polri dengan korban (Novel). Hubungan antara Polri dengan korban (Novel) dalam konteks kasus ini yaitu terdapat ketergantungan pihak korban dalam menuntut keadilan dan kebenaran atas kasusnya. Korban hanya bisa menggantung kebenaran kasusnya pada kepolisian sebagai lembaga yang berwenang menyidik. Akan tetapi, realita yang ada kebenaran mengenai kasus teror tersebut belum terungkap dan kasus itu masih berjalan proses hukumnya. Tenggang waktu yang relatif lama sempat memunculkan asumsi dari korban (Novel) tentang adanya oknum mencoba melindungi terungkapnya kasus tersebut. Posisi kekuasaan Polri yang lebih dominan dalam konteks wacana ini menimbulkan hubungan yang tidak begitu baik antara Polri dengan korban. Atas dasar legalitas atas tindakan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penyelidikan memunculkan sebuah citra negatif bagi korban (Novel).

Pandangan negatif yang bisa melekat pada Novel terlihat dari penggunaan koherensi lokal. Koherensi lokal ialah hubungan antar bagian di dalam teks. Pernyataan langsung Polri yang dimuat di media massa *kompas.com*, *detik.com*, dan *tempo.co* menggunakan negasi '*janganlah*' untuk menegaskan suatu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Berikut ini kutipan yang mengandung konjungsi penegasan:

26. “Ada informasi apa, kamu sini kasih ke saya, saya akan ungkap maksimal, ada enggak? Janganlah ini terus digulir-gulirkan, enggak boleh. Kami maksimal soal itu.”(Ed. 13/6/17)

Pihak Polri menggunakan pilihan kata *informasi* untuk mendeskripsikan adanya informasi terkait kasus teror air keras yang tidak disampaikan secara resmi ke kepolisian. Informasi terkait dugaan keterlibatan oknum jenderal dalam peneroran NB diterbitkan oleh majalah *TIME* edisi 13 Juni 2017 dalam wawancara eksklusif dengan NB. Polri menghimbau agar siapapun yang memiliki informasi terkait kasus tersebut hendaknya disampaikan resmi ke kepolisian. Informasi tersebut di BAP sehingga dapat ditangani secara maksimal.

Pernyataan langsung kepolisian tersebut juga menggunakan negasi *janganlah*. Negasi *janganlah* merupakan penanda imperatif kalimat itu menegaskan bahwa apapun bentuk informasi tersebut disampaikan resmi supaya tidak bergulir tanpa pertanggung jawaban. Penggunaan *janganlah* merupakan bentuk larangan yang ditunjukkan pada informasi yang representasikan oleh kohesi katafora berupa pronomina demonstratif ‘ini’. Kohesi katafora menunjukkan adanya kesinambungan antara pernyataan langsung tersebut dengan informasi yang berada di luar pernyataan itu. Pronomina demonstratif ‘*ini*’ merujuk pada pernyataan yang diucapkan Novel dalam wawancara dengan majalah *Time*. Salah satu pernyataan Novel yang dimuat di dalam *Time*, berikut ini.

27. “I’ve actually received information that a police general — a high level police official — was involved. At first I said the information was false. But now that it’s been two months and the case hasn’t been resolved, I said [to the person who made the allegation] the feeling is that the information is correct,” (13/6/17).

Pernyataan Novel Baswedan tersebut dilakukan dalam sesi wawancara dengan reporter Jonathn Emont sewaktu Novel menjalani perawatan di Singapura. Wawancara eksklusif terhadap Novel dimuat dengan judul *I Don;t Want to Be Sad: Indonesian's Top Graft Buster Talks to Time From His Hospital Bed*. Di dalam wawancara tersebut, Novel menceritakan kemungkinan adanya anggota kepolisian berpangkat tinggi yang terlibat dalam penyerangan dirinya. Novel sempat meragukan informasi keterlibatan anggota kepolsian. Akan tetapi, lambat lain Novel mulai mempercayai karena selama dua bulan investigasi, pelaku dan motif penyerangan belum terungkap. Informasi yang diucapkan mengenai keterlibatan anggota kepolisian mendapatkan respon dari pihak kepolisian. Kepolisian memberikan tanggapan terhadap informasi Novel yang beredar di media agar tidak menjadi tuduhan tanpa dasar. Pengakuan Novel Baswedan kepada media internasional dapat memberikan dampak buruk terhadap tingkat kepercayaan instansi kepolisian di mata publik.

Penggunaan negasi *janganlah* pada kalimat imperatif menunjukkan adanya upaya untuk melarang. Kalimat '*janganlah ini terus digulir-gulirkan, enggak boleh. Kami maksimal soal itu*' menunjukkan bahwa Polri melarang ,informasi terkait dugaan keterlibatan anggota kepolsisan berpangkat tinggi, untuk tidak bebeas disampaikan ke media. Penggunaan negasi *janganlah* juga bisa diinterpretasikan bahwa tindakan yang dilakukan Novel Baswedan tersebut tidaklah benar. Informasi yang dimiliki Novel Baswedan mengenai dugaan keterlibatan anggota kepolisian seharusnya diberikan kepada tim penyidik agar bisa ditindaklanjuti. Penggunaan negasi *janganlah* bisa memberikan pandangan

negatif kepada korban, Novel Baswedan. Interpretasi itu juga adanya penggunaan negasi ‘*enggak*’, ‘berarti ‘tidak’ dalam bahasa Indonesia baku, yang merujuk pada kondisi wawancara Novel Baswedan di media *Time*. Penggunaan ‘*enggak*’ menunjukkan adanya kondisi yang tidak seharusnya dilakukan akan tetapi dilakukan. Oleh sebab itu, penggunaan ‘*janganlah*’ dan ‘*enggak*’ dalam pernyataan langsung Polri dapat memberikan pandangan negatif kepada pihak korban, Novel Baswedan. Persepsi negatif yang merujuk kepada Novel Baswedan karena ia melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.

Berdasarkan tindak wacana Polri dalam merepson pernyataan Novel dalam wawancara majalah *Time* merefleksikan relasi kuasa yang diciptakan Polri. Pemilihan kata yang nada negasi dapat menjadi penanda bahwa Polri lebih berhak untuk menerima informasi tersebut lebih dahulu. Akan tetapi, kondisi tersebut kontradiktif dengan realita saat Novel (korban) mengaku bahwa ia mengetahui adanya pihak yang mencoba melindungi kasusnya. Kondisi tersebut memicu munculnya pernyataan Polri sebagai bentuk respon terhadap wacana Novel. Situasi tersebut dapat mengimplikasikan adanya penilaian bahwa korban (Novel) tidak bersikap kooperatif dan meragukan proses hukum pihak kepolisian. Bentuk interpretasi tersebut akan membawa dampak positif bagi kepolisian sebagai lembaga hukum agar tetap terjaga kredibilitasnya di mata publik. Dampak realsi kuasa yang terbangun juga akan menimbulkan interpretasi bahwa Polri bersikap kooperatif terhadap masukan dan pernyataan korban (Novel). Akan tetapi, publik juga akan mempertanyakan keberanan informasi yang diungkapkan Novel. Dan

situasi tersebut dapat memunculkan keraguan terhadap independensi pihak kepolisian dalam proses hukum Novel Baswedan.

Tindak wacana Pori menyiratkan adanya realisasi yang ingin coba dibangun antara Polri dengan pihak korban, Novel Baswedan. Penggunaan pemarkah modal dan pronomina sebagai bentuk adanya kuasa yang dominan dari pihak kepolisian. Bentuk-bentuk pemarkah modal dan partisipan tersebut menunjukkan kewenangan legal yang dimiliki oleh kepolisian. Legalitas Polri melakukan berbagai tindakan sebagai upaya penyelidikan dan penyidikan diatur oleh undang-undang. Landasan peraturan tersebut dapat menyebabkan adanya upaya pembentukan citra negatif korban. Atribut Polri sebagai lembaga hukum yang legal secara struktural memberikan kuasa yang relatif dominan dalam konteks proses hukum teror terhadap Novel Baswedan.

4.2.2.2 Relasi Polri dengan Masyarakat

Sinergis berhubungan dengan keterlibatan pihak lain, selain korban, dalam proses pengungkapan pelaku dan motif peristiwa teror air keras Novel. Polri sebagai pihak yang memiliki kewenangan lebih dalam kasus ini dapat menolak atau menerima kerja sama pihak lain pengungkapan kasus. Bentuk penolakan atau penerimaan Polri terhadap keikutsertaan pihak lain akan mencerminkan hubungan Polri dengan pihak tersebut. Posisi Polri yang relatif lebih dominan juga akan berhubungan dengan interpretasi terhadap hubungan Polri dan pihak-pihak lain dalam hal kesinergisan.

Teks tindak wacana Polri yang telah dideskripsikan memperlihatkan beberapa bentuk hubungan Polri dengan pihak lain. Hubungan tersebut berkaitan dengan pengungkapan kasus teror air keras Novel Baswedan. Bentuk hubungan tersebut dapat terlihat dari penggunaan pemarkah proses relasional. Proses relasional merepresentasikan bentuk sikap kooperatif dan profesionalitas dari kinerja kepolisian dalam menangani kasus yang belum selesai ini. Di dalam salah satu kaimat pernyataan yang menggunakan pemarkah relasional '*kami semua (adalah) transparan, nanti bisa mengetahui dari awal sampai akhir prosesnya*' Kutipan tersebut muncul ada pemberitaan *kompas.com* pada 22 Februari 2018. Atribut 'transparan' sebagai bentuk sinergisitas pihak lain. Pihak lain yang dimaksudkan adalah pihak KPK dan masyarakat. Sinergisitas Polri dengan pihak KPK untuk mengungkap kasus ini juga terepresentasi dari kutipan lain berikut.

28. "*Kami tetap melibatkan, kemarin sudah melibatkan KPK, kemudian hotline dan ribuan juga sudah ada SMS dan kemudian juga anggota penyidik KPK ikut juga*" (22/2/18)

Kutipan itu muncul di *kompas.com* pada edisi 22 Februari 2018 dan mengikuti kutipan yang menyatakan Polri transparan. Dari kutipan tersebut dapat diinterpretasi adanya hubungna kooperatif antara Polri dengan KPK. Hal itu dikarenakan adanya keterlibatan KPK, sebagai tempat Novel bertugas, dengan lembaga kepolisian sebagai pihak yang memproses kasus itu. Situasi Polri yang meminta pihak anggota KPK ikut menjadi bukti keterbukaan dan ketransparanan proses hukum kasus terhadap pihak KPK. Selain itu, dalam kutipan itu terepresentasi pula dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh Polri. Dominasi Polri dalam kasus ini terlihat dari penggunaan kata kerja aktif 'melibatkan'

mengindikasikan adanya kegiatan yang mengikutsertakan suatu pihak. Polri yang direpresentasikan '*kami*', Kabid Humas Polda Metro, secara terang-terangan dan terbuka mengikutsertakan pihak KPK. Penggunaan verba aktif itu juga dapat diimplikasi sebagai wujud adanya kekuasaan dominan yang dimiliki oleh Polri dalam proses hukum kasus ini.

Kekuasaan Polri sebagai lembaga hukum juga terlihat dari upaya melibatkan masyarakat luas. Bentuk kesinergisan Polri coba dibangun dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan informasi terkait kasus. Hal itu dapat diungkap lewat bagian kutipan *kompas.com* edisi 22 Februari 2018 di atas, yang menyatakan '*hotline dan ribuan juga sudah ada SMS*'. Kutipan tersebut dapat diimplikasikan adanya upaya Polri untuk memfasilitasi pengaduan informasi dari publik yang berkaitan dengan pengungkapan kasus hukum Novel. *Hotline* menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan informasi yang mereka miliki. Pembukaan *hotline* dan penerimaan pesan singkat dapat menjadi salah satu bukti bahwa Polri melakukan keterbukaan dan melibatkan masyarakat dalam mengungkap kasus yang belum selesai ini.

Hasil dari deskripsi teks dari wacana Polri yang telah dianalisis menunjukkan adanya hubungan yang coba dibangun oleh Polri. Polri dalam menangani kasus Novel Baswedan mencoba melibatkan unsur masyarakat dan pihak KPK. Pelibatan unsur KPK dan masyarakat mengindikasikan adanya sikap kooperatif dan transparansi Polri. Polri berupaya untuk sinergi dengan beberapa pihak terkait. Upaya yang dilakukan oleh Polri dapat juga memberikan citra positif

terkait pencapaian proses kinerja Polri. Bentuk sinergisitas Polri juga dapat mendukung penilaian masyarakat tentang konsistensi Polri. Hal itu dikarenakan upaya sinergisitas Polri dengan pihak lain dapat menjadi tolok ukur tingkat kekonistenan Polri dalam menangani kasus teror Novel Baswedan.

Konsistensi Polri dalam memproses kasus penyerangan air keras yang menimpa Novel dapat diidentifikasi dengan penggunaan sirkumstan rentang (*extent*). Sirkumstan rentang menggambarkan jarak waktu yang berkaitan dengan pesan dalam proses. Terdapat temuan sirkumstan rentang yang direalisasikan dalam keterangan waktu ‘sudah sejak awal’ dan ‘sampai hari ini’. Kedua sirkumstan tersebut muncul dalam dua pernyataan langsung yang berbeda waktu. Keterangan yang menggambarkan waktu terdapat di data nomor 5 ‘sudah sejak awal’. Bentuk itu muncul pada terbitan 17 Juni 2017 yang diutarakan oleh Kabareskrim Polri. Sirkumstan bentuk tersebut menjelaskan keadaan bahwa proses investigasi kasus penyerangan telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak awal. Pernyataan tersebut juga kembali diulang di pernyataan langsung yang dilontarkan oleh Kapolda Metro Jaya pada 14 Mei 2018. Ujaran yang dilontarkan oleh partisipan berbentuk keterangan waktu berupa ‘sampai hari ini’. Partisipan yakni Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa penyidik terus berusaha dan bekerja keras hingga hari pernyataan langsung tersebut dilontarkan. Adanya jeda waktu dan kesamaan isi pesan yang terkandung di dalam sirkumstan rentang dapat diinterpretasikan adanya sebuah konsistensi tindakan. Penggunaan dua bentuk sirkumstan tersebut dalam dua waktu berbeda dan partisipan berbeda menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Polri merupakan hal yang

konsisten. Polri konsisten dalam melaksanakan tugas menginvestigasi kasus penyerangan terhadap Novel guna mengungkap pelaku dan motif.

Penilaian mengenai konsistensi Polri perihal kinerjanya dapat diperkuat dengan adanya pernyataan langsung yang termasuk proses relasional. Di dalam proses relasional terdapat leksikogramatikal yang mengidentifikasi pencapaian pihak kepolisian. Leksikogramatikal itu bentuk frasa '*penyelesaian polisi 60 %*' (Ed. 18/6/18). Kemunculan frasa di media yang terbit 18 Juni 2018 menunjukkan adanya progres yang telah dicapai oleh pihak kepolisian. Progres yang telah dicapai selama kurun waktu kurang lebih setelah 14 bulan adalah 60%. Persentase angka 60% menjadi alat untuk menerangkan penyelesaian yang diperoleh kepolisian.

Relasi kuasa yang relatif dominan dalam pengusutan kasus hukum Novel Baswedan dapat memunculkan berbagai pandangan di masyarakat. Atribut Polri sebagai lembaga hukum diatur undang-undang legalitasnya menjadikan Polri memiliki beberapa keuntungan dalam konteks ini. Keuntungan itu berbentuk kewenangan Polri untuk melakukan tindakan penyidikan dan penyelidikan, seperti mendapatkan kesaksian korban, saksi, memeriksa TKP, menghimpun kesaksian dari publik, dan melibatkan pihak terkait dalam proses hukum. Beberapa kewenangan tersebut terrepresentasi di dalam pernyataan langsung Polri. Dari kewenangan yang terrepresentasi menimbulkan munculnya penilaian positif dan negatif. Penilaian negatif untuk korban dan positif untuk Polri tidak terlepas

dari unsur relasi kuasa Polri yang relatif dominan dengan beberapa pihak dalam konteks proses hukum kasus ini.

4.2.3 Relasi Kuasa Tindak Wacana dan Dampaknya terhadap Struktur Sosial

Relasi kuasa yang tersirat dan tersurat dalam pernyataan Polri menunjukkan adanya kecenderungan kekuasaan yang dimiliki oleh Polri. Dari relasi kuasa tersebut memunculkan ketergantungan dari pihak korban terhadap lembaga hukum kepolisian. Relasi tersebut juga menunjukkan adanya hubungan antara kepolisian dengan korban dan kepolisian dengan masyarakat. Dari kuasa yang dominan dimiliki oleh Polri memberikan dampak pada keberadaan lembaga kepolisian di dalam struktur masyarakat. Tindak wacana Polri yang diproduksi akan mempertahankan kredibilitas, independensi, dan profesionalitas Polri dalam struktur sosial.

Relasi kuasa yang tercermin dari pernyataan langsung kepolisian adanya relasi yang dibangun antara Polri dengan Novel dan Polri dengan masyarakat, termasuk lembaga KPK. Berdasarkan pernyataan Polri, terdapat upaya untuk memberikan citra negatif terhadap Novel selaku korban dari kasus teror. Upaya tersebut merupakan bentuk dari adanya relasi yang lebih dominan dari Polri. Selain dengan korban, terdapat juga relasi dengan pihak masyarakat, termasuk KPK. Polri mencoba membangun relasi dengan kedua pihak itu sebagai bentuk sinergisitas. Pelibatan masyarakat dan KPK dalam proses pengusutan kasus dapat menyiratkan adanya bentuk kooperatif dan transparansi yang coba ditunjukkan.

Adanya relasi yang dibentuk Polri dengan pihak – pihak tersebut dapat disimpulkan sebagai upaya untuk mempertahankan citra kepolisian di dalam masyarakat. Hal itu dapat menjadi alat untuk menyangkal dan menetralsisir asumsi negatif yang pernah berkembang di publik terkait proses hukum kasus ini. Bahasa sebagai alat untuk mempertahankan citra diri, meliputi indenpendesi, sikap kooperatif, profesionalitas, dan kredibilitas kepolisian di dalam struktur sosial.

Praktik wacana yang dilakukan oleh Polri berkenaan dengan kasus teror air keras Novel Baswedan di media massa *kompas.co*, *detik.com*, *tempo.co*, dan *okezone.com* dapat berdampak pada struktur sosial. Hal itu dikarenakan, tindak wacana Polri menggambarkan suatu bagian dari proses sosial dan sebagai bentuk dari praksis sosial. Dimana tindak wacana tersebut dapat mempengaruhi *member resources* pembaca yang akhirnya bisa mempertahankan atau merubah struktur sosial. Struktur sosial dalam konteks ini yakni cara pandang masyarakat terhadap Polri. Interpretasi publik terhadap tindak wacana Polri dapat menentukan bagaimana publik memandang Polri sebagai sebuah instansi hukum di Indonesia. Polri sebagai salah satu instansi penegak hukum di Indonesia, apakah masih bersifat independen dan menjunjung tinggi pada kebenaran dan keadilan. Pandangan tersebut masih mencerminkan instansi Polri atau tidak dapat dipengaruhi oleh *member resources* interpreter.

Tindak wacana Polri yang berkaitan dengan proses penanganan kasus teror air keras Novel Baswedan menunjukkan bahwa mencoba untuk mempertahankan

penilaian instansi kepolisian di dalam struktur sosial. Hal yang ingin coba dipertahankan yakni, bahwa Polri adalah salah satu lembaga hukum yang independen dan menunjung tinggi keadilan serta kebenaran. Pemahaman tersebut harus dipertahankan di dalam struktur sosial karena hal itu sangat penting bagi kredibilitas Polri di mata publik. Hal tersebut coba dipertahankan karena muncul beberapa penilaian negatif mengenai kinerja kepolisian dalam menangani kasus teror air keras Novel Baswedan.

Di dalam tahap eksplanasi terdapat tiga faktor yang mempengaruhi tindak wacana Polri terkait pengusutan teror kasus air keras Novel Baswedan. Pertama, faktor konteks sosial yang melandasi adalah turunnya rasa kepercayaan terhadap lembaga hukum Polri. Polri sudah dinilai tidak independen dalam melakukan tugasnya. Rasa keraguan publik tersebut muncul dalam pemberitaan media massa seperti di *merdeka.com* edisi 1 November 2017 yang berisi usulan wakil ketua DPR, Fadli Zon untuk membentuk TGPF. Selain itu, dimuat juga dalam *detik.com* edisi 3 Januari 2018 berisi rasa pesimistis terselesaikannya kasus itu yang diungkapkan oleh ketua pemuda Muhammadiyah, Dahnil Nazar. Pernyataan yang disampaikan oleh dua tokoh tersebut menyiratkan adanya keraguan terhadap kinerja kepolisian dalam menangani kasus Novel Baswedan. Inti dari pernyataan kedua tokoh itu yakni kekhawatiran kasus teror air keras yang menimpa Novel Baswedan tidak dapat terselesaikan dan akhirnya kasus tersebut akan terlupakan.

Turunnya rasa kepercayaan publik bisa juga dilatarbelakangi oleh sejarah ketegangan yang melibatkan KPK dan Polri. Sejarah kasus yang melibatkan dua

lembaga itu diantaranya kasus korupsi pengadaan simulator SIM 2012 yang melibatkan petinggi Polri, yaitu mantan kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol. Djoko Susilo. Kasus tersebut permula pada program pengadaan simulator SIM pada tahun 2011, dimana Irjen Pol Djoko Susilo menjabat sebagai kakorlantas. Kasus tersebut juga menyeret direktur utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) yang terlibat dalam pembuatan simulator SIM bersama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) selaku perusahaan yang memenangkan tender. KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka dan diperkuat dengan putusan pengadilan tipikor pada 3 September 2013.

"Menyatakan terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan gabungan perbuatan," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Suhartoyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (3/9/2013)"

Pemberitaan vonis hukuman tersebut termuat di media *kompas.com* edisi 3 September 2013 dengan judul 'Irjen Djoko Susilo Divonis 10 tahun Penjara, Denda Rp 500 Juta'. Realita kasus simulator SIM yang menjerat salah satu anggota kepolisian dapat memengaruhi rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut.

Daftar kasus lain yang pernah melibatkan KPK dan Polri yakni kasus suap dan gratifikasi Komjen Budi Gunawan pada tahun 2010. Kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat pada Juni hingga Agustus 2010. Untuk mengkonfirmasi hal itu KPK menggandeng PPATK mengenai transaksi yang dilakukan oleh Budi Gunawan. Hasil temuan menunjukkan bahwa adanya transaksi mencurigakan ke rekening Budi Gunawan saat masih menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier

PSDM Polri periode 2004-2006. Hal itu diperkuat oleh pernyataan pihak KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kutipan berita berikut ini.

"Dalam forum ekspos yang dilakukan oleh tim penyelidikan dan penyidik dan tim jaksa dan seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji," kata Abraham"

Putusan kutipan itu dimuat oleh *kompas.com* pada edisi 13 Januari 2015. Beberapa kasus tersebut pernah menjadi topik utama dalam media massa untuk waktu yang cukup lama. Kasus korupsi yang mengakibatkan anggota kepolisian sebagai tersangka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap instansi kepolisian. Masyarakat dengan pengetahuan yang dimiliki dapat memunculkan berbagai persepsi tentang kasus penyerangan air keras Novel. Persepsi yang muncul dapat berupa persepsi negatif berupa meragukan instansi kepolisian dan juga persepsi positif yang menjaga kepercayaan Polri. Keadaan sosial yang menunjukkan adanya contoh dua kasus korupsi melibatkan instansi kepolisian dapat menjadi faktor berpengaruh terhadap rasa percaya publik kepada instansi lembaga itu.

Konteks lain yang berpengaruh dalam pemertahanan kredibilitas Polri di dalam struktur sosial dipengaruhi juga oleh konteks institusional. Konteks institusional yang dapat mempengaruhi tindak wacana Polri yakni Polri merupakan instansi penegak hukum yang legal dan memiliki landasan hukum. Pernyataan itu didasarkan oleh keberadaan aturan resmi yang disahkan lembaga eksekutif dan legislatif.

Pihak kepolisian memiliki posisi sebagai penanggung jawab atas penyidikan kasus teror air keras NB. Hal itu sejalan dengan dasar hukum Polri yang dimuat dalam 1) UUD 1945 pasal 30 ayat 1, 2, 4 dan 5. 2) UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia, dan 3) TAP MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Polri memiliki tugas pokok yang diatur dalam UU No 2 tahun 2002 dalam pasal 13, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dijelaskan lebih lanjut di pasal 14 ayat (1) dalam poin (g) yang menjelaskan bahwa Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pada sesuai dengan hukum acara pidana dan Perpu lainnya. Tugas pokok tersebut menjadi mempertegas posisi kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam menginvestigasi kasus teror air keras terhadap Novel Baswedan. Dasar hukum tersebut juga yang melandasi representasi negatif Polri terhadap Novel Baswedan dikarenakan desakan untuk melimpahkan kasus ke TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta). Hal itu menyiratkan adanya rasa ketidakpercayaan pihak korban dan pihak lain terhadap kredibilitas Polri dalam menyelesaikan kasus ini.

Ketiga, faktor konteks situasional yang melatarbelakangi tindak wacana Polri yaitu adanya dorongan dari berbagai pihak ketiga supaya Polri menyerah menangani kasus teror air keras Novel. Hal itu dikarenakan, penyidikan yang telah dilakukan sejak 11 April 2017 belum terungkap pelaku yang bertanggung jawab. Dorongan pelimpahan kasus disampaikan oleh pihak korban, Novel Baswedan, dalam wawancara dengan media. Pernyataan Novel yang menyatakan

keinginannya sebagai berikut, “ Lebih baik jika dibentuk TGPF untuk mengkapkan fakta. Itu pun kalau dianggap penting” (6/11/17). Hal itu diberitakan oleh beberapa portal berita online, diantaranya *detik.com*, *kompas.com*, *tempo.co*, dan *okezone.com*. Keberadaan media masa *online* dalam memberitakan kasus peneroran air keras Novel Baswedan memiliki peranan penting. Media massa online menjadi sarana tercepat dalam penyebaran pemberitaan kasus Novel. Keunggulan dari media massa *online* itu juga yang berperan dalam pembentukan citra positif instansi kepolisian di tengah keraguan masyarakat. Media massa *detik.com*, *kompas.com*, dan *okezone* pada Desember 2017 masuk 10 besar media dengan pembaca dan kunjungan situs terbanyak. Survei tersebut dilakukan oleh CumScore, lembaga penyedia data standar untuk pengukur audiensi *online* di Indonesia, yang telah ditunjuk oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Pada survei akhir 2017, Cumscore menunjukkan bahwa *detik.com* menduduki peringkat 1, *kompas.com* peringkat 4, dan *okezone* peringkat 7. Sedangkan untuk *tempo.com* berada di peringkat 14. Urutan tersebut berdasarkan jumlah kunjungan halaman situs dan mobile web (UV) serta jumlah halaman web (PV) yang dilihat atau baca. Survei rangkain tersebut menunjukkan bahwa media-media tersebut memiliki jumlah kunjungan dan halaman terbaca yang banyak di banding media lain. *Detik.com* memiliki total UV 22.365 dan PV 663.121 dan *kompas.com* total UV 14.918 dan PV 199.014. Angka survei tersebut dapat menjadi acuan bahwa berita yang menjadi *headline* atau tidak dalam kedua media tersebut memiliki jumlah pembaca banyak. Hal itu, dapat menjadi dasar persepsi bahwa pemberitaan Novel Baswedan yang menjadi topik utama pada tahun 2017

telah dibaca dan dilihat oleh banyak pengguna media massa. Dan, implikasi hal itu akan membangun penilaian positif terhadap Polri dalam menangani kasus Novel Baswedan.

Guna mendapatkan kembali kepercayaan penuh di masyarakat, pihak kepolisian membangun citra positif terhadap instansi kepolisian. Polri berusaha untuk membangun dan memperkuat kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dalam penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu, melalui pernyataan Polri terkait kasus teror air keras, kepolisian juga berusaha untuk kembali menegaskan keindenpendenan instansi Polri, sesuai peraturan perundang-undangan. Instansi penegak hukum kepolisian merupakan institusi yang tidak mendeskriminasikan suatu kelompok atau perorangan dalam menegakkan hukum. Polri juga berupaya menegaskan bahwa institusi mereka tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Semua itu tersampaikan secara implisit dan eksplisit dalam pernyataan langsung Polri di media *detik.com*, *kompas.com*, *okezone.com*, dan *tempo.co*. Keberadaan media *online* dan survei media *online* dapat memberikan pengaruh terhadap keberterimaan pernyataan langsung Polri. Pernyataan langsung Polri yang termuat dalam media tersebut dapat membentuk citra positif Polri. Hal itu didukung oleh faktor kekuasaan media untuk melakukan editorial teks berita dan tingginya jumlah pembaca media tersebut. Jumlah pembaca yang tinggi akan semakin memperkuat posisi instansi kepolisian di dalam masyarakat.

Tindak wacana Polri diungkapkan dalam pernyataan-pernyataan langsung bertujuan untuk mempertahankan struktur sosial di masyarakat terkait keberadaan instansi Polri. Polri merupakan lembaga penegak hukum yang legal secara

undang-undang dasar untuk menangani permasalahan hukum di Indonesia. Masyarakat memiliki hak mempergunakan jasa Polri dalam penanganan kasus hukum yang dialami. Dan juga, Polri memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang kepada masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, atau kepentingan lainnya. Hal itu dipertegas oleh pihak kepolisian lewat pernyataan langsung yang berhubungan dengan kasus teror air keras Novel Baswedan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka simpulan penelitian ini sebagai berikut.

1. Pernyataan langsung Polri tentang kasus teror air keras Novel Basweda yang ada di portal berita *kompas.com*, *tempo.co*, *detik.com*, dan *okezone.com* merepresentasikan beberapa hal terkait kinerja Polri. Hal yang direpresentasikan dari kinerja Polri yaitu bentuk tanggungjawab Polri, kredibilitias Polri, sikap kooperatif dan profesionalitas Polri. Jumlah total data adalah 69 klausa yang dianalisis menggunakan transitivitas Halliday. Bentuk tanggungjawab Polri direpresentasikan proses material memiliki persentase sebesar 40%. Bentuk kredibilitas Polri direpresentasikan proses mental memiliki tingkat persentase sebesar 28%% dan proses verbal 12% . Di dalam proses mental tergambar adanya rencana-rencana yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kebenaran kasus teror Novel. Proses verbal menunjukkan adanya upaya untuk menyakinkan masyarakat terkait segala tindakan kepolisian melalui pengakuan kepolisian. Bentuk sikap kooperatif dan profesionalitas Polri direpresentasikan oleh proses relasional 14% dan proses behavioral 6%. Proses relational memiliki persentase sebesar 14 % yang menunjukkan hubungan intensitas dan hubungan perluasan makna antara yang berhubungan dengan kinerja

kepolisian dalam kasus tersebut. Proses behavioural dalam pernyataan kepolisian sebesar 6%. Bentuk proses behavioral menunjukkan perilaku fisik atau psikologis kepolisian yang berhubungan dengan upaya-upaya mengusut kasus teror itu.

2. Pernyataan langsung pihak kepolisian terdapat realisasi kuasa yang ditujukan kepada sosok Novel Baswedan. Relasi kuasa yang coba dibangun Polri tersirat dari pilihan kata di dalam penuturan langsung yang menunjukkan dominasi hubungan antara Polri dengan korban, Polri dengan KPK, dan Polri dengan masyarakat.
3. Relasi kuasa yang coba dibangun oleh Polri memberikan pengaruh di dalam struktur sosial. Bentuk pengaruh di dalam struktur sosial yaitu pemertahanan citra kepolisian yang independensi, kredibilitas, dan transparan. Selain itu tindak wacana Polri terkait kasus teror air keras Novel juga dipengaruhi oleh konteks sosial, institusional, dan situasional Polri melalui tindak wacananya mencoba mempertahankan citra positif kepolisian di masyarakat. Hal yang ingin dipertegas dan dipertahankan adalah dalam bentuk-bentuk kinerja Polri yaitu bentuk tanggungjawab, bentuk kredibilitas, dan bentuk kooperatif dan profesionalitas..

5.2 Saran

Penelitian wacana kritis dengan fokus permasalahan pada representasi kinerja kepolisian terhadap proses investigasi penyerangan air keras terhadap Novel masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran yang bisa diberikan

kepada peneliti yang berkeinginan untuk mengkaji analisis wacana kritis yakni untuk lebih mendetail dalam analisis. Penekanan lebih detail perlu dilakukan terlebih dalam proses eksplanasi. Hal itu diperlukan agar bisa mengetahui apakah tindak wacana yang diproduksi berdampak mengubah atau mempertahankan MR, sehingga hal itu dapat mempertahankan atau bahkan mengubah struktur sosial di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aisyah, Syaja’tul. 2016. ‘Representasi Sosial pada Wacana Pidato Politik Presiden PKS dalam Konsolidasi Kader PKS tahun 2013 (Analsiis Wacana Politik Anis Matta)’. Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Eggin, Suzanne. 1994. *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Printer Publisher.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Fairclough, Norman. 2006. *Languange and Power*. New York: Longman Inc.
- Fairclough, Norman. 1995. *Dircourse and Social Change*. UK: Polity Press.
- Gerot, Linda, dan Peter Wegnell. 1994. *Making Sense of Functional Grammar*. Sydney: Gerd Stabler.
- Gowhary, Habib. Farahnaz Rahimi, Akbar Azizifar, dan Ali Jamalinesari. 2015. ‘A Critical Analyss of The Electoral Talks of Iranian Presidential Candidates in 2013’. *Journal Procedia Social and Behavioral Sciences*, 132-141.
- Halliday, M, dan Mathiessen, M. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*. New York: Oxford University Press. Inc.
- Handayani, Dian, Heriyanto, dan Ypsi Soeri Soemantri. 2018. ‘Fairclough’s Three Diension Framework Used On Trump’s Political Speech: A critical Discourse Analysis (A Case Study of History Speech Related to Jarussalem As Israel’s Capital)’. *Proceedings of teh 1st Annual International Conference on Langue ad Literature, 18-19*. Medan: UISU.
- Krippendorff, Klaus. 2004. *Content Anaylsis An Introction to Its Methodology*. UK : Sage Publication.
- Sari, Intan Mustika. 2017. ‘Tempo Practice in Reporting Ahok Campaign of The Jakarta Gubernatorial Election 2017’. Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- Setiawa, Irma. 2016. ‘Transitivitas Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Harian Lombok Post: Sebuah Potret Ketersudutan Perempuan Di Nusa Tenggara Barat’. *Jurnal Tutur, Vol. 2, No. 1*.
- Sinaga, Dwi Pebrina, Nanan Kandagasari, dan Eline Rozaliya Winarto. 2016. ‘Critical Discourse Analysis of Jokowi’s Speech at APEC CEO Summit

2014 by The Application of Transitivity'. *ISFC 43 Proceeding Learning Language, Learning Through Language, Learning about Language: Glocalising Systemic Functional Linguistics*. Bandung: UPI.

Sharififar, Massoud dan Elahe Rahimi. 2015. 'Critical Discourse Analysis of Political Speech: A Case Study of Obama's and Rouhan's Speech at UN'. *Journal Theory and Practice Language Study*, Vol. 5, No. 2, 343-349.

Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University.

Rukman. 2016. 'Obama's Speech at Climate Change Conference COP 21 in Paris in 2015: Fairclough's Three-Dimensional Model'. *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No. 2.

Wijanarko, D. N. 2017. 'Representasi Muslim Syariah dalam Pidto Donald Trump di South Carolina'. Tesis Tidak Diterbitkan. Semarang: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Wiratno, Dr. Tri. 2018. *Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zang, Yichao. 2017. 'Transitivity Analysis of Hillary Clinton's and Donald Trump's First Television Debate'. *Journal International Journal of Applied Linguistics and English Literature*, Vol 6, 65-72.

www.detiknews.com (diunduh dalam rentang waktu tanggal 11 April 2017 s.d Agustus 2018)

www.kompas.com (diunduh dalam rentang waktu tanggal 11 April 2017 s.d Agustus 2018)

www.okezone.com (diunduh dalam rentang waktu tanggal 11 April 2017 s.d Agustus 2018)

www.tempo.co diunduh dalam rentang waktu tanggal 11 April 2017 s.d Agustus 2018)

LAMPIRAN 1

TABEL ANALISIS TRANSITIVITY PERNYATAAN LANGSUNG POLRI

A. Proses Material

Partisipan aktif Polri

No data	Actor	Proses material	Goal	Circumstance	Edisi
1.	Kita	tidak mungkin ambil	pelaku	yang tidak ada kaitannya [<i>cause</i>]	13/6/17
2.	Kami	tinggal tambah	beberapa penyidik		17/6/17
3.	Kita	kerja		saja dulu nggak usah menanggapi [<i>matter</i>]	18/6/17
4.	Penyidik Polda Metro Jaya	bisa menindaklanjuti	informasi yang dianggap penting	oleh saudara Novel [<i>accompaniment</i>] hendaknya disampaikan kepada penyidik, supaya tidak terjadi sebuah tendensi atau tudingan [<i>manner</i>]	15/6/17
5.	Dia (Polda)	Menangani		sudah sejak awal [<i>extent</i>]	17/6/17
6.	Kita	tuangkan	dalam berita acara	daripada informasi itu kemana-mana [<i>cause</i>]	2/8/17
7.	Kita	sudah memberikan	daftar pertanyaan	kepada yang bersangkutan (Novel) [<i>contingency</i>]	2/8/17
8.	Kita	Ambil		nanti [<i>location</i>] kalau sudah diisi dan dijawab [<i>manner</i>]	2/8/17
9.	Tim (penyidik Polri)	Datang		dengan pihak KPK juga [<i>accompaniment</i>] ditanya masalah	6/11/17

				itu dia juga nggak mau menyampaikan [<i>matter</i>]	
10.	Kita	Tangkap		segera [<i>location</i>] kalau ada informasi di bagi apalagi faktual [<i>manner</i>]	6/11/17
11.	Kami	Mempersiapkan	anggota	dari Polda Metro Jaya [<i>manner</i>]	6/11/17
	Kami	koordinasi		dengan KPK [<i>accopaniment</i>] kami tidak masalah [<i>contingency</i>]	6/11/17
12.	Kita	udah upayakan	pengungkapan kasus itu	sangat luar biasa [<i>manner</i>]	2/2/18
13.	Kami	sudah meminta		Ketua KPK untuk mengirim penyidik KPK bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan [<i>matter</i>]	22/2/18
14.	Polisi	tetap melakukan	penyidikan	tidak pernah mundur tetap bekerja [<i>manner</i>]	22/2/18
15.	Kami	tetap melibatkan	[KPK]	Kemarin [<i>location</i>] sudah melibatkan KPK kemudian hotline dan ribuan juga sudah ada SMS dan kemudian juga anggota penyidik KPK ikut juga [<i>manner</i>]	22/2/18
16.	Penyidik	terus bekerja keras	melakukan penyelidikan	sampai hari ini [<i>extent</i>]	14/3/18
17.	Saya (Polri)	Membentuk	satuan tugas	untuk penanganan kasus Novel ini	14/3/18

				dengan 166 penyidik [<i>manner</i>]	
18.	Kami	Kerja		terus tidak ada kata berhenti [<i>manner</i>]	14/3/18
19.	Kami	Bekerja		berdasarkan profesionalitas dan diawasi oleh lembaga eksternal maupun internal Polri [<i>manner</i>]	14/3/18
20.	Kami	Mendapatkan	support	dari tim KPK yang ditunjukkan untuk memberikan informasi yang penting dalam pengungkapan kasus ini [<i>cause</i>]	11/4/18
21.	TGPF	sudah banyak dibentuk		dalam <i>case-case</i> tertentu tetapi sekali lagi tidak optimal perannya [<i>matter</i>]	11/4/18
22.	Polda Metro Jaya	sudah melangkah		pada satu tahun lalu sejak peristiwa itu terjadi [<i>location</i>], sangat maju ke depan progres sudah banyak yang didapat [<i>matter</i>]	11/4/18
23.	Kita	Tuangkan		dalam BAP informasi sensitif apapun <i>welcome</i> [<i>matter</i>]	27/7/18

Novel Baswedan sebagai *actor*

No	Actor	Pr Material	Goal	Circumstance	Edisi
27.	Novel Baswedan	Berikan		Informasi apapun kami welcome [<i>matter</i>]	27/7/18
28.	(Novel)	Menuding		seseorang kan harus kita bisa dapat faktanya, waktunya kapan, pukul berapa, dimana, siapa perwiranya itu kan harus jelas [<i>matter</i>]	

B. Proses Mental

Partisipan aktif Polri

No	Sense	Proses	Phenomenon	Circumstance	Edisi
29.	Polri	masih mampu	tangani kasus Novel		15/5/17
30.	Saya	akan ungkap		maksimal jangan terus digulir-gulirkan [<i>manner</i>]	13/6/17
31.	Kita	akan teruskan		kalau diberikan kepada penyidik [<i>manner</i>]	15/6/17
32.	Kita	akan selidiki		kalau perlu diberikan kepada penyidik, bener enggak? [<i>cause</i>]	15/6/17
33.	kita	coba nanti		yang ketiga ini bisa diambil keterangan [<i>manner</i>]	1/8/17
34.	Kami	dalami	(keterangan)	dari Novel sendiri [<i>matter</i>]	1/8/17
35.	Kita	akan lakukan	Penyidikan	kalau itu sudah fakta hukum dan ada alat buktinya [<i>manner</i>]	1/8/17
36.	Kita	mau	Periksa	sudah lah, enggak usahlah, kita ngobrol-ngobrol saja, katanya (Novel) begitu [<i>Circumstance: angel</i>]	2/8/17

37	Kita	Akan		ke sana [<i>location</i>] memeriksa yang bersangkutan [<i>matter</i>]	2/8/17
38	Tim ini	bisa	kerja sama	secara teknis lapangan karena KPK memiliki kemampuan pengawasan [<i>cause</i>]	18/8/17
39	Kita	nggak main-main		segera kalau ada informasi bagus apalagi itu faktual [<i>matter</i>]	6/11/17
40	Kita	mau	Bersih		6/11/17
41	Kita	mau	Bagus		6/11/17
42	Polisi	siap		kapan saja berangkat [<i>manner</i>]	6/11/17
43	Kami	akan	Berangkat	kalau KPK menyampaikan pihak dokter sudah mengizinkan [<i>manner</i>]	6/11/17
44	Kita (Polri)	jangan menganggap	yang lambat atau menghambat		6/11/17
45	kami	maju tak gentar		untuk kasus Novel ini [<i>matter</i>]	22//18
46	Saya	ingin menyakinkan	bahwa penyidik sampai hari ini terus bekerja melakukan penyelidikan [<i>phenomenon</i>]		14/3/18

Novel Baswedan sebagai *senser*

No	Senser	Proses	Phenomenon	Circustamstance	Edisi
47.	dia (Novel Baswedan)	yang menyulitkan			6/11/17

C. Proses Verbal

No	Sayer	Proses	Verbiage	Circumstance	Edisi
48.	Saya	Tanya	tupoksinya gimana		13/6/17
49.	Kita	sudah bilang	tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat	beberapa kali [<i>extent</i>]	13/6/17
50.	Kalau keterangan itu (Novel)	disampaikan		kepada media kan tidak bisa dijadi pro yustisia [<i>cause</i>]	15/6/17
51.	Kita	mau tanyakan		sudahlah, enggak usahlah, kita ngobrol-ngobrol saja, katanya (Novel) begitu [<i>angel</i>]	2/8/17
52.	Penyidik	menanyakan		juga kepada yang bersangkutan (Novel) [<i>reciever</i>] tetang apa yang dia sampaikan ke media-media 3[<i>circumstance: matter</i>]	6/11/17
53.	Saya	Bilang		kan beberapa kali [<i>extent</i>] kami optimis bisa terungkap, ini hanya masalah waktu [<i>angel</i>]	12/4/18
54.	Keterangan (dari Novel Baswedan)	disampaikan	ke publik informasi itu katakanlah tidak bernilai	karena tidak bisa ditindaklanjuti [<i>cause</i>]	15/6/17
55.	Saya	sampaikan		berkali-kali kasus itu ada karakteristik masing-masing tidak bisa disamaratakan [<i>matter</i>]	27/7/18

D. Proses behavioural

No	Behaver	Process		Circumstance	Edisi
56.	Saksi	yang melihat		saat itu (penyerangan) kan [<i>matter</i>]	17/6/17
57.	Kami	menyentuh		hal-hal teknis tapi tentunya dibantu oleh masyarakat [<i>manner</i>]	11/4/18
58.	TGPF	tidak menyentuh		hal-hal teknis [<i>matter</i>]	11/4/18
59	Kami	Doakan		semoga saudara Novel Baswedan semakin hebat, semakin banyak memberikan keterangan kepada kepolisian [<i>circumstance:matter</i>]	11/4/18

E. Proses Relational

Proses relational attribute

No	Carrier	Process	Attribute	Circumstance	Date
60.	Kalau keterangan gannya (Novel Baswedan)	ingin menjadi	satu keterangan yang berharga	silakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan [<i>manner</i>]	15/6/17
61.	Semua orang	Punya	hak yang sama [<i>attribute</i>]	jadi bukan hak spesial kasus Novel ini saja, tapi itu tidak menyelesaikan masalah [<i>matter</i>]	6/11/17
62.	Kami semua		transparan [<i>attribute</i>]	nanti bisa mengetahui mulai dari awal sampai akhir prosesnya [<i>matter</i>]	22/2/18
63.	Kami	butuhkan adalah		Keterangan-keterangan tambahan dari saudara Novel Baswedan sendiri [<i>matter</i>]	11/4/18

64.	Kita		profesional [<i>attribute</i>]	kalau ada informasi bagus apa lagi itu faktual [<i>matter</i>]	6/11/17
-----	------	--	-------------------------------------	--	---------

Proses relational identifying

No	Identified	Process	idifier	Circumstance	Date
65.	Saksi		kan seperti bukti		13/6/17
66.	Kami	sangat memiliki	kepentingan	ketika saudara Novel Baswedan sehat [<i>contingency</i>]	11/4/18
67.	Kepolisian	telah mempunyai	penyelesaian polisi 60%	itu sudah bagus,	18/6/18
68	Kami			maksimal soal itu (kasus Novel Baswedan) [<i>Attribute</i>]	13/6/17
69.	Kami	maksimal	soal itu		13/6/17

BANK DATA

No data	Tuturan	Konteks	Media
	<p>“Polri masih mampu (tangani kasus Novel). Beri waktu untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan”</p>	<p>Siapa : Brigjen Pol Rikwanto Kepala Biro Penerangan Div Humas Polri Dimana : Jakarta, Mabers Polri. Kapan : 15/5/2017 Acara : Klarifikasi terkait usulan pembentukan tim independen untuk invstigasi kasus NB dari wakil ketua DPR RI, Agus Hermanto.</p>	<p>kompas.com</p>
1.	<p>“Sekarang saya tanya, tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) gimana?”</p>	<p>Siapa : Irjen Mochamad Iriawan (ASOPS Polri) Dimana : Tangerang Kapan : 13/6/2017 Acara : wawacnaa dengan medai Wawancara dengan media saat peninjauan persiapan jalan tol jelang arus mudik. Ketua KPK, Agus Rahardjo meminta penyidik KPK untuk dilibatkan dalam pengusutan kasus penyerangan Novel. “Nanti ada pertemuan kedua dengan Polda. Kita tanya kesanggupannya Polda, kalau Polda nggak sanggup, ya ke Mabes. Kita juga menanyakan apakah penyelidik kita juga bisa bergabung.”, ujar Agus Rahardjo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompas.com 2. Detik.com 3. Okezone.com

2	<p>“ Ada informasi apa, kamu sini kasih ke saya, saya akan ungkap maksimal, ada enggak? Janganlah ini terus digulir-gulirkan, enggak boleh. Kami maksimal soal itu.”</p>	<p>Siapa : Irjen Mochamad Iriawan (ASOPS Polri) Dimana : Tangerang Kapan : 13/6/2017 Acara : Peninjauan persiapan jalan tol jelang arus mudik lebaran. Irjen Iriawan, meminta siapapun yang mempunyai informasi terkait Novel Baswedan agar melaporkan ke kepolisian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompas.com 2. Okezone.com 3. Detik.com
3.	<p>"Kita sudah bilang beberapa kali tidak semua peristiwa bisa dapat dengan cepat. Jadi kita tidak mungkin ambil pelaku yang tidak ada kaitannya, enggak mungkin <i>dong</i>."</p>	<p>Siapa : Irjen Mochamad Iriawan (ASOPS Polri/ Kapolda Metro Jaya - Red) Dimana : Tangerang Kapan : 13/6/2017 Acara : Peninjauan persiapan tol jelang arus mudik lebaran. Kapolda menyatakan bahwa kasus Novel bukan satu-satunya yang lama dalam pengungkapan. Sebelumnya Ketua KPK mempertanyakan kesanggupan Polda Metro Jaya. "Makanya kami monitor terus, nanti kan ada pertemuan dengan Polda (Metro Jaya), kami tanya kesanggupan Polda, kalau Polda enggak sanggup, bisa Mabes,"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompas.com 2. Okezone.com
4.	<p>“Tidak perlu (ditarik) dalam artian bukan ditangani Polda sendiri, tapi dia (Polda) kan yang sudah sejak awal (menangani). Kami tinggal tambah</p>	<p>Siapa : Irjen Ari Dono (Kabareskrim Polri) Dimana : Jakarta, Kompleks PTIK Kapan : 17/06/2017 Acara : wawancara dengan media.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompas.com 2. Tempo.co

	beberapa penyidik."	Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar kasus Novel ditangani langsung oleh Mabes Polri.	
5.	"Saksi kan seperti bukti Saksi kan seperti bukti	Siapa : Irjen Ari Dono (Kabareskrim Polri) Dimana : Jakarta, Kompleks PTIK Kapan : 17/6/2017 Acara : wawancara dengan awak media profesional	1. Kompas.com 2. Tempo.co
6	"Kalau keterangannya itu ingin menjadi satu keterangan yang berharga silakan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Kalau keterangan itu disampaikan kepada media kan tidak bisa dijadikan pro yustisia."	Siapa : Irjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, SH. (Kadivhumas Polri) Dimana : Mabes Polri, Jakarta Selatan Kapan : 15/6/2017 Acara : Wawancara dengan media Novel memberikan keterangan saat wawancara dengan media <i>time</i> terkait kecurigaan keterlibatan jendral dalam penyerangannya. "Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.	Kompas.com
7	"Supaya penyidik Polda Metro Jaya bisa menindaklanjutinya, informasi-informasi penting yang dianggap penting oleh saudara Novel, hendaknya disampaikan kepada penyidik, supaya tidak terjadi sebuah tendensi atau tuduhan."	Siapa : Kombes. Pol. Martinus Sitompul (Kebagpenum divhumas Polri) Dimana : Mabes Polri, Jakarta Selatan Kapan : 15/6/2017 Acara : wawancara dengan media Novel diiminta untuk memberikan keterangan kepada	1. Kompas.com 2. Okezone.com

		penyidik kepolisian terkait keterangannya di media <i>time</i> . ““Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.	
8	"Kalau diberikan kepada penyidik, kita akan teruskan kita akan selidiki, benar enggak? darimana alur-alurnya, fakta-fakta? apa yang mendukung pernyataan itu, jadi prinsipnya harus diserahkan ke polisi.”	Siapa : Kombes. Pol. Martinus Sitompul (Kebagpenum divhumas Polri) Dimana : Kapan : 15/6/17 Acara : wawancara dengan media Novel diiminta untuk memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian terkait keterangannya di media <i>time</i> . ““Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.	Kompas.com
9.	"Jadi kalau tidak disampaikan, kemudian disampaikan ke publik informasi itu katakanlah tidak bernilai, ya karena tidak bisa ditindaklanjuti. Nah karena kalau menuding seseorang harus kita bisa dapat faktanya, waktunya kapan pukul berapa dimana siapa perwiranya itu kan harus jelas.”	Siapa : Kombes. Pol. Martinus Sitompul (Kebagpenum divhumas Polri) Dimana : Kapan : 15/6/17 Acara : Novel diiminta untuk memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian terkait keterangannya di media <i>time</i> . “Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu),	Kompas.com

		sepertinya informasi itu benar," kata Novel.	
10.	Kami coba nanti yang ketiga ini bisa diambil keterangan."	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 1/8/17 Acara : Wawancara dengan media Kepolisian akan meminta keterangan Novel lagi terutama pernyataan Novel di majalah <i>Time</i> .	1. Kompas.com 2. Tempo.co
11.	"Itu perlu kami dalami dari Novel sendiri. Itu termasuk isu, rumor, atau fakta hukum," kata Rikwanto. "Kalau suatu rumor tidak masalah. Tapi kalau itu sudah fakta hukum dan ada alat buktinya, kita akan lakukan penyidikan," lanjut dia(1/8/17)	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 1/8/17 Acara : Wawancara dengan media Pihak polri akan mendalami pernyataan novel mengenai keterlibatan jendral di media cetak <i>time</i> . "Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.	1. Kompas.com 2. Tempo.co
12.	"Anggota kan ke sana (Singapura), sudah bawa laptop, ada saksi semuanya ada. Kita mau tanyakan, kita mau periksa, 'Sudahlah, enggak usah lah,	Siapa : Kombes Argo Yuwono (Kabid Humas Polda metro Jaya) Dimana : Mapolda Metro jaya, Jakarta Kapan : 2/8/17	1. Kompas.com 2. Detik.com

	kita ngobrol-ngobrol saja' katanya gitu."	Acara : Jumpa pers dengan wartawan Pihak kepolisian telah mengirimkan tim penyidik ke Singapura, akan tetapi Novel menolak penyidikan dengan alasan yang telah disebutkan oleh Kabid Humas Polri.	
13.	"Makanya kita akan ke sana, memeriksa yang bersangkutan. Dari pada informasi itu, ke mana-mana lebih baik kita tuangkan ke dalam berita acara."	Siapa : Kombes Argo Yuwono (Kabid Humas Polda metro Jaya) Dimana : Mapolda Metro Jaya Kapan : 2/8/17 Acara : Wawancara dengan wartawan. Penyidik polisi berencana untuk meminta keteangan polri terkait kecurigaan Novel dengan terlibatnya oknum jendral dalam penyerangannya. Hal itu disampaikan di dalam wawancara dengan media <i>time</i> .	1. Kompas.com 2. Detik.com
14.	"Kita kan sudah memberikan daftar pertanyaan kepada yang bersangkutan (Novel)."	Siapa : Kombes Argo Yuwono (Kabid Humas Polda metro Jaya) Dimana : Mapolda Metro Jaya Kapan : 2/8/17 Acara : Wawancara dengan wartawan Pihak kepolisian memngambil tindakan untuk memberikan daftar pertanyaan kepada Novel. Hal itu dikarenakan sebelumnya, Kabid Humas mengatakan bahwa Novel enggan diperiksa.	1. Kompas.com 2. Detik.com
15.	"Nanti kalau sudah diisi dan dijawab kita ambil. Enggak masalah kita sudah sampai seperti itu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban."	Siapa : Kombes Argo Yuwono (Kabid Humas Polda metro Jaya) Dimana : Mopolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan Kapan : 2/8/17 Acara : Wawancara dengan wartawan	1. Kompas.com 2. Detik.com

		Daftar pertanyaan yang telah diserahkan kepada Novel akan diambil oleh tim penyidik jika telah diisi oleh Novel Baswedan. Hal itu diungkapkan kabid Humas Polri setelah sebelumnya memberikan pernyataan “Kita kan sudah memberikan daftar pertanyaan kepada yang bersangkutan (Novel).”	
16.	"Karena KPK memiliki kemampuan pengawasan, tim ini bisa kerja sama secara teknis lapangan."	Siapa : Jendral Polisi Tito Karnavian (Kapolri Republik Indonesia) Dimana : Mapolda Metro Jaya Kapan : 18/8/2017 Acara : Wawancara dengan media	1. Kompas.com 2. Detik.com 3. Tempo.co
17.	"Berarti kan dia sendiri yang menyulitkan. Kalau memang dia punya fakta soal itu, kalau ada keyakinan pelakunya siapa dan dia tahu, ya lebih cepat lebih baik kan."	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan media Pihak kepolisian menyayangkan sikap Novel yang hanya akan memberikan kererangan setelah dibentuk tim pencari fakta. Novel	1. Kompas.com
18.	"Tim kemarin datang dengan pihak KPK juga, ditanya masalah itu, dia juga nggak mau menyampaikan."	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan media Kepolisian memberikan tanggapan mengenai sikap Novel	1. Kompas.com 2. detik.com

		saat diminati keterangan terkait pernyataan Novel tentang keterlibatan oknum jendral di majalah Time.	
19.	"Kalau ada informasi bagus apalagi itu faktual, disampaikan. Segera kita tangkap ya, kita nggak main-main. Kita mau bersih, kita mau bagus, kita profesional."	<p>Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri)</p> <p>Dimana : Kompleks Mabes Polri</p> <p>Kapan : 6/11/17</p> <p>Acara : Wawancara dengan media terkait keinginan novel untuk dibentuk TGPF.</p> <p>Novel baswedan hanya bersedia memberikan informasi jika dibentuk tim pencari fakta. Sebelumnya Novel memberikan pernyataan bahwa "Lebih baik jika dibentuk TGPF untuk mengungkap fakta. Itupun kalau dianggap penting"</p>	<p>1. kompas.com</p> <p>2. detik.com</p>
20.	"Jadi jangan menganggap kita yang lambat atau menghambat. Justru berita-berita simpang siur ini yang membuat suasana menjadi masyarakat galau, ada apa ini?"	<p>Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri)</p> <p>Dimana : Kompleks Mabes Polri</p> <p>Kapan : 6/11/17</p> <p>Acara : Wawancara dengan media</p> <p>Pihak kepolisian membantah jika dianggap menghambat kasus Novel. Kepolisian beranggapan bahwa ketidak terbuka Novel yang menghambat investigasi. Novel akan memberikan kesaksian jika dibentuk tim pencari fakta, "Lebih baik jika dibentuk TGPF untuk mengungkap fakta. Itupun kalau dianggap penting"</p>	<p>1. kompas.com</p>
21.	"Polisi siap saja kapan saja berangkat. Kami mempersiapkan anggota dari	<p>Siapa : Kombes Argo Yuwono (Kabid Humas Polda metro Jaya)</p>	<p>1. kompas.com</p> <p>2. detik.com</p>

	Polda Metro Jaya. Kami koordinasi dengan KPK, kami tidak masalah. Kalau KPK menyampaikan pihak dokter sudah mengizinkan, kami akan berangkat ke sana,"	Dimana : Mapolda Metro Jaya Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan media	
22	"Dua kali kita ke sana. Penyidik menanyakan juga kepada yang bersangkutan tentang apa yang dia sampaikan ke media-media. Tetapi di sana tidak mendapatkan jawaban. Bahkan memang 'tidak usah dibahas lagi masalah itu'. Seperti itu kira-kira (ucapan Novel)."	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan wartawan Tim penyidik Polri telah dua kali menemui Nvel, akan tetapi Novel enggan memberikan pernyataan kepada penyidik Polri. Novel akan memberikan kesaksian jika dibentuk tim pencari fakta, seperti yang diucapkan "lebih baik jika dibentuk TGPF untuk mengungkap fakta. Itupun kalau dianggap penting."	1. kompas.com 2. detik.com
23	"Bantulah berikan info yang signifikan supaya ini cepat terungkap. Jangan punya bukti, info, bahan bagus untuk mengungkap, lalu dipegang saja dengan alasan nanti TGPF, saya buka. Itu namanya menghambat. Memperlama,"	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan wartawan Polri meminta semua pihak yang memiliki informasi mengenai penyerangan Novel agar melapor. Polri menyatakan bahwa pembentukan TGPF jangan dijadikan	1. Kompas.com

		pedoman utama dalam pengusutan kasus, “TGPF ini jangan dibiasakan. Nanti siapa pun yang merasa agak lama penanganan kasusnya menuntut TGPF. Jadi, bukan hak spesial kasus Novel ini saja, semua orang punya hak yang sama, tapi itu tidak menyelesaikan masalah.”	
24.	"Jadi bukan hak spesial kasus Novel ini saja, semua orang punya hak yang sama, tapi itu tidak menyelesaikan masalah.”	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan wartawan. Polri menanggapi bahwa pembentukan TGPF bukan solusi utama selama investigasi Polri masih berlangsung. Novel meminta agar dibentuk tim pencari fakta “Lebih baik jika dibentuk TGPF untuk mengungkap fakta. Itupun kalau dianggap penting”	1. Kompas.com 2. Detik.com
25.	"Yakinlah, kalau memang ke penyidik kurang pas atau kurang berkenan, ke KPK sendiri. Atau ke siapa yang dianggap cukup punya kompetensi dipercaya untuk itu ya nanti baru dikondisikan ke Polri.”	Siapa : Brigjen. Pol Rikwanto (Kepala Biro penerangan masyarakat divhumas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 6/11/17 Acara : Wawancara dengan wartawan Usulan pembentukan TGPF kasus penyerangan Novel muncul dari berbagai kalangan. Polri menyarankan untuk memberikan informasi ke KPK jika tidak mempercayai penyidik Polri. Novel meminta untuk dibentuk tim pencari fakta “Lebih baik jika dibentuk TGPF untuk mengungkap fakta. Itupun kalau dianggap penting.”	1. Kompas.com 2. Detik.com

26.	"Kami bahkan sudah meminta Ketua KPK untuk (mengirim) penyidik KPK bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangannya. Kami semua transparan, nanti bisa mengetahui mulai dari awal sampai akhir prosesnya,"	Siapa : Kombes Argo Yuwono (Kabid Humas Polda Metro Jaya) Dimana : Mapolda Metro Jaya Kapan : 22/2/2018 Acara : Wawancara dengan media massa	1. Kompas.com
27.	" Kami bahkan sudah meminta Ketua KPK untuk (mengirim) penyidik KPK bergabung dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangannya. Kami sudah transparan, nanti bisa mengetahui melalui dari awal sampai akhir prosesnya. Sampai-sampai kami menyediakan ruangan khusus untuk menganalisa kasus ini."	Siapa : Komber Argo Yuwono (Kanid Humas Polda Metro) Dimana : Polda Metro Jaya Kapan : 22/2/2018 Acara : wawancara dengan media	1. Kompas.com
	"Polisi tetap melakukan penyidikan, tidak pernah mundur tetap bekerja. Kita maju tak gentar untuk kasus Novel ini."	Siapa : Komber Argo Yuwono (Kanid Humas Polda Metro) Dimana : Polda Metro Jaya Kapan : 22/2/2018 Acara : wawancara dengan media Presiden Jokowi kembali mempertanyakan perkembangan kasus NB yang telah berjalan selama 10 bulan.	Okezone.co
	"Kita tetap melibatkan, kemarin sudah melibatkan KPK, kemudian hotline dan ribuan juga sudah ada SMS dan kemudian juga anggota penyidik KPK	Siapa : Komber Argo Yuwono (Kanid Humas Polda Metro) Dimana : Polda Metro Jaya Kapan : 22/2/2018	Okezone.com

	ikut juga”	Acara : wawancara dengan media Presiden Jokowi kembali mempertanyakan perkembangan kasus NB yang telah berjalan selama 10 bulan. Kepolisian juga bekerja sama dengan pihak KPK.	
28.	"Polda Metro Jaya masih intens melakukan pengusutan. Saya membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus Novel ini dengan membentuk 166 penyidik yang khusus mengerjakan kasus ini,"	Siapa : Irjen Pol Idham Aziz (Kapolda Metro Jaya) Dimana : Ruang komisi III, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kapan : 14/3/2018 Acara : Rapat dengan pendapat komisi III dengan kepolisian RI Anggota komisis III, Arteria Dahlan menanyakan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan kepada kepolisian RI.	1. Kompas.com 2. Detik.com 3. Okezone.com
29.	"Saya ingin meyakinkan bahwa penyidik sampai hari ini terus bekerja melakukan penyelidikan. Ini hanya menyangkut masalah waktu saja. Kami kerja terus, tidak ada kata berhenti, kemudian bekerja berdasarkan profesionalitas dan diawasi banyak lembaga eksternal maupun internal polri,"	Siapa : Irjen Pol Idham Aziz (Kapolda Metro Jaya) Dimana : Ruang komisi III, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kapan : 14/3/2018 Acara : Rapat dengan pendapat komisi III dengan kepolisian RI Anggota komisis III, Arteria Dahlan menanyakan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan kepada kepolisian RI.	1. Kompas.com 2. Detik.com 3. Okezone.com
30	“Polda metro jaya pada satu tahun lalu, sejak peristiwa itu terjadi, sudah melangkah sangat maju ke depan,	Siapa : Brigjen Pol Muhammad Iqbal (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri)	Kompas.com

	progres sudah banyak yang didapat.”	Dimana : Mapolres metro Jakarta Selatan Kapan : 11/4/2018 Acara : wawancara dengan media	
31.	“Juga kami mendapatkan support dari tim KPK, yang ditunjukkan KPK untuk memberikan info-info yang penting untuk pengungkapan kasus ini. Ini menandakan bahwa Polri sangat bekerja keras untuk mengungkap kasus ini.”	Siapa : Brigjen Pol Muhammad Iqbal (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri) Dimana : Mapolres metro Jakarta Selatan Kapan : 11/4/2018 Acara : Wawancara dengan media massa	Kompas.com
32.	"Di negara kita, TGPF sudah banyak dibentuk dalam case-case tertentu, tetapi, sekali lagi, tidak optimal perannya, tidak menyentuh hal-hal teknis. Yang menyentuh hal-hal teknis adalah kami, tapi tentunya dibantu oleh masyarakat,"	Siapa : Brigjen Pol Muhammad Iqbal (Kepala Biro penerangan Masy Divisi Humas Polri) Dimana : Mapolres Jakarta Selatan Kapan : 11/4/2018 Acara : Wawancara dengan media massa Brigjen Pol Iqbal memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai usulan pembentukan TGPF kasus Novel.	Kompas.com
33.	“ Kami tidak main-main. Saya kan beberapa kali bilang, kami optimistis bisa terungkap. Ini hanya masalah waktu.”	Siapa : Irjen Setyo Wasisto (Kepala Divisi Humas Polri) Dimana : Kompleks Mabes Polri Kapan : 12/4/2018 Acara : Wawancara dengan media massa Media mempertanyakan perkembangan kasus pengusutan kasus Novel Baswedan. Dan keraguan publik tentang kasus	Kompas.com

		novel yang ditangani oleh kepolisian.	
34.	<p>“Kami sangat memiliki kepentingan ketika saudara NB (Novel Baswedan) sehat dan yang kami butuhkan adalah keterangan-keterangan tambahan dari saudara NB sendiri.”</p> <p>“Kami doakan semoga saudara Novel Baswedan semakin hebat, semakin banyak memberikan keterangan kepada kepolisian.”</p>	<p>Siapa : Brigjen Pol Muhammad Iqbal (Kepala Biro Penerangan Masyarakat divisi humas Polri) Dimana : Mabes polri Kapan : 11/4/2018 Acara : wawancara dengan media</p>	<p>1. Kompas.com 2. Detik.com</p>
35.	<p>“Ada kemajuan, siapa bilang tidak. Banyak kemajuannya.”</p> <p>“Jalan terus. Kapolda Metro update terus.”</p>	<p>Siapa : Wakapolri Komjen Syafruddin Dimana : di Kompleks Istana Negara Kapan : 8/5/ 2018 Acara “</p>	Detik.com
36.	<p>Memang berkali-kali saya sampaikan kasus itu ada karakteristik masing-masing tidak bisa disamaratakan. Bahkan NB berikan info apapun kami welcome. Ada yang sensitif, sensitif apapun <i>welcome</i> , kita tuangkan dalam BAP.”</p>	<p>Siapa : Brigadir Jendral Polisi Mohammad Iqbal (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri) Dimana : Markas Besar Polri, Jakarta Kapan : 27/7/18 Acara : Wawancara dengan media Kontes: Novel Baswedan telah kembali bertugas di KPK sejak tanggal 27 Juli 2018. Pegawai KPK mengadakan sayembara untuk menangkap pelaku penyerangan air keras terhadap Novel dengan hadiah sebuah sepeda. Polri</p>	Kompas.com

		menggapi hal itu sebagai langkah baik untuk memotivasi masyarakat agar memberikan informasi terkait kasus tersebut.	
37.	“Siapa yang ngomong polisi tidak punya niat? Silakan saja <i>menjudge</i> begitu. Kita udah upayakan pengungkapan kasus itu sangat luar biasa.”	Siapa : Brigjen Mohammad Iqbal (Karo Penmas Divisi Humas Polri) Dimana : Mabes Polri Jakarta Kapan : 2/8/18 Acara : wawancara dengna media Polri menolak pendapat Novel Bahswedan bahwa pihak kepolisian tidak berniat menuntaskan kasus penyerangan air kereas terhadap dirinya.. Novel berkata, ““Saya mendesak Bapak Presiden, mengapa tidak Bapak Kapolri, saya sejak awal sampaikan polisi tidak mau untuk ungkap ini, oleh karena itu saya minta pada atasan polisi," kata Novel di gedung KPK (7/18)	1. Kompas.com 2. Detik.com
38.	“Bahkan kita menyampaikan, Novel silakan datang ke penyidik, <i>welcome</i> kalau ada bukti-bukti yang kuat.”	Siapa : Brigjen Mohammad Iqbal (Karo Penmas Divisi Humas Polri) Dimana : Mabes Polri Jakarta Kapan : 2/8/18 Acara : wawancara dengna media Polri menolak pendapat Novel Bahswedan bahwa pihak kepolisian tidak berniat menuntaskan kasus penyerangan air kereas terhadap dirinya. Keplosian mempersilakan Novel untuk memberikan keterangan BAP.	1. Kompas.com 2. Detik.com

39.	"Kita sudah melakukan proses upaya pengungkapan kasus itu sangat luar biasa. Ratusan saksi ya kan, beberapa alat bukti kita sita, CCTV sudah ratusan kita analisa, sketsa wajah, pemeriksaan saksi-saksi,"	Siapa : Brigjen Mohammad Iqbal (Karo Penmas Divisi Humas Polri) Dimana : Mabes Polri Jakarta Kapan : 2/8/18 Acara : wawancara dengna media Polri menolak pendapat Novel Bahswedan bahwa pihak kepolisian tidak berniat menuntaskan kasus penyerangan air kereas terhadap diriny	1. Kompas.com 2. Detik.com
-----	--	--	-------------------------------